

**YAYASAN PENDIDIKAN LANCANG KUNING
LAKSAMANA RAJA DI LAUT
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LANCANG KUNING**

**ANALISIS PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS PADA
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI**

SKRIPSI



Oleh:

YULIA NINGSIH

NIM : 2110090811001

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
TAHUN 2025**

ABSTRAK

ANALISIS PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS PADA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI

NAMA : YULIA NINGSIH

NIM : 2110090811001

Pemberdayaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari upaya inklusi sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup kelompok masyarakat yang mengalami keterbatasan fisik dan intelektual. Meskipun Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat telah melaksanakan berbagai program bantuan dan rehabilitasi yaitu masih ditemukan beberapa kegiatan dalam program rehabilitasi sosial pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai yang belum berjalan optimal dan juga masih ditemukannya kegiatan pemberdayaan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat terhadap penyandang disabilitas yang belum terealisasi di Kota Dumai. Berdasarkan gejala masalah tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui Pemberdayaan Penyandang Disabilitas pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai. (2) Untuk mengetahui dampak pemberdayaan bagi penyandang disabilitas Kota Dumai yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto (2013) yang mencakup aspek bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi.

Penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai telah melaksanakan berbagai program pemberian bantuan sosial berupa uang tunai, sembako, alat bantu seperti kursi roda dan alat dengar, serta pelayanan kesehatan dan pendidikan melalui posyandu lansia dan akses layanan pemerintah. Namun, realisasi anggaran dan pencapaian program masih bervariasi, dengan distribusi bantuan dan pelayanan sosial yang belum merata antar kecamatan dan sebagian penyandang disabilitas belum menerima bantuan. Pemberdayaan difabel perlu dilakukan secara terintegrasi melalui pemenuhan hak dasar, peningkatan akses layanan, pendataan akurat, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan agar program lebih efektif dan sesuai kebutuhan, sehingga seluruh penyandang disabilitas di Kota Dumai dapat menikmati hak dan kesejahteraan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, hidayah, serta karunia kesehatan dan kekuatan yang selalu diberikan-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul **“Analisis Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lancang Kuning. Tanpa rahmat dan izin Allah SWT, niscaya penulis tidak akan mampu melaksanakan dan menyelesaikan penelitian maupun penulisan ini dengan sebaik-baiknya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan yang diraih bukanlah hasil kerja penulis sendiri, melainkan buah dari dukungan, bimbingan, dan kerja sama dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi serta motivasi tanpa henti. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis ingin menyampaikan penghargaan yang tulus kepada :

1. Bapak Latip, S.Sos., M.Si., Ph.D, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lancang Kuning sekaligus Dosen Pembimbing I, yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi yang sangat berarti bagi penulis selama masa penulisan skripsi ini. Setiap nasihat dan dorongan yang diberikan telah menjadi pendorong utama bagi penulis untuk terus berkarya dan menyelesaikan penelitian ini.

2. Bapak Variza Aditya ,S. Sos., M.Si. selaku Wakil Ketua I STIA Lancang Kuning yang telah memberikan support dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini
3. Ibu Dila Erlianti, S.Sos., M.Si, selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara dan juga sebagai Dosen Pembimbing II, yang dengan kebaikan hati dan kesabaran senantiasa memberikan waktu, arahan, dukungan, bimbingan, serta petunjuk yang sangat membantu dalam menyusun skripsi ini. Bantuan beliau sangat berharga agar penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan tepat waktu dan sesuai harapan.
4. Seluruh Dosen dan Staff Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lancang Kuning, yang selama ini telah berbagi ilmu pengetahuan, dedikasi, serta memberikan dukungan moral yang sangat penting dalam membantu penulis mengarungi perjalanan akademik hingga mencapai tahap penulisan skripsi.
5. Ibu drg. Hermiyati beserta seluruh pejabat fungsional di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, yang dengan penuh kebaikan hati telah memberikan izin penelitian sekaligus memudahkan pengumpulan data pendukung yang sangat dibutuhkan untuk kelengkapan skripsi ini. Bantuan dan fasilitasi yang diberikan menjadi bagian penting dalam terselesaikannya penelitian ini.
6. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Sunarto dan ibu Misngatin yang tanpa lelah selalu memberikan doa, cinta, kasih sayang, serta semangat hidup yang tak pernah surut. Segala pengorbanan dan dukungan yang kalian berikan merupakan fondasi kuat bagi penulis untuk terus maju dan menyelesaikan

pendidikan ini.

7. Adik tercinta Ade Ardyanto dan Zuria Natasya, yang menjadi sumber kebahagiaan dan motivasi tersendiri dalam menjalani proses panjang ini. Terima kasih atas segala dukungan dan keceriaan yang selalu hadir di tengah kesibukan penulis.
8. Sepupu yang telah ku anggap menjadi seperti kakak sendiri, Tita Zidni Ilma,S.Pd. Terima kasih atas perhatian, motivasi, serta dukungan yang tulus selama ini. Kehadiranmu sungguh memberikan warna dan semangat dalam perjalanan akademik penulis.
9. Sahabatku, Delvela Oktaniza dan Milia Andriani yang selalu hadir di saat suka maupun duka, memberikan semangat, doa, dan dukungan moral yang begitu berarti. Persahabatan yang indah ini menjadi salah satu kekuatan yang tak ternilai bagi penulis.
10. Keluarga besar Sukimin family dan Dukut family, terima kasih atas doa, dukungan, dan kebersamaan yang selalu menjadi sumber kekuatan bagi penulis.
11. Seluruh teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan baik dari segi isi, penyajian, maupun metode. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi

kesempurnaan karya tulis ini. Semoga segala bantuan, dukungan, dan doa yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah dan mendapatkan keridhaan dari Allah SWT. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam pemberdayaan penyandang disabilitas, serta menjadi amal jariyah bagi kita semua.

Akhir kata, penulis hanya mampu berdoa semoga setiap langkah kita selalu dibimbing oleh-Nya dan semoga skripsi ini menjadi bukti nyata dari usaha dan perjuangan yang tidak mudah, namun penuh makna. Terima kasih.

Dumai, Juli 2025

Penulis

Yulia Ningsih

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN

LEMBARAN PERNYATAAN KEBENARAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR..... viii

DAFTAR BAGAN..... ix

DAFTAR LAMPIRAN x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar BelakangError! Bookmark not defined.

B. Rumusan MasalahError! Bookmark not defined.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....Error! Bookmark not defined.

BAB II TELAAH PUSTAKA

A. Kerangka Teori..... 24

B. Operasional Variabel Penelitian..... 44

C. Kerangka Berpikir 49

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian 50

B. Populasi Dan Sampel..... 50

C. Jenis Dan Sumber Data 51

D. Teknik Pengumpulan Data 53

E. Analisis Data 54

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai 57

B. Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai 58

C. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai 59

D. Keadaan dan Komposisi Aparatur Sipil Negara(ASN) Dan Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja (TKPK) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai.....	67
E. Sarana dan Prasarana.....	77
BAB V ANALISIS PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS PADA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT KOTA DUMAI	
A. Identitas Informan	79
B. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai	83
C. Dampak Pemberdayaan bagi Penyandang Disabilitas Kota Dumai yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai	151
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	155
B. Saran.....	157
DAFTAR PUSTAKA.....	1

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Pencapaian Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai	Error! Bookmark not defined.
Tabel I. 2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pencapaian Triwulan II Pada Diinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai	Error! Bookmark not defined.
Tabel I. 3 Jumlah Penyandang Disabilitas Berdasarkan Kriteria	Error! Bookmark not defined.
Tabel I. 4 Persentase Yang Belum Menerima Bantuan Sosial Tunai Disabilitas Tahun 2024	Error! Bookmark not defined.
Tabel I. 5 Jumlah Penerima Bantuan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas Tahun 2024	Error! Bookmark not defined.
Tabel III. 1 Informan Penelitian	51
Tabel IV. 1 Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja(TKPK)	69
Tabel IV. 2 Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja Berdasarkan Umur	70
Tabel IV. 3 Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja(TKPK) Berdasarkan Tingkat Pendidikan	72
Tabel IV. 4 Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja(TKPK) Berdasarkan Pangkat atau Golongan Ruang	73
Tabel IV. 5 Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja(TKPK) Berdasarkan Bidang Kerja	75
Tabel IV. 6 Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja(TKPK) Berdasarkan Status Pangkat	76

Tabel IV. 7 Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai.....	77
Tabel V. 1 Jumlah Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	80
Tabel V. 2 Jumlah Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	81
Tabel V. 3 Jumlah Informan Berdasarkan Tingkat Umur.....	82
Tabel V. 4 Status Informan.....	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Penyerahan Bantuan Sosial Tunai untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas Kota Dumai	Error! Bookmark not defined.
Gambar III.1 Komponen dalam Analisis Data	56

DAFTAR BAGAN

Bagan IV. 1 Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai.....	59
Bagan V. 1 Bentuk Pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang sesuai untuk diterapkan di Kota Dumai	149

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lancang Kuning Dumai
Nomor : 04/SK/63201/XI/2024 tanggal 26 November 2024 Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa STIA Lancang Kuning
Dumai
2. Surat Keterangan telah selesai melakukan Penelitian dan Pengumpulan Data
dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Nomor :
500.10.3.1/003/DinsosPM-Sekre
3. Verbatim Wawancara
4. Lembaran Daftar Konsultasi Bimbingan Skripsi Mahasiswa
5. Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk tuhan yang diciptakan memiliki seperangkat haknya sebagai manusia yang harus dijaga serta dilindungi. Kita hidup di negara Indonesia yang dimana Indonesia ini adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, tentu negara Indonesia mempunyai seperangkat aturan hukum dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia, terkhusus untuk hak asasi setiap warga negaranya. Hak asasi manusia sudah melekat pada diri manusia yang dimana memberikan suatu kehormatan, menjunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum juga pemerintah. (Farrisqi and Pribadi 2021).

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, demikianlah isi pasal 27 ayat 2 UUD 1945, begitu juga dengan para penyandang disabilitas memiliki hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Rifqi Febrianto 2006). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (Britania and Widiyarta 2023).

Penyandang disabilitas termasuk bagian dari warga Negara Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai makhluk hidup. Mereka

tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak memiliki keterbatasan sehingga hak dan kewajiban mereka juga sama seperti masyarakat normal lainnya, namun penyandang disabilitas mempunyai hambatan yang disebabkan oleh kondisi tubuh mereka.

Istilah penyandang disabilitas berasal dari serapan kata bahasa Inggris yaitu *“disability atau disabilitie”* yang mempunyai arti menggambarkan suatu ketidakmampuan atau kekurangan yang terdapat pada bagian fisik maupun mental, sehingga menyebabkan terjadinya keterbatasan untuk melakukan suatu aktivitas terhadap seseorang yang mengidapnya. Keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas sering dipandang sebelah mata keberadaannya dan dianggap sebagai kelompok yang rentan dan lemah sehingga menimbulkan stigma ketidakberdayaan yang pada akhirnya menghambat perkembangan dalam segala aspek kehidupan yang dijalani oleh penyandang disabilitas. (Az-Zahra and Hamid 2022)

Jenis-jenis penyandang disabilitas di Indonesia disebutkan dalam PP Nomor 72 Tahun 1991 yang berbunyi : “Jenis kelainan terdiri atas kelainan fisik dan/atau mental dan/kelainan perilaku. Kelainan fisik meliputi, tunanetra, tunadaksa, dan tuna rungu. Kelainan mental meliputi, tuna grahita ringan dan sedang. Kelainan perilaku meliputi tunalaras. Peserta didik dapat juga terwujud sebagai kelainan ganda”. Berdasarkan Peraturan Pemerintah di atas, penyandang disabilitas terdiri dari kelainan fisik, mental dan perilaku. Kelainan fisik meliputi tunadaksa, tunarungu, dan tunanetra (Rayhan 2017).

Selain itu Undang-Undang No.39 Tahun 1999 menjelaskan bahwa :

“Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan”. Sebagaimana yang termaktub dalam Undang-undang No 39 tahun 1999 pasal 54 mengatakan “Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”(Pemerintah Republik Indonesia 1999). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwasannya tidak ada batasan umur tertentu untuk dikategorikan sebagai penyandang disabilitas, setiap individu dari berbagai usia dapat dikategorikan sebagai penyandang disabilitas jika mengalami keterbatasan. Keterbatasan ini dapat berupa fisik, intelektual, mental, atau sensorik, dan harus cukup signifikan sehingga mempengaruhi kemampuan individu untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara normal.

Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menjelaskan bentuk untuk mewujudkan pemenuhan hak dan kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas, penghormatan, dan perlindungan penyandang disabilitas dalam mewujudkan taraf kehidupan yang mandiri dan sejahtera. Adanya undang-undang tentang penyandang disabilitas menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah untuk bertanggung jawab dalam

menghormati, melindungi, dan memenuhi hak penyandang disabilitas untuk dapat meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu Pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan hak yang telah termuat dalam undang-undang tersebut, dengan memberikan salah satu bentuk berdaya bagi penyandang disabilitas yaitu memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas dalam menentukan kebutuhan hidupnya dan memberikan program pelatihan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan (potensi) yang dilakukan melalui program pemberdayaan yang dilakukan secara intensif dan menyeluruh.(Az-Zahra and Hamid 2022)

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 mengatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (HAM 2004).

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2022 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Wali kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial, Bidang Perlindungan, Jaminan dan Penanganan Bencana serta Urusan

Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah (PERWAKO 2014).

Dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas mengatakan bahwa Penyandang Disabilitas di Kota Dumai adalah warga negara yang memiliki hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (PERDA 2020). Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai tersebut pemerintah diwajibkan untuk melakukan perlakuan khusus dan juga melindungi serta pemenuhan hak penyandang disabilitas. Hak-hak penyandang disabilitas adalah hak yang harus didapatkan dari penyandang disabilitas dimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Dumai No. 1 Tahun 2020 Pasal 67. Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak atau kesempatan untuk mendapatkan rehabilitasi sosial (pemberian alat bantu, sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang disabilitas, konsultasi untuk mengembangkan kemampuan sosialitas bagi penyandang disabilitas), jaminan sosial (asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan), pemberdayaan sosial (pemberian motivasi, pelatihan keterampilan, pendampingan, pemberian modal, peralatan usaha dan fasilitasi tempat usaha) dan perlindungan sosial (bantuan sosial dan bantuan hukum).

Dinas sosial merupakan dinas yang mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas, otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial. Dinas sosial selaku dinas yang menaungi masalah sosial harus mampu berperan secara maksimal untuk memberdayakan para

penyandang disabilitas terutama yang telah memasuki tahap produktif dalam hidupnya.

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai mendapatkan anggaran sebesar Rp.27.649.042.320,- yang digunakan untuk membiayai 8 (delapan) program dan 16 (enam belas) kegiatan yang bersumber dari APBD Kota Dumai, dengan jumlah realisasi sampai dengan triwulan II (dua) Rp.3.984.181.302,- atau persentase realisasi sebesar 14,41% per Tanggal 31 Mei 2024. Penjelasan pencapaian realisasi pelaksanaan program kegiatan sebagai berikut:

Tabel I.1
Pencapaian Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai

No	Program	Anggaran	Realisasi pada Triwulan II	Persentase Realisasi
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 6.108.840.160,-	Rp. 2.363.906.365,-	38,7%
2.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 788.906.460,-	Rp.339.647.900,-	43,05%
3.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp.10.000.000,	Rp. 5.650.000,-	56,50%
4.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 805.000.000,-	Rp. 463.364.863,-	57,56%
5.	Program Penanganan Bencana	Rp. 627.277.000,-	Rp. 122.134.000,-	19,47%
6.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp.51.854.700,-	Rp.28.486.400,-	68,06%
7.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 270.000.000,-	Rp. 28.226.800,-	10,45%
8.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 1.699.400.000,-	Rp. 426.509.074,-	25,10%

Sumber: Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2024

Tabel I.1 menyajikan data capaian delapan program Dinas Sosial Kota Dumai, meliputi tujuan, anggaran, realisasi hingga triwulan II, dan persentase pencapaian. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran

Rp6,1 miliar baru terealisasi 38,7%, menunjukkan perlunya peningkatan pelaksanaan. Program Pemberdayaan Sosial mencapai 43,05% dari Rp789 juta, masih ada ruang untuk optimalisasi. Penanganan Migran Korban Kekerasan terealisasi 56,5% dari Rp10 juta, menunjukkan respons yang cukup baik meski anggarannya kecil. Rehabilitasi Sosial dengan anggaran Rp805 juta terealisasi 57,56%, cukup efektif namun bisa lebih efisien. Penanganan Bencana baru terealisasi 19,47% dari Rp627 juta, perlu evaluasi serius. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan mencapai 68,06% dari Rp52 juta, menunjukkan keberhasilan penggunaan dana. Administrasi Pemerintahan Desa dengan realisasi 10,45% dari Rp270 juta memerlukan perbaikan. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Adat baru mencapai 25,1% dari Rp1,7 miliar, perlu upaya peningkatan efektivitas. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan efektivitas pemanfaatan anggaran dan membantu mengidentifikasi program yang berjalan baik maupun yang menghadapi kendala pelaksanaan.

Adapun hasil evaluasi Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II (dua) sebagai berikut:

Tabel I.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pencapaian Triwulan II Pada Dinas Sosial Dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai

No	Program	Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran berjalan Tahun 2024 yang dievaluasi			Realisasi kinerja sampai dengan Triwulan			
						I		II	
			K	Rp		K	Rp	K	Rp
1.	Rehabilitasi Sosial	Penyediaan Makanan	100	Orang	100.000.000	33	32.800.000	12	11.400.000
		Penyediaan Sandang	100	Orang	30.000.000			85	25.291.500
		Penyediaan Alat Bantu	100	Orang	100.000.000			100	91.000.000
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	100	Orang	30.000.000	20	5.673.400	13	4.150.000
		Pemberian Bimbingan Fisik,Mental,Sp ritual dan Sosial	100	Orang	250.000.000	37	92.119.963	19	46.755.000
		Pemberian Layanan Kedaruratan	100	Orang	100.000.000	53	53.359.000	14	14.106.000
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	100	Orang	25.000.000	6	1.500.000	64	16.000.000
		Pemberian Layanan Rujukan	100	Orang	170.000.000	19	32.160.000	23	38.050.000

Sumber: Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun
2024

Tabel I.2 menunjukkan hasil evaluasi capaian Triwulan II 2024 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai. Program penyediaan makanan menggunakan anggaran Rp 100 juta, dengan 33 orang terealisasi di Triwulan I dan tambahan 12 orang di Triwulan II. Penyediaan sandang belum terealisasi di Triwulan I, tapi di Triwulan II menjangkau 85 orang dengan dana Rp 25,29 juta dari Rp 30 juta anggaran. Penyediaan alat bantu tercapai penuh di Triwulan II dengan dana Rp 91 juta. Pelayanan reunifikasi keluarga melayani 20 orang di

Triwulan I dan 13 orang di Triwulan II dengan total biaya Rp 9,82 juta. Bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial melayani 37 orang di Triwulan I dan 19 orang di Triwulan II dengan pengeluaran Rp 138,87 juta dari Rp 250 juta anggaran. Layanan kedaruratan melayani 53 orang di Triwulan I dan 14 orang di Triwulan II dengan biaya Rp 67,47 juta dari Rp 100 juta anggaran. Penelusuran keluarga meningkat dari 6 orang di Triwulan I menjadi 64 orang di Triwulan II dengan total biaya Rp 16 juta dari Rp 25 juta anggaran. Layanan rujukan melayani 19 orang di Triwulan I dan 23 orang di Triwulan II dengan total dana Rp 70,21 juta dari Rp 170 juta anggaran. Secara umum, beberapa program belum mencapai target, namun ada peningkatan signifikan dari Triwulan I ke Triwulan II.

Berikut dokumentasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat terhadap penyandang disabilitas yang dapat dilihat pada gambar I.1 berikut :

Gambar I.1
Penyerahan Bantuan Sosial Tunai untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas Kota Dumai



Sumber Data : Dinas Sosial Kota Dumai tahun 2024

Berdasarkan Gambar I.1 di atas dapat diketahui bahwa salah satu program pemberdayaan penyandang disabilitas pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan

Masyarakat Kota Dumai. Gambar di atas menunjukkan kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, di mana mereka sedang melakukan penyaluran Bantuan Sosial Tunai bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan dukungan finansial kepada mereka yang membutuhkan, membantu meringankan beban ekonomi, dan memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran. Dinas Sosial berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok yang rentan. Melalui program ini, mereka tidak hanya memberikan bantuan uang tunai, tetapi juga memberikan perhatian dan pengakuan kepada para peserta, menciptakan lingkungan yang ramah dan mendukung. Kegiatan ini mencerminkan upaya Dinas Sosial Kota Dumai dalam memberikan layanan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi masyarakat yang kurang beruntung.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara terhadap salah satu pegawai yang menjabat sebagai Pendamping Rehabilitasi Sosial Ibu Nora Lisda S.Sos, mengenai Program pemberdayaan penyandang disabilitas yang terus berjalan, beliau mengatakan :

“ Untuk Program Pemberdayaan Penyandang Disabilitas itu setiap tahun terus ada. Ada dua bentuk pemberdayaan yang diberikan oleh pihak dinas sosial kepada penyandang disabilitas yaitu berbentuk pelatihan untuk mengasah kemampuan dan kemandirian para penyandang disabilitas seperti menjahit dan otomotif, dan juga bantuan yang diberikan dalam bentuk uang tunai ataupun alat bantu yang bersumber dari anggaran APBD dan APBN. Namun tidak semua mendapatkannya, hal itu karena anggaran yang diberikan kepada kami hanya

terbatas. Ada beberapa masyarakat disabilitas yang tidak mendapatkan bantuan tersebut karena terbatasnya anggaran.”

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor :11/Dinsospm/2024 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai bahwa persyaratan untuk pendaftaran Penyandang Disabilitas yaitu :

1. FC Kartu Keluarga dan KTP
2. Foto individu seluruh tubuh
3. Foto rumah tampak depan dan belakang
4. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah setempat

Sedangkan Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Dumai Nomor 846/1070/2024 Tentang Petunjuk teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Kepada Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas Kota Dumai tahun 2024 bahwa yang menjadi Sasaran dan Kriteria penerima bantuan penyandang disabilitas sebagai berikut:

1. Sasaran penerima bantuan sosial tunai adalah penyandang disabilitas yang memiliki KTP Kota Dumai;
2. Kriteria penerima bantuan Penyandang Disabilitas adalah cacat tetap atau permanen pada fisik dan bukan penerima tetap bantuan sosial yang bersumber dari APBN dan APBD
3. Telah diverifikasi dan validasi oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dan dinyatakan layak berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia (KEMENSOS RI)

untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial melalui Keputusan Wali Kota Dumai

Namun, juga Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Dumai Nomor 846/1070/2024 Tentang Petunjuk teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Kepada Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas Kota Dumai tahun 2024 Penganggaran Bantuan sosial tunai dianggarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Dumai; Besaran bantuan sosial tunai yang diberikan setiap bulannya kepada Lanjut usia dan penyandang disabilitas Kota Dumai Tahun 2004 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per jiwa selama 4 (empat) bulan. Mekanisme Penetapan penerima bantuan sosial kepada lanjut usia dan penyandang disabilitas di Kota Dumai tahun 2024, yaitu :

- a. Pengusulan dan verifikasi dan validasi data penerima bantuan lanjut usia dan penyandang disabilitas dilakukan dan difasilitasi oleh Bidang Rehabilitasi Sosial sebagai pengampu penanganan Lanjut Usia dan penyandang disabilitas berdasarkan kriteria dan ketentuan yang berlaku;
- b. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial melakukan penyaluran bantuan sosial tunai kepada lanjut usia dan penyandang disabilitas;
- c. Hasil Verifikasi dan Validasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai tersebut ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial tunai melalui Keputusan Wali Kota Dumai.

Dijelaskan juga di dalam Surat Keputusan Wali Kota Dumai Nomor 846/1070/2024 Tentang Petunjuk teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Kepada Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas Kota Dumai tahun 2024, adapun

mekanisme penyaluran bantuan sosial tunai kepada lansia dan penyandang disabilitas di Kota Dumai tahun 2024, yaitu:

- a. Pencairan bantuan sosial tunai kepada Lanjut usia dan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam peraturan Wali Kota ini dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Dumai didalam keputusan Wali Kota Dumai;
- b. Bantuan sosial tunai sebagaimana dimaksud, disalurkan oleh Dinas Sosial dan pemberdayaan masyarakat Kota Dumai melalui Bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kota Dumai berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS);
- c. Tata cara penyaluran bantuan sosial tunai kepada Lanjut Usia dan penyandang disabilitas diatur dan disepakati serta dituangkan didalam perjanjian kerjasama;
- d. Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Dumai melakukan pencairan dana bantuan sosial tunai secara langsung kepada penerima bantuan melalui Virtual Account (VA) sesuai data penerima bantuan sosial tunai yang sudah ditetapkan dalam keputusan Wali Kota Dumai;
- e. Bantuan Sosial tunai tidak disalurkan kepada penerima bantuan jika pada saat pelaksanaan penyaluran, penerima bantuan sudah pindah keluar daerah, meninggal dunia, dan dinyatakan tidak layak;
- f. Apabila penerima bantuan sosial tunai meninggal dunia, pindah alamat keluar daerah dan/ atau alasan lain sebagaimana dimaksud. Pekerja Sosial

Masyarakat (PMS) membuat laporan yang diketahui oleh Kelurahan setempat kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai yang memuat informasi bahwa penerima bantuan telah meninggal dunia atau pindah ke luar daerah atau alasan lainnya;

- g. Dalam hal bantuan sosial tunai tidak dapat dicairkan/disalurkan dikarenakan penerima meninggal dunia, pindah alamat ke luar daerah dan/atau alasan lainnya, maka bantuan sosial tunai akan dikembalikan ke Kas Daerah Kota Dumai;
- h. Dalam hal yang ditemukan adanya penerima bantuan sosial tunai yang tidak memenuhi kriteria, maka penerima bantuan tersebut dikeluarkan dari daftar penerima bantuan yang telah ditetapkan dan penerima bantuan tersebut tidak dapat menerima bantuan jika pada tahap pemcairan berikutnya;
- i. Penggantian penerima bantuan sosial tunai lanjut usia dan penyandang disabilitas hanya bisa dilaksanakan sebelum penerima bantuan sosial ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Dumai;
- j. Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial tunai lanjut usia dan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud di atas, didampingi oleh petugas dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai.

Adapun Persentase jumlah yang belum menerima bantuan sosial tunai bagi penyandang disabilitas di Kota Dumai pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel I.3
Jumlah Penyandang Disabilitas Berdasarkan Kriteria

No	Kecamatan	Kriteria	Jumlah
1.	Dumai Kota	Autis/Downsyndrom (Gangguan pada perkembangan saraf)	1
		Tuna Daksa	4
		Mental	8
		Disabilitas fisik	15
		Disabilitas Ganda	1
		Disabilitas intelektual	5
		Downsyndrom (Gangguan pada Saraf)	3
		Tuna Netra	6
		Low Vision, Total Blind (Buta Total)	1
		Low Vision (Buta samar)	2
		Grahita (Lambat berpikir)	6
		Speed Delay (Lambat Bicara)	1
		Tuna Rungu	5
		Total Blind (Buta Warna)	1
2.	Bukit Kapur	CV	1
		Daksa	21
		Mental	5
		Tuna Netra	2
		Disabilitas Sensorik	1
		Down syndrom (Gangguan pada saraf)	1
		Disabilitas Ganda	1
		Grahita (Lambat Berpikir)	1
		Low Vision (Buta samar)	3
		Disabilitas Mental	3
		Total Blind (Buta Warna)	1
		Grahita (Lambat berpikir)	4
3.	Dumai Barat	Autis, Wicara	4
		Daksa	28
		Mental	8
		Downsyndrom (Gangguan pada saraf)	4
		Tunas Rungu	7
		Low Vision (Buta Samar)	1
		Grahita (Lambat Berpikir)	1
4.	Dumai Selatan	Daksa	31
		Autisme	2
		Mental	5
		Downsyndrom (Gangguan pada	2

		saraf) Intelektual	1
		Low Vision (Buta samar)	2
		Low Vision total Blind (Buta Total)	2
		Grahita (Lambat berpikir)	7
		Netra	4
		Tuna Rungu	7
5.	Dumai Timur	Autis,tuna wicara	4
		Disabiitaa Fisik	38
		Disabilitas Mental	15
		Grahita (Lambat berpikir)	15
		Disabilitas intelektual	1
		Disabilitas sensorik	1
		Low vision (Buta samar)	3
		Tuna Rungu/Wicara	5
		Tuna Netra	3
		Total Blind (Buta Warna)	1
6.	Medang Kampai	Tuna Wicara,Low Vision	3
		Autis	1
		Cerebalpalsy (cv) / Tulang Lunak	2
		Daksa	22
		Disabilitas Mental	4
		Disabilitas sensorik	1
		Downsyndrom	2
		Low Vision (Buta Samar)	1
		Grahita (Lambat berpikir)	1
		Total Blind (Buta warna)	1
7.	Sungai Sembilan	Tuna Rungu	2
		Tuna Daksa	8
		Disabilitas Mental	3
		Tuna Rungu	3
		Grahita (Lambat berpikir)	1
		Downsyndrom (Gangguan pada saraf)	1

Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai

Pada Tabel I.3 Data yang disajikan menggambarkan jumlah penyandang disabilitas di berbagai kecamatan di Kota Dumai, dengan rincian kriteria disabilitas yang berbeda. Kecamatan Dumai Kota mencatatkan jumlah penyandang disabilitas terbesar, dengan 15 individu mengalami disabilitas fisik dan 8 individu dengan disabilitas mental. Sementara itu, Kecamatan Bukit Kapur

memiliki 21 penyandang disabilitas daksa dan 5 dengan disabilitas mental. Kecamatan Dumai Barat menunjukkan angka signifikan pada daksa dengan 28 orang, sedangkan di Dumai Selatan, disabilitas daksa mencapai 31 orang. Dumai Timur melaporkan jumlah tertinggi disabilitas fisik dengan 38 individu, di samping 15 individu dengan disabilitas mental. Medang Kampai mencatatkan 22 individu daksa, dan Sungai Sembilan memiliki 8 orang tuna daksa. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan variasi jenis dan jumlah penyandang disabilitas di setiap kecamatan, mencerminkan kebutuhan akan perhatian dan dukungan yang berbeda-beda dalam komunitas.

Tabel I.4
Persentase Yang Belum Menerima Bantuan Sosial Tunai Disabilitas 2024

No	Kecamatan	Jumlah Disabilitas	Jumlah Penerima	Jumlah Belum Menerima	Persentase Belum Menerima
1.	Bukit Kapur	47 Orang	41 Orang	6 Orang	12,7 %
2.	Dumai Barat	78 Orang	60 Orang	18 Orang	23 %
3.	Dumai Kota	69 Orang	58 Orang	11 Orang	15,9%
4.	Dumai Selatan	67 Orang	55 Orang	12 Orang	17,9%
5.	Dumai Timur	154 Orang	116 Orang	38 Orang	24,6%
6.	Medang Kampai	53 Orang	46 Orang	7 Orang	13,2%
7.	Sungai Sembilan	27 Orang	20 Orang	7 Orang	25,9%

Sumber: Data Sosial Berkhidmat Kota Dumai tahun 2024

Berdasarkan Tabel I.4 Jumlah penyandang disabilitas di beberapa kecamatan di Kota Dumai menunjukkan variasi yang mencerminkan kebutuhan dan tantangan yang berbeda di masing-masing wilayah. Di Kecamatan Bukit Kapur, terdapat 47 penyandang disabilitas, dengan 41 orang sudah menerima bantuan, sementara 6 orang atau sekitar 12,7% belum mendapatkan bantuan. Kecamatan Dumai Barat memiliki 78 penyandang disabilitas, di mana 60 orang telah menerima bantuan dan 18 orang (23%) masih belum. Di Kecamatan Dumai Kota, jumlah penyandang disabilitas tercatat sebanyak 69 orang, dengan 58 orang

penerima bantuan dan 11 orang (15,9%) yang belum memperoleh bantuan. Kecamatan Dumai Selatan mencatat 67 penyandang disabilitas, 55 di antaranya telah menerima bantuan, sehingga 12 orang (17,9%) belum mendapatkan bantuan. Kecamatan Dumai Timur memiliki jumlah penyandang disabilitas terbanyak, yakni 154 orang, dengan 116 penerima bantuan dan 38 orang (24,6%) yang belum menerima bantuan. Di Medang Kampai, terdapat 53 penyandang disabilitas, 46 orang sudah menerima bantuan, dan 7 orang (13,2%) belum. Terakhir, di Kecamatan Sungai Sembilan, terdapat 27 penyandang disabilitas, dengan 20 orang yang telah menerima bantuan dan 7 orang (25,9%) masih belum menerima bantuan. Data ini menggambarkan bahwa meskipun sebagian besar penyandang disabilitas di setiap kecamatan telah menerima bantuan, masih terdapat persentase signifikan yang belum mendapatkan bantuan, menandakan perlunya perhatian lebih lanjut untuk menjangkau seluruh penyandang disabilitas di Kota Dumai.

Secara umum, data ini menunjukkan adanya perbedaan tingkat penerimaan bantuan antar kecamatan. Dumai Timur dan Dumai Barat memiliki persentase tertinggi penyandang disabilitas yang belum menerima bantuan, menandakan perlunya peningkatan perhatian dalam distribusi bantuan agar seluruh penyandang disabilitas dapat memperoleh dukungan yang dibutuhkan. Sedangkan Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan bantuan berupa Alat Bantu Pada Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel I.5
Jumlah Penerima Bantuan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penerima
1.	Bukit Kapur	4 Orang
2.	Dumai Barat	27 Orang
3.	Dumai Kota	24 Orang
4.	Dumai Selatan	5 Orang
5.	Dumai Timur	39 Orang
6.	Medang Kampai	11 Orang
7.	Sungai Sembilan	2 Orang
Jumlah		112 Orang

Sumber Data: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, 2024

Pada Tabel I.5 Data menggambarkan distribusi penerima bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas di Kota Dumai dengan variasi yang cukup signifikan antar kecamatan. Kecamatan Dumai Timur menempati posisi tertinggi dengan 39 penerima bantuan, yang mencerminkan tingginya kebutuhan alat bantu di wilayah tersebut. Kecamatan Dumai Barat dan Dumai Kota juga mencatat jumlah penerima yang cukup besar, masing-masing sebanyak 27 dan 24 orang, menunjukkan populasi penyandang disabilitas yang memerlukan dukungan di kedua kecamatan ini. Sebaliknya, Kecamatan Bukit Kapur dan Medang Kampai memiliki jumlah penerima yang relatif lebih sedikit, yakni 4 dan 11 orang, sementara Kecamatan Dumai Selatan dan Sungai Sembilan mencatat jumlah penerima terendah, masing-masing 5 dan 2 orang. Perbedaan ini kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat kesadaran masyarakat, kemudahan akses layanan kesehatan, serta ketersediaan program bantuan di masing-masing kecamatan. Secara keseluruhan, data tersebut menegaskan pentingnya perhatian khusus dan peningkatan upaya agar bantuan alat bantu dapat menjangkau seluruh penyandang disabilitas di Kota Dumai secara merata, sehingga kebutuhan mereka dapat terpenuhi dengan baik melalui perluasan dan

peningkatan program bantuan yang ada.

Adapun jenis bantuan alat bantu yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dapat dilihat pada tabel I.6 berikut :

Tabel I.6
Jenis Bantuan Alat Bantu

No	Jenis Alat Bantu	Jumlah
1.	Kruk / Tongkat	20
2.	Hearing Head / Alat bantu dengar	10
3.	Kursi Roda	5
4.	Tongkat Kaki 4	20
5.	Walker	7
6.	Matras / Alat bantu jaln	50

Sumber : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, 2024

Tabel I.6 yang berisi data jenis bantuan alat bantu yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai. Berdasarkan tabel tersebut, jenis-jenis alat bantu yang didistribusikan meliputi kruk atau tongkat sebanyak 20 unit, alat bantu dengar (hearing head) sebanyak 10 unit, kursi roda sebanyak 5 unit, tongkat kaki 4 sebanyak 20 unit, walker sebanyak 7 unit, serta matras atau alat bantu jalan sebanyak 50 unit. Jenis dan jumlah bantuan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mendukung kebutuhan penyandang disabilitas, agar mereka bisa lebih mandiri dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan pemberian berbagai alat bantu tersebut, diharapkan kendala fisik yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dapat diminimalkan, sehingga tercipta masyarakat inklusif yang memberikan kesempatan setara bagi setiap warganya untuk beraktivitas dan meningkatkan kualitas hidup.

Pemberdayaan penyandang disabilitas memiliki peranan yang sangat penting

dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil. Pertama-tama, pemberdayaan ini memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan hak yang setara dengan individu lainnya, termasuk akses ke pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan. Dengan memiliki akses yang sama, mereka dapat mengembangkan keterampilan dan potensi diri, yang pada gilirannya meningkatkan kemandirian mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selain itu, pemberdayaan membantu mengurangi stigma dan stereotip negatif yang sering kali melekat pada penyandang disabilitas. Ketika mereka diberdayakan dan terlihat berkontribusi secara aktif dalam masyarakat, pandangan masyarakat terhadap mereka akan berubah, menjadikan mereka bagian integral dari komunitas.

Secara keseluruhan, pemberdayaan penyandang disabilitas bukan hanya tentang memberikan dukungan, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang memungkinkan mereka untuk hidup dengan martabat dan berkontribusi secara maksimal. Dengan demikian, pemberdayaan penyandang disabilitas merupakan langkah krusial dalam membangun masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan menghargai setiap individu, tanpa memandang latar belakang atau kondisi fisik.

Mengingat pentingnya dalam meningkatkan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Dumai maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS PADA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI”**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti menemukan beberapa gejala masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Masih ditemukan beberapa kegiatan dalam program rehabilitasi sosial pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai yang belum berjalan optimal
2. Masih ditemukan kegiatan pemberdayaan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Penyandang Disabilitas yang belum teralisasi di Kota Dumai

Berdasarkan gejala masalah yang ditemukan diatas, maka yang jadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemberdayaan penyandang disabilitas pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai ?
2. Apa Dampak pemberdayaan bagi Penyandang Disabilitas Kota Dumai yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai ?

B. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui Pemberdayaan penyandang disabilitas pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai
- b. Untuk mengetahui dampak pemberdayaan bagi Penyandang Disabilitas Kota Dumai yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai

2. Kegunaan

- a. Sebagai bahan masukan bagi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dalam meningkatkan Pemberdayaan penyandang disabilitas.
- b. Sebagai bahan pengembangan dan penerapan Ilmu Administrasi khususnya pada Studi Manajemen Sumber Daya Manusia.
- c. Sebagai bahan referensi atau bahan masukan bagi peneliti selanjutnya pada penelitian pada permasalahan yang sama.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata “daya”, yang berarti kekuatan atau “kemampuan”, yang dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan “Power”. Selanjutnya dikatakan pemberdayaan atau empowerment, karena memiliki makna perencanaan, proses dan upaya penguatan atau memampukan yang lemah. (Safyuddin et al. 2017)

Pemberdayaan adalah kata benda, sedangkan actionnya adalah kata kerja yaitu memberdayakan. Memberdayakan masyarakat adalah usaha meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sebelumnya tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan daya (empowerment) atau kekuatan (strengthening) kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan sebagai usaha memandirikan, mengembangkan, menswadayakan, dan memperkuat posisi tawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan melalui pengalihan pengambilan keputusan kepada masyarakat agar mereka terbiasa dan mampu bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dipilihnya. Ini berarti bahwa pemberdayaan masyarakat adalah usaha memandirikan dan memampukan dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran terhadap

potensi yang dimilikinya untuk lebih berdaya guna dan berhasil guna.(Afriansyah 2023)

Istilah “pemberdayaan masyarakat” cukup sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Istilah ini tidak asing lagi di telinga kita mengingat saat ini cukup banyak program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, organisasi sosial/kemasyarakatan, maupun pihak swasta. Berita mengenai program pemberdayaan masyarakat cukup sering kita lihat/dengar mulai dari koran, radio, televisi, dan media internet. Program pemberdayaan masyarakat yang kita kenal, umumnya merupakan sebuah program yang berupaya untuk mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.(Habib 2021)

Secara konseptual, pemberdayaan atau keberkuasaan (empowerment), berasal dari kata ‘power’ (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan akan kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan, dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusannya yang mempengaruhi mereka.(Abkim 2022)

Pemberdayaan, adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan, kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

Menurut Arbi Sanit (1998) pemberdayaan adalah upaya mentransformasikan segenap potensi masyarakat menjadi kekuatan, melindungi dan memperjuangkan nilai-nilai serta kepentingan mereka di dalam segala aspek kehidupan. Dalam hal ini, penguatan ekonomi dipandang sebagai langkah awal atau dasar, di samping pematangan budaya dan pemantapan agama untuk memberdayakan masyarakat. Pengembangan ekonomi dan nilai itu berguna bagi kemandirian serta penguatan posisi tawar masyarakat ketika berhadapan dengan kekuatan negara.

Adapun tujuan utama pemberdayaan adalah memberikan kekuatan, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan ini bisa diakibatkan karena kondisi internal (persepsi

mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Harapannya setelah diberdayakan, bisa lebih sejahtera, berdaya atau mempunyai kekuatan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang utama, dan pada akhirnya akan menciptakan masyarakat yang mandiri. Kemandirian yang dimaksud di sini tidak sekedar dilihat dari aspek ekonomi saja, namun juga secara sosial, budaya, dan hak bersuara/berpendapat, bahkan sampai pada kemandirian masyarakat dalam menentukan hak-hak politiknya (Habib 2021) . Dalam melaksanakan pemberdayaan perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan, Suharto (2005) penerapan pendekatan pemberdayaan dilakukan melalui 5P yaitu :

- 1) Pemungkiman : menciptakan sesuatu atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal.
- 2) Penguatan:memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.
- 3) Perlindungan :melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang(apalagi tidak sehat) antara kuat dan lemah dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah.
- 4) Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas kehidupannya.
- 5) Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam

masyarakat.(Kurniawati, Supriyono, and Hanafi 2013)

Sependapat dengan Ife, Winarni (1998: 75-76) mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan meliputi tiga hal, yaitu: pengembangan (enabling), memperkuat potensi atau daya, dan terciptanya kemandirian. Berdasarkan pendapat tersebut, maka pemberdayaan tidak hanya ditujukan kepada masyarakat yang tidak memiliki daya, tetapi dapat diberikan juga kepada masyarakat yang memiliki daya, namun masih terbatas untuk mencapai kemandirian. Karena itu, daya dan potensi masyarakat harus digali dan dikembangkan. Pemberdayaan dilakukan dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki kemudian berupaya untuk mengembangkannya. Namun, pemberdayaan hendaknya tidak menimbulkan ketergantungan masyarakat, sebaliknya pemberdayaan harus mengantarkan pada proses kemandirian.

Pemberdayaan memberikan tekanan pada pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat. Penerapan aspek demokrasi dan partisipasi dengan titik fokus pada lokalitas akan menjadi landasan bagi upaya penguatan potensi lokal. Dengan demikian, pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah menempatkan masyarakat tidak sekedar sebagai objek melainkan juga sebagai subjek (Wahyuni 2018)

Menurut Ife (1995:1-65), pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan disini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas:

- a. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup: kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan. Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
- b. Ide atau gagasannya: kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
- c. Lembaga-lembaga: kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, dan kesehatan.
- d. Sumber-sumber: kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.
- e. Aktivitas ekonomi: kemampuan, memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa.
- f. Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.(Sriati 2020)

Menurut Mardikanto dan Soebiato (2013:113), pemberdayaan adalah proses pemberian dan atau optimasi daya (yang dimiliki dan atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat), baik daya dalam pengertian kemampuan dan keberanian ataupun daya dalam artian kekuasaan atau posisi tawar. Berdasarkan atas pernyataan tersebut Sumadyo dalam (Mardikanto dan Soebiato, 2013:113) merumuskan 3 upaya pokok dalam setiap pemberdayaan

yang disebut Tri Bina, dimana hal tersebut meliputi Bina Manusia, Bina Usaha dan Bina Lingkungan. Lebih lanjut, dari ke 3 upaya pokok tersebut dikembangkan oleh Mardikanto (2013:114-117) menjadi 4 upaya pokok yang meliputi :

1. Bina Manusia : Bina manusia merupakan upaya pertama dan yang paling utama harus diperhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan, sebab manusia merupakan pelaku atau pengelola manajemen itu sendiri.
2. Bina Usaha : Bina usaha ini dasarnya berorientasi pada perbaikan kesejahteraan (ekonomi), sehingga bina usaha menjadi bagian penting untuk mendukung proses manusia.
3. Bina Lingkungan : Bina Lingkungan dalam hal ini tidak hanya berbicara mengenai lingkungan fisik semata, akan tetapi dalam praktik perlu disadari bahwa lingkungan sosial juga sangat berpengaruh.
4. Bina Kelembagaan : kelembagaan sosial atau organisasi sosial yang tersedia dan dapat berjalan efektif sehingga dapat mendukung terselenggaranya bina manusia, usaha dan lingkungan. Sebagai suatu hal yang disetujui dan memiliki sanksi, dapat disebutkan sebuah kelembagaan apabila memenuhi 4 komponen seperti, 1) Komponen person, 2) Komponen kepentingan, 3) komponen aturan, dan 4) Komponen Struktur.(Julika and P 2016)

Pemberdayaan masyarakat berperan untuk mengubah perilaku masyarakat agar mampu berdaya sehingga bisa meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Mardikanto, dkk (2014), menjelaskan peran dari pemberdayaan masyarakat antara lain sebagai berikut:

1. Perbaikan kelembagaan (Better Institution). Dengan memperbaiki kegiatan yang dilakukan, diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan. Kelembagaan yang baik akan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan.
2. Perbaikan Usaha (Better Business). Perbaikan kelembagaan diharap akan memperbaiki bisnis yang dilakukan sehingga mampu memberikan manfaat kepada anggota lembaga tersebut dan masyarakat yang ada di sekitarnya.
3. Perbaikan Pendapatan (Better Income). Perbaikan bisnis diharap dapat memperbaiki pendapatan seluruh anggota lembaga, termasuk masyarakat. Sehingga dibutuhkan perbaikan dalam hal penerimaan keuangan masyarakat.
4. Perbaikan Lingkungan (Better Environment). Perbaikan pendapatan diharap dapat memperbaiki lingkungan fisik dan sosial karena kerusakan lingkungan kerap disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
5. Perbaikan Kehidupan (Better Living). Pendapatan dan lingkungan yang baik akan memperbaiki standar kehidupan masyarakat. Ini dapat dilihat dari tingkat kesehatan, pendidikan, dan daya beli. Kemampuan ekonomi akan membuat kehidupan masyarakat lebih baik.
6. Perbaikan Masyarakat (Better Community). Jika setiap keluarga mempunyai kehidupan yang baik, akan tercipta kehidupan masyarakat yang lebih baik pula, sehingga dibutuhkan perbaikan masyarakat.(Afriansyah 2023)

Dalam proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan dengan kecenderungan primer menekankan pada proses pemberian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu yang bersangkutan menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. Kedua, proses pemberdayaan dengan kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Berkenaan dengan pemberdayaan, ada tiga power yang menguatkan kapasitas masyarakat. Adapun power tersebut adalah

1. Power to (kekuatan untuk) merupakan kemampuan seseorang untuk bertindak, rangkaian ide dari kemampuan.
2. Power with (kekuatan dengan) merupakan tindakan bersama, kemampuan untuk bertindak bersama. Dasarnya saling mendukung, solidaritas dan kerjasama. Power with dapat membantu membangun jembatan dengan menarik perbedaan jarak untuk mengubah atau mengurangi konflik sosial dan mempertimbangkan keadilan relasi.
3. Power within (kekuatan di dalam) merupakan harga diri dan martabat individu atau bersama. Power within ini merupakan kekuatan untuk membayangkan dan membuat harapan. Sehingga di dalamnya berupa niat, kemauan, kesabaran, semangat, dan kesadaran. (Suaib 2023)

Menurut Kieffer (1981), pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik dan kompetensi partisipatif (Suharto, 1997:215), Parsons et.al (1994:106) juga mengajukan tiga dimensi pemberdayaan yang merujuk pada:

1. Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar.
2. Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengenalkan diri dan orang lain.
3. Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan (Parsons et al., 1994:106).(Pinontoan 2020)

Dapat dikatakan bahwasannya pemberdayaan didorong oleh dan berorientasi pada kolektivitas yang pertama-tama perlu diberdayakan untuk kemudian (kembali) mengambil kendali atas hidup mereka. Analisis semacam ini menyarankan untuk memikirkan konsep pemberdayaan sebagai sumber daya yang diperlukan untuk digunakan oleh masyarakat miskin, kaum minoritas, atau jenis kelompok terpinggirkan atau tertindas lainnya. Namun, ini juga merupakan jenis sebutan yang sama persis yang diadopsi oleh perusahaan-perusahaan besar. Kata “pemberdayaan” umumnya digunakan dalam ranah organisasi untuk menunjukkan desentralisasi kepemimpinan yang mendukung

model administratif yang lebih terbuka dan partisipatif di mana suatu kelompok memegang kekuasaan untuk mengambil keputusan.(Corrêa and Barbosa 2019)

Dalam pengertian ini, di perusahaan-perusahaan di mana pemberdayaan diakui sebagai model manajemen, keputusan didelegasikan kepada kelompok, jika tidak ada satu pun figur otoritas yang bertanggung jawab atas resolusi. Oleh karena itu, karena tuntutan dibagi di antara kelompok, karyawan dapat berpartisipasi aktif dalam memilih strategi komersial yang mereka anggap efektif. Mirip dengan definisi di atas, definisi terakhir ini juga menempatkan kelompok sebagai pembuat keputusan tetapi mengadopsi fokus politik yang berbeda. (Choi et al. 2016)

2. Dampak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan dampak adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif ataupun negatif. Dampak secara sederhana dapat diartikan sebagai pengaruh atau akibat. (Rafli 2018). Pengaruh adalah daya yang timbul dari sesuatu (orang atau pun benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Pengaruh juga dapat dikatakan sebagai suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.(Retnoningsih 2019)

Menurut Soemarwoto dampak adalah suatu perubahan yang terjadi akibat suatu aktifitas-aktifitas tersebut dapat bersifat ilmiah, baik kimia, fisik maupun biologi. Perubahan tersebut dirasakan setelah melakukan suatu hal atau aktifitas yang membawa perubahan dari negatif menjadi positif, dari yang tidak

bisa menjadi bisa, dari yang tidak mampu melakukan suatu menjadi mahir dalam melakukan sesuatu. Dampak yang ditimbulkan dari pembahasan tersebut yakni dampak dari pelatihan, setelah mengikuti pelatihan perubahan keterampilan dan sosial untuk peserta. (Otto 2020)

Menurut Moleong, dampak adalah "perubahan yang disebabkan oleh suatu tindakan atau peristiwa dalam suatu keadaan atau situasi tertentu." Sedangkan Menurut Syaifudin, dampak adalah "efek atau hasil yang muncul sebagai akibat dari suatu kejadian atau tindakan, baik efek positif maupun negative.(Waridah 2017)

Dampak menurut Hosio (2007: 57) adalah perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan. Berdasarkan pengertian tersebut maka dampak merupakan suatu perubahan yang nyata akibat dari keluarnya kebijakan terhadap sikap dan tingkah laku. Sedangkan menurut Irfan Islamy (2001: 115) dampak kebijakan adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan. (Utarry Telung, Michael Mantiri 2019)

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dijelaskan di atas, dapat kita simpulkan bahwa dampak merupakan suatu akibat yang terjadi karena kegiatan tertentu yang dilakukan secara berulang ataupun tidak berulang dan dapat mendatangkan dua perubahan, yaitu perubahan positif atau perubahan negatif. Dari penjabaran diatas, maka kita dapat membagi dampak ke dalam dua pengertian yaitu :

1. Dampak Positif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dampak positif adalah pengaruh kuat yang mempunyai akibat positif. Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi, atau mengesankan orang lain dengan tujuan agar mereka menuruti atau mendukung keinginan seseorang. Sebaliknya, positif adalah sesuatu yang jelas atau padat dan nyata dalam pikiran Anda, terutama bila Anda berfokus pada hal yang baik. Positif adalah keadaan pikiran yang dipertahankan seseorang dengan melakukan upaya sadar untuk menjauhkan fokus mentalnya dari hal-hal negatif ketika sesuatu terjadi.(Rafli 2018). Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik. (Ana 2020)

2. Dampak Negatif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya (Retnoningsih 2019). Dampak negatif juga bisa dikatakan sebagai suatu pengaruh yang ditimbulkan dari perbuatan yang berakibat tidak baik atau buruk bagi seseorang ataupun lingkungan (Qodim 2020)

3. Disabilitas

Kata disabilitas berasal dari bahasa Inggris disability yang menunjukkan keadaan seseorang yang dis-able atau dapat disebut seseorang yang tidak

mampu. WHO (World Health Organization) menyebutkan bahwa disabel merupakan suatu ketidakmampuan dalam melakukan kegiatan tertentu seperti orang-orang normal. Disabilitas merupakan suatu keadaan yang membuat kemampuan fisik ataupun mental seseorang menjadi rusak atau terbatas karena sakit atau cedera. Selain itu, menurut Deborah Creamer disabilitas menggambarkan ketidakmampuan seseorang dalam melakukan beberapa aktivitas sebagai konsekuensi dari kecacatan atau pelemahan. Disabilitas bisa terjadi kepada siapa saja dan dalam waktu kapanpun. Banyak faktor yang dapat membuat seseorang menjadi cacat, tidak mampu, ataupun berkebutuhan khusus dalam hal ini disabilitas misalnya usia lanjut, kecelakaan, sakit penyakit, dan faktor lainnya. (Sianturi and Mathematics 2016)

Menurut UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Penyandang disabilitas merupakan seseorang yang lemah secara fisik ataupun mental dibandingkan individu yang lain, sehingga perlakuan khusus kami berikan dalam penanganan disabilitas sehingga payung hukum yang diperoleh untuk disabilitas lebih terkhususkan. Realitanya, dalam penanganan disabilitas masih belum terealisasi baik secara sepenuhnya. Hal ini dikarenakan masih kurang kesadaran masyarakat terkait regulasi yang telah

dikeluarkan oleh pemerintah tentang disabilitas, hak – hak disabilitas serta hal yang perlu dilakukan untuk disabilitas. Disisi lain penyandang disabilitas tidak sedikit yang menjadi korban kekerasan sehingga penyandang disabilitas mengalami ketakutan tersendiri untuk bergerak dan memiliki kepercayaan diri yang minim.(Rachman 2020)

Penyandang disabilitas sebagai salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial yang perlu mendapatkan perhatian agar mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya, keadaan yang tidak normal menghambat kemampuan untuk melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat Menurut John C. Maxwell, penyandang disabilitas merupakan seseorang memiliki kelainan yang dapat mengganggu fungsinya. tidak semuanya berasal dari bawaan lahir, tetapi juga dapat disebabkan oleh bencana alam, kecelakaan, peperangan, dan lain sebagainya. Penyebab-penyebab tersebut mengakibatkan seseorang harus menggunakan kemampuan yang berbeda dalam meraih sesuatu. Sehingga mereka memiliki kemampuan berbeda dibandingkan masyarakat pada umumnya.

Keterbatasan yang dialami penyandang disabilitas sesungguhnya merupakan pribadi yang utuh. Seperti seseorang pada umumnya, mereka memiliki potensi, bakat, minat, dan cita-cita untuk berkembang. Mereka pasti memiliki kemampuan dalam melakukan berbagai aktivitas sesuai dengan potensinya masing-masing. Berikut ciri-ciri penyandang disabilitas:

- a. Penyandang disabilitas fisik merupakan seseorang yang mengalami kelainan fisik seperti kerusakan fungsi organ tubuh seperti gangguan pada penglihatan,

pendengaran, dan gerak.

- b. Penyandang disabilitas mental, yaitu individu yang mengalami kelainan mental pada tingkah laku akibat bawaan dari lahir atau dari penyakit.
- c. Penyandang disabilitas fisik mental, yaitu seseorang yang mengalami kelainan gabungan antara fisik dan mental.

Pada undang – undang Republik Indonesia nomor 08 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas terkait hak – hak penyandang disabilitas, diantaranya :

- a. Hidup meliputi hak atas penghormatan integritas, tidak dirampas nyawanya, mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya, bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, serta pengucilan, bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi dan bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.
- b. Hak bebas dari stigma untuk penyandang disabilitas meliputi hak dari pelecehan, penghinaan, dan pembelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.
- c. Hak privasi, meliputi hak atas diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum, membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, penghormatan rumah dan keluarga, mendapatkan perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga dan dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya termasuk data dan informasi kesehatan.
- d. Hak keadilan dan perlindungan hukum meliputi; hak atas perlakuan yang

sama dihadapan hukum, diakui sebagai subjek hukum, memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak, mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan, memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan, memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan, hak atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi dan atau perampasan atau pengambilan hak milik, memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingan dalam hal keperdataan di dalam dan diluar pengadilan dan dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

- e. Hak pendidikan yaitu hak atas memperoleh pendidikan yang layak.
- f. Hak pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi dimana penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan memperoleh upah terhadap pekerjaan.
- g. Hak atas kesehatan yaitu penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan informasi, memperoleh pelayanan kesehatan yang serupa dengan individu lainnya
- h. Hak politik yaitu penyandang disabilitas memiliki hak dalam memilih atau dipilih dalam jabatan publik, membentuk atau menjadi anggota pengurus organisasi dalam masyarakat, berperan dalam sistem pemilihan umum.
- i. Hak keagamaan yaitu penyandang disabilitas berhak untuk memeluk agama atau kepercayaan, mendapatkan pelayanan saat beribadah dan berhak aktif dalam organisasi keagamaan.
- j. Hak keolahragaan yaitu dimana penyandang berhak untuk melakukan kegiatan

keolahragaan, mendapatkan penghargaan dalam kegiatan keolahragaan, berprestasi dalam bidang olahraga dan menjadi pelaku olahraga.

k. Hak kebudayaan dan pariwisata yaitu penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh kesamaan dan kesempatan dalam berpartisipasi dalam kegiatan seni budaya, mendapatkan kesamaan dalam berpariwisata dan mendapatkan untuk mengakses perlakuan dan akomodasi.

l. Hak kesejahteraan sosial yaitu penyandang disabilitas berhak dalam mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

m. Hak pelayanan publik yaitu penyandang disabilitas memiliki hak dalam memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik, pendampingan penerjemahan dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses ditempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

n. Hak perlindungan dalam bencana bahwa penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana, mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan resiko bencana, mendapatkan fasilitas serupa lokasi pengungsian.

o. Hak habilitasi dan rehabilitasi yaitu penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan habilitas dan rehabilitasi sejak dini dengan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan, bebas dalam memilih bentuk rehabilitasi yang diikuti dan mendapatkan habilitas dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

- p. Hak pendataan yaitu penyandang disabilitas didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam pencatatan sipil, mendapatkan dokumen kependudukan dan mendapatkan kartu penyandang disabilitas.
- q. Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat yaitu penyandang disabilitas berhak untuk mobilitas pribadi dengan penyediaan alat bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses, mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri, mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk menetapkan tempat tinggal atau pengasuhan keluarga.
- r. Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi yaitu penyandang disabilitas berhak untuk memiliki kebebasan berpendapat, mendapatkan informasi dan komunikasi melalui media yang dapat diakses, dan menggunakan serta memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.
- s. Hak kewarganegaraan yaitu penyandang disabilitas berhak untuk berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- t. Hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi yaitu penyandang disabilitas berhak dalam bersosialisasi dan berinteraksi dalam

kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus/disabilitas. Ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki definisi masing-masing yang mana kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Jenis-jenis penyandang disabilitas:

1. Penyandang Disabilitas Fisik : Yang dimaksud dengan disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu:
 - a. Kelainan Tubuh (Tunadaksa). Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ) polio atau lumpuh.
 - b. Kelainan Indera Penglihatan (Tunanetra). Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (blind) dan low vision.
 - c. Kelainan Pendengaran (Tunarungu). Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.

d. Kelainan Bicara (Tunawicara), adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.

2. Penyandang Disabilitas Intelektual : Yang dimaksud dengan Penyandang Disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom.

3. Penyandang Disabilitas Mental : Yang dimaksud dengan Penyandang Disabilitas Mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku.

4. Penyandang Disabilitas Sensorik : Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

B. Operasional Variabel Penelitian

Untuk mempermudah dalam menganalisa dan menghindarisalah pengertian dan pemahaman terhadap penelitian ini, maka penulis perlu mengoperasionalkan variabel yang akan digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini, yakni :

a. Analisis

Yang dimaksud dengan Analisis dalam penelitian ini adalah serangkaian

kegiatan berpikir yang sistematis dan logis untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam konteks pemberdayaan. Ini mencakup penguraian kondisi sosial, ekonomi, dan aksesibilitas yang mempengaruhi mereka

b. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah salah satu tugas yang harus dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi para penyandang disabilitas, agar mereka dapat mengatur hidupnya dan menuntut haknya dengan lebih efektif. Pemberdayaan tidak hanya berarti memberikan kekuatan atau kemampuan, tetapi juga memungkinkan para penyandang disabilitas untuk memiliki kontrol dan akses terhadap sumber daya, serta mengembangkan kemampuan untuk mengelola lembaga, sumber daya, dan potensi lokalnya secara mandiri dan berkelanjutan

c. Penyandang Disabilitas :

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan. Dalam penelitian ini, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Kota Dumai berfungsi sebagai agen perubahan yang membantu masyarakat memahami dan menghormati penyandang disabilitas di Kota Dumai juga berperan dalam mengembangkan program dan kebijakan yang lebih inklusif dan berorientasi pada penyandang disabilitas, serta dalam meningkatkan aksesibilitas fasilitas

umum dan infrastruktur yang mendukung kehidupan penyandang disabilitas.

Unuk mempermudah dalam menganalisa dan membatasi ruang lingkup variable penelitian ini, maka dalam penelitian ini diperlukan konsep operasional yang disertai pengukurannya. Adapun teori yang digunakan sebagai indikator adalah konsep teori Mardikanto dalam Pemberdayaan Masyarakat (2013) yang mengemukakan beberapa kriteria yang dapat dijadikan pedoman dalam mengukur pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Dumai, kriteria tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Bina Manusia :

Yang dimaksud Bina manusia dalam penelitian ini merupakan langkah awal yang krusial dalam pemberdayaan. Dalam konteks penyandang disabilitas, ini berarti memberikan pelatihan dan pendidikan yang dapat meningkatkan keterampilan serta pengetahuan mereka. Bina Manusia berfokus pada pengembangan sumber daya manusia, terutama dalam meningkatkan kapasitas dan keterampilan individu penyandang disabilitas. Dalam konteks Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, ini mencakup:

- a. Pelatihan dan Pendidikan: Memberikan pelatihan keterampilan yang relevan untuk meningkatkan kemampuan kerja penyandang disabilitas.
- b. Sosialisasi: Mengedukasi masyarakat tentang hak-hak penyandang disabilitas dan pentingnya inklusi sosial.
- c. Pendampingan: Menyediakan bimbingan untuk membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan kerja dan sosial.

2. Bina Usaha

Yang dimaksud Bina usaha dalam penelitian ini yaitu berfokus pada pengembangan kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk penyandang disabilitas, ini dapat melibatkan pembentukan kelompok usaha atau koperasi yang menyediakan akses ke modal, pelatihan bisnis, dan pemasaran produk. Dengan demikian, penyandang disabilitas tidak hanya mendapatkan keterampilan, tetapi juga kesempatan untuk menerapkan keterampilan tersebut dalam praktik bisnis yang nyata. Bina Usaha bertujuan untuk memberdayakan penyandang disabilitas melalui pengembangan ekonomi. Ini meliputi:

- a. Pengembangan Kewirausahaan: Mendorong penyandang disabilitas untuk memulai usaha sendiri dengan memberikan modal awal atau akses ke sumber daya.
- b. Akses Pasar: Membantu dalam memfasilitasi akses ke pasar untuk produk yang dihasilkan oleh penyandang disabilitas.

3. Bina Lingkungan

Yang dimaksud Bina lingkungan dalam penelitian ini yaitu mencakup penciptaan kondisi yang mendukung bagi masyarakat untuk berkembang. Ini melibatkan pengembangan infrastruktur yang ramah disabilitas serta menciptakan lingkungan sosial yang inklusif. Bina Lingkungan berfokus pada menciptakan lingkungan yang mendukung bagi penyandang disabilitas. Ini mencakup:

- a. Fasilitas Publik yang Ramah Disabilitas: Meningkatkan aksesibilitas

infrastruktur publik seperti jalan, transportasi, dan gedung.

- b. Kerjasama dengan Stakeholder: Bekerjasama dengan berbagai pihak untuk menciptakan kebijakan yang mendukung aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

4. Bina Kelembagaan

Yang dimaksud Bina kelembagaan dalam penelitian ini berkaitan dengan penguatan struktur organisasi yang mendukung pemberdayaan masyarakat. Ini termasuk pembentukan lembaga atau kelompok yang dapat menjadi wadah bagi penyandang disabilitas untuk bersuara dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Kelembagaan yang kuat akan memfasilitasi komunikasi antara penyandang disabilitas dan pemerintah, serta memastikan bahwa kebutuhan mereka diperhatikan dalam kebijakan publik. Bina Kelembagaan berfokus pada penguatan lembaga-lembaga yang terlibat dalam pemberdayaan penyandang disabilitas. Ini meliputi:

- a. Penguatan Organisasi Penyandang Disabilitas: Membantu organisasi yang mewakili kepentingan penyandang disabilitas agar lebih efektif dalam advokasi dan pelayanan.
- b. Koordinasi Antar Lembaga: Membangun jaringan antara Dinas Sosial, pemerintah daerah, LSM, dan sektor swasta untuk mendukung program-program pemberdayaan.
- c. Penyusunan Kebijakan: Berperan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas di tingkat lokal.

C. Kerangka Berpikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai yang terletak di Jl Tuanku Tambusai, Bagan Besar, Kec. Bukit Kapur, Kota Dumai.

Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian pada kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, adalah peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam tentang urusan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Dumai didasarkan pada keterkaitan dengan tujuan penelitian. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik dan relevan tentang Analisis Pemberdayaan Penyandang Disabilitas pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai

B. Populasi Dan Sampel

Menurut Sugiyono (2007:90) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan Sampel menurut Sugiyono (2007:91) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Dalam hal ini peneliti memerlukan Informan yang mempunyai pemahaman yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian yang berguna untuk memperoleh data dan informasi yang lebih akurat. Informan yang diambil peneliti dalam penelitian ini terdiri dari dua unsur, yaitu Pegawai

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dan juga Penyandang Disabilitas di Kota Dumai.

Adapun untuk Penentuan sampel (Informan) yang digunakan yaitu teknik Purposive Sampling. Menurut Sugiyono (2013) Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Alasan peneliti menggunakan Teknik Purpoive Sampling adalah peneliti ingin mencari seseorang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek situasi sosial yang diteliti.(Sugiyono 2013)

Tabel III. 1
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1.	Kepala Dinas Sosial Kota Dumai	1
2.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	1
3.	Pejabat Fungsional Rehabilitasi Sosial	2
4.	Penyandang Disabilitas di Kota Dumai	4
Jumlah		8

Sumber: Data Olahan Peneliti 2025

C. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk nonangka, seperti kalimat-kalimat, foto atau rekaman suara dan gambar. Sedangkan Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber utama dari penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama yang didapatkan langsung di lapangan oleh seorang peneliti baik dengan cara wawancara maupun observasi (Sugiyono 2013). Dalam penelitian ini, data primer yang didapatkan berasal dari wawancara secara langsung dengan informan yang telah ditentukan yang berhubungan dengan Analisis Pemberdayaan Penyandang Disabilitas pada Dinas Sosial Kota Dumai.

Yang dikembangkan oleh Mardikanto (2013:114-117) menjadi 4 upaya pokok yang meliputi :

1. Bina Manusia : Bina manusia merupakan upaya pertama dan yang paling utama harus diperhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan, sebab manusia merupakan pelaku atau pengelola manajemen itu sendiri.
2. Bina Usaha : Bina usaha ini dasarnya berorientasi pada perbaikan kesejahteraan (ekonomi), sehingga bina usaha menjadi bagian penting untuk mendukung proses manusia.
3. Bina Lingkungan : Bina Lingkungan dalam hal ini tidak hanya berbicara mengenai lingkungan fisik semata, akan tetapi dalam praktik perlu disadari bahwa lingkungan sosial juga sangat berpengaruh.
4. Bina Kelembagaan : kelembagaan sosial atau organisasi sosial yang tersedia dan dapat berjalan efektif sehingga dapat mendukung terselenggaranya bina manusia, usaha dan lingkungan. Sebagai suatu hal yang disetujui dan memiliki sanksi, dapat disebutkan sebuah kelembagaan apabila memenuhi 4 komponen seperti, 1) Komponen

person, 2) Komponen kepentingan, 3) komponen aturan, dan 4) Komponen Struktur.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang secara tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalkan melalui orang lain dan dokumen (Sugiyono 2013). Data sekunder diperlukan untuk mendukung pencarian fakta yang sebenarnya. Dalam penelitian ini, data sekunder berasal dari dokumen situs-situs resmi Dinas Sosial Kota Dumai dan juga dokumentasi tentang pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Dumai.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan oleh peneliti (Dawis et al. 2023). Observasi Dalam pengertian psikologik, observasi atau yang disebut pula pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra (observasi langsung) (Arifin 2018). Observasi atau pengamatan dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pengumpulan data yang mengharuskan seorang peneliti terjun langsung ke lapangan guna melihat situasi yang diinginkan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Dawis et al. 2023). Wawancara dilakukan apabila dalam teknik pengumpulan data peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, selain itu apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan peneliti (Dawis et al. 2023).

E. Analisis Data

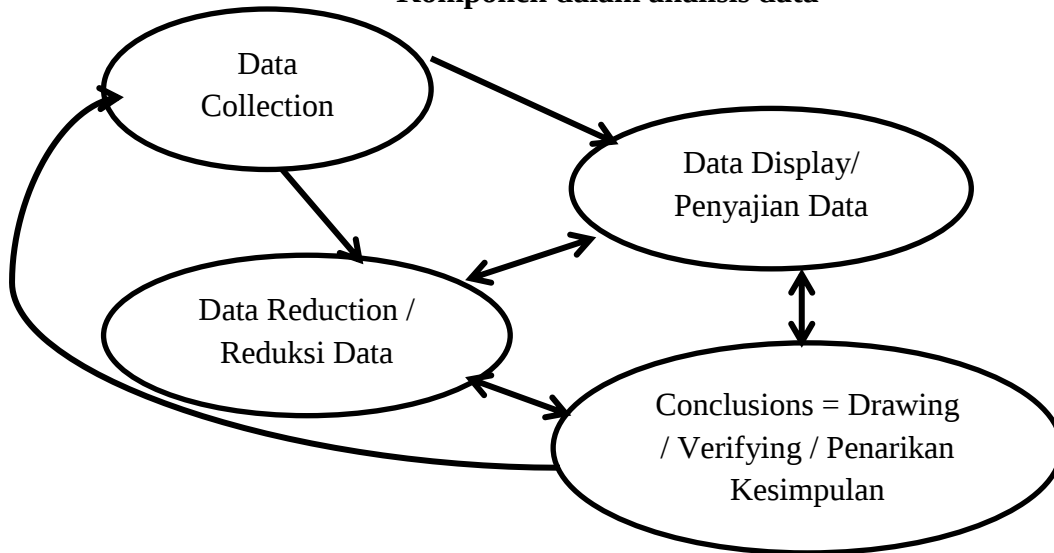
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2020 : 132). ditafsirkan lebih lanjut. Untuk itu data yang dapat dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif model interaktif yang terdiri dari:

- a. Pengumpulan Data: Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi ataupun gabungan ketiganya (Triangulasi). Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak.
- b. Reduksi Data: Data yang diperoleh kemudian direduksi atau dicari kesamaan dan perbedaannya. Reduksi data dilakukan untuk memfokuskan pada hal-hal yang pokok dan mempermudah pengumpulan data selanjutnya,
- c. Penyajian Data: Hasil analisis dan observasi kemudian disajikan dalam bentuk penguatan teori dari sumber analisa. Penyajian data ini membantu dalam memahami data dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.
- d. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi): Pembuktian kebenaran permasalahan sehingga diketahui kesimpulan dan manfaat dari sebuah penelitian tertentu. Langkah ini menjamin bahwa analisis data kualitatif yang dilakukan adalah akurat dan relevan dengan tujuan penelitian.

Adapun yang menjadi komponen Analisis data pada penelitian ini yang peneliti gunakan berdasarkan pendapat Milles and Hubermant (1984) yang dapat penulis sajikan dalam gambar berikut ini:

Gambar III. 1

Komponen dalam analisis data



Sumber: (Sugiyono 2013)

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai

Dinas Sosial Kota Dumai adalah instansi yang relatif baru berdiri secara mandiri, namun seiring waktu telah banyak berkontribusi dalam mengelola lingkungan masyarakat, yang tercermin dari meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat. Sebelumnya, fungsi dan tugas Dinas Sosial ini masih menjadi bagian dari Bagian Kesejahteraan Rakyat di Sekretariat Daerah Kota Dumai. Baru pada tahun 2008, Dinas Sosial Kota Dumai resmi berdiri sendiri berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008, yang kemudian mengalami pembaruan melalui Perda Nomor 4 Tahun 2011 dan Perda Nomor 12 Tahun 2016 mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Dumai.

Sejak berdiri, Dinas Sosial Kota Dumai telah dipimpin oleh beberapa pejabat, di antaranya Drs. Amiruddin, MM (2008-2010), Ishak Efendi (2010-2011), Fazwir, S.Sos (2011-2012), Dermawan, S.Sos (2013-2014), Drs. Chairuddin Adnan (2014-2017), Bambang Hardianto, SH (2017-2018), Hasan Basri, S.KOM (2018-2021), dan drg. Hermiyati yang menjabat sejak 2022 hingga sekarang. Pergantian kepemimpinan ini turut membawa dinamika dalam pengembangan program-program sosial di Kota Dumai.

Pada tahun 2022, Dinas ini mengalami perubahan nama menjadi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai. Perubahan ini menandai perluasan tugas dan fungsi, tidak hanya pada aspek sosial, tetapi juga pemberdayaan

masyarakat, seperti layanan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, serta program-program pemberdayaan sosial dan masyarakat.

Visi yang hendak diwujudkan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai adalah “ **Terwujudnya Khidmat sosial yang transparan dan akuntabel**”. Sesuai dengan visi tersebut, maka Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai mempunyai misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Secara Profesional.
2. Mengembangkan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
3. Mengembangkan pelayanan Informasi pada Masyarakat.
4. Mengedepankan Keterbukaan dalam Proses Pelayanan.
5. Meningkatkan Kualitas, Kuantitas, dan Jangkauan Pelaksanaan Pelindungan dan Jaminan Sosial.

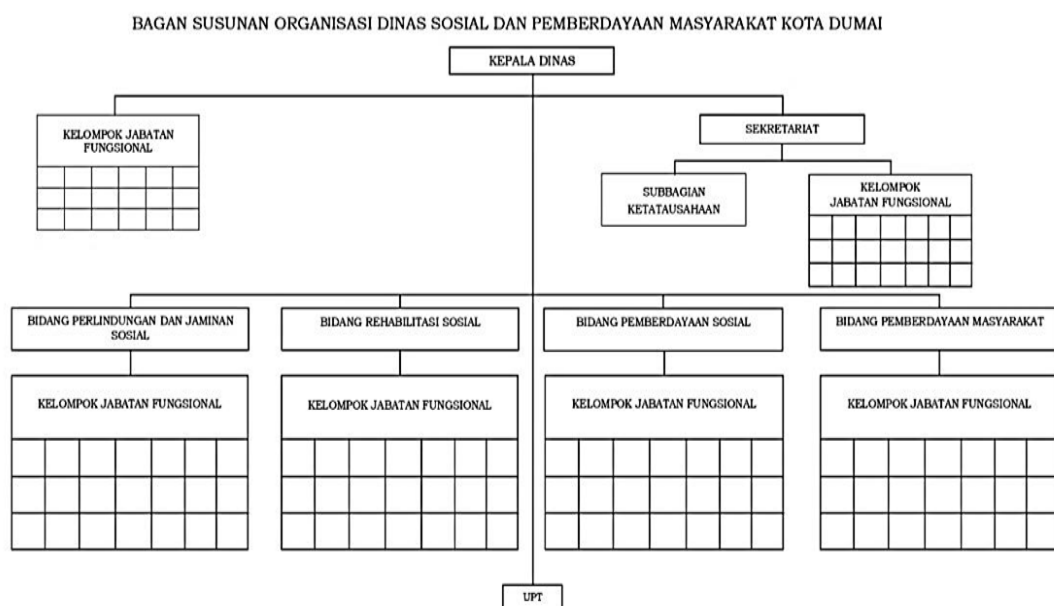
B. Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai

Struktur Organisasi adalah suatu susunan komponen unit-unit kerja dalam suatu organisasi, struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dalam menjalankan kegiatan operasional dalam sebuah organisasi/instansi untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan, struktur sendiri menggambarkan dengan jelas antara pemisah kegiatan pekerjaan anatar satu dengan yang lainnya.

Struktur organisasi memiliki fungsi yang sangat penting dalam sebuah perusahaan atau lembaga karena berperan sebagai kerangka yang mengatur hubungan dan pembagian tugas antar anggota organisasi. Dengan adanya struktur

organisasi, setiap individu mengetahui peran, tanggung jawab, serta wewenangnya secara jelas, sehingga meminimalisir tumpang tindih pekerjaan dan kebingungan dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, struktur ini membantu dalam koordinasi dan komunikasi antar bagian atau departemen, sehingga alur kerja menjadi lebih efektif dan efisien. Struktur organisasi juga memudahkan pengawasan dan evaluasi kinerja, karena setiap posisi memiliki atasan yang bertanggung jawab untuk mengarahkan dan menilai hasil kerja bawahan.

Bagan IV. 1
Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota
Dumai



Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, 2025

C. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota
Dumai

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan

Masyarakat Kota Dumai sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas melaksanakan tugas dan fungsi Dinas. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan umum, pemrograman dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara, dan kerumahtanggaan. Untuk melaksanakan tugas, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Pengkoordinasian dan penyusunan bahan Reformasi Birokrasi, Road Map dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- e. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan pengelolaan sarana;

- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
- g. Penataan organisasi dan tata laksana;
- h. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; dan
- i. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.

Susunan Organisasi Sekretariat terbagi atas :

- a). Subbagian Ketatausahaan : Subbagian Ketatausahaan mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi. Uraian tugas Subbagian Ketatausahaan, sebagai berikut:
 - 1. Mengumpulkan bahan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
 - 2. Menyiapkan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan bahan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
 - 3. Menyiapkan administrasi pegawai untuk mengikuti diklat struktural, teknis dan fungsional;
 - 4. Menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan,

kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;

5. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
6. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah
7. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
8. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan di bidang organisasi dan tata laksana yang meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisis formasi jabatan;
9. Menyiapkan bahan penyelenggaraan urusan surat menyurat/naskah dinas dan kearsipan;
10. Menyiapkan bahan perpustakaan beserta penyelenggaraan, hubungan masyarakat dan protokol; dan
11. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Untuk melaksanakan tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi perlindungan dan jaminan sosial;
- b. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- c. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah atau instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- d. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.

4. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Rehabilitasi Sosial. Uraian tugas Bidang Rehabilitasi Sosial adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
- b. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- c. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah atau instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan

- d. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya bukan Korban HIV/ AIDS dan Napza diluar Panti Sosial; dan
- c. Pelaksanaan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah untuk dipulangkan ketempat asal.

5. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Pemberdayaan Sosial. Uraian tugas Bidang Pemberdayaan Sosial adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah, Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah, dan

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional;

- b. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- c. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah atau instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- d. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) serta Pengumpulan Sumbangan dalam daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional; dan
- d. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.

6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan

pelaporan dibidang Pemberdayaan Masyarakat. Uraian tugas Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan, Penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat, dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- b. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- c. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah atau instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- d. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi pemantauan, evaluasi dan pelaporan penataan, kerjasama serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan partisipasi masyarakat;
- c. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan usaha ekonomi masyarakat

dan pemanfaatan teknologi tepat guna (ttg)

- d. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- e. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah atau instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- f. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.

7. UPT

UPT, merupakan unit pelaksana yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dengan wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan UPT adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

D. Keadaan dan Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dan Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja (TKPK) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai. Setiap bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi di

bidang tersebut.

Keadaan dan Komposisi pegawai pada sebuah organisasi dapat dilihat dari dua aspek yaitu, kuantitas dan kualitas. Berdasarkan data yang diperoleh dari lokasi penelitian bahwa keadaan dan komposisi pegawai dan tenaga kerja dengan perjanjian kerja (TKPK) yang bekerja pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dapat dilihat di bawah ini:

1. Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) Berdasarkan Jenis Kelamin

Dalam organisasi keberadaan manusia merupakan salah satu sumber daya organisasi yang menentukan bagi keberhasilan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, namun demikian pekerjaan dalam organisasi biasanya dilakukan oleh laki-laki dan Perempuan masing-masing memiliki kerja yang berbeda.

Selanjutnya untuk melihat keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) berdasarkan jenis kelamin dari anggota organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV. 1
Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja dengan
Perjanjian Kerja (TKPK)

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)		Total	Persentase (%)
		ASN	TKPK		
1	LAKI-LAKI	9	28	37	45%
2	PEREMPUAN	19	26	45	55%
Jumlah		28	54	82	100%

Sumber Data: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, 2024

Berdasarkan Tabel IV.1 mengenai Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK), dapat dijelaskan bahwa total jumlah pegawai yang tercatat adalah sebanyak 82 orang. Dari jumlah tersebut, pegawai laki-laki berjumlah 37 orang atau setara dengan 45% dari total pegawai, yang terdiri atas 9 ASN dan 28 TKPK. Sementara itu, pegawai perempuan berjumlah 45 orang atau sebesar 55% dari total pegawai, yang terdiri atas 19 ASN dan 26 TKPK. Data ini menunjukkan bahwa proporsi pegawai perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan pegawai laki-laki, baik pada kategori ASN maupun TKPK. Secara keseluruhan, jumlah TKPK (54 orang) juga lebih besar dibandingkan ASN (28 orang), yang menunjukkan bahwa tenaga kerja dengan perjanjian kerja lebih mendominasi komposisi pegawai pada instansi tersebut.

2. Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) Berdasarkan Umur

Dalam mencapai tujuan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Daerah kota Dumai juga harus mempertimbangkan faktor usia Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja (TKPK) yang bekerja pada

organisasi tersebut guna untuk kelancaran organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk melihat umur Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja (TKPK) pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, dapat dilihat dari table berikut:

Tabel IV. 2
Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja (TKPK) Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah (Orang)		Total	Persentas (%)
		ASN	TKPK		
1	20-29 Tahun	0	14	14	17%
2	30-39 Tahun	0	28	28	34%
3	40-49 Tahun	18	11	29	35%
4	50-59 Tahun	10	1	11	13%
Jumlah		28	54	82	100%

Sumber Data: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, 2025

Tabel IV.2 menunjukkan distribusi jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja (TKPK) berdasarkan kelompok umur. Dari data tersebut, terlihat bahwa kelompok umur 30-39 tahun mendominasi jumlah tenaga kerja dengan total 28 orang, yang semuanya merupakan TKPK, sehingga kelompok ini menyumbang 34% dari total tenaga kerja. Kelompok umur 40-49 tahun memiliki jumlah total yang hampir serupa, yaitu 29 orang, dengan komposisi 18 ASN dan 11 TKPK, yang berkontribusi sebesar 35% dari total. Sementara itu, kelompok umur 20-29 tahun hanya terdiri dari 14 orang, semuanya TKPK, yang mewakili 17% dari keseluruhan tenaga kerja. Kelompok umur tertua, yaitu 50-59 tahun, memiliki jumlah paling sedikit dengan total 11 orang, terdiri dari 10 ASN dan 1 TKPK, yang hanya 13% dari total. Secara keseluruhan, ASN

cenderung berada pada kelompok umur yang lebih tua (40 tahun ke atas), sedangkan TKPK lebih banyak ditemukan pada kelompok umur yang lebih muda, khususnya di bawah 40 tahun. Total keseluruhan tenaga kerja yang tercatat adalah 82 orang, dengan persentase ASN sebesar 34% dan TKPK sebesar 66%. Data ini memberikan gambaran bahwa tenaga kerja kontrak lebih dominan di kelompok usia muda, sementara ASN lebih banyak pada kelompok usia menengah ke atas.

3. Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dan Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja (TKPK) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Setiap Organisasi memerlukan anggota organisasinya yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan berbagai pekerjaan, sebab sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting bagi suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Hal penting yang dapat mempengaruhi kemampuan anggota organisasi dalam bekerja adalah latar belakang pendidikan formal.

Latar Belakang pendidikan seorang pegawai akan dapat pula memberikan kemudahan bagi pimpinan organisasi baik dalam bidang pekerjaan maupun pemberian pelatihan. Untuk itu lebih jelasnya tentang pendidikan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel IV. 3
Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja Dengan Perjanjian
Kerja (TKPK) Berdasarkan Tingkat pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)		Total	Persentase (%)
		ASN	TKPK		
1	S2	6	0	6	7%
2	S1	13	12	25	30%
3	D III	5	3	8	10%
4	SMA	4	39	43	52%
JUMLAH		28	54	82	100%

Sumber Data: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, 2025

Tabel IV.3 menggambarkan distribusi jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja (TKPK) di Kota Dumai berdasarkan tingkat pendidikan mereka pada tahun 2025. Dari total 82 orang, ASN berjumlah 28 orang dan TKPK sebanyak 54 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar tenaga kerja berada pada tingkat pendidikan SMA dengan jumlah 43 orang atau 52% dari total, dimana 4 di antaranya ASN dan 39 TKPK. Pendidikan S1 menempati posisi kedua dengan 25 orang (30%), terdiri dari 13 ASN dan 12 TKPK. Selanjutnya, lulusan D III berjumlah 8 orang (10%) dan S2 hanya 6 orang (7%), seluruhnya ASN tanpa TKPK pada tingkat pendidikan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas tenaga kerja berpendidikan SMA dan didominasi oleh TKPK, sementara ASN lebih banyak yang berpendidikan S1 dan S2. Secara keseluruhan, tabel ini mencerminkan komposisi tenaga kerja di Kota Dumai yang mayoritas memiliki pendidikan menengah ke atas dengan proporsi ASN yang cenderung memiliki pendidikan lebih tinggi dibandingkan TKPK.

4. Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) Berdasarkan Pangkat atau Golongan Ruang

Pangkat atau golongan ruang tertentu pada Aparatur Sipil Negara akan menentukan keberadaannya pada organisasi. Dalam organisasi pemerintahan, pangkat golongan ruang biasanya dijadikan dasar penempatan seorang ASN dalam menduduki jabatan ataupun pertimbangan untuk promosi karir dalam bekerja sesuai dengan kemampuan yang dicapainya dengan aturan yang berlaku. Adapun kondisi pegawai menurut pangkat atau golongan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV. 4
Keadaan ASN dan TKPK Berdasarkan Pangkat atau Golongan Ruang

No	Pangkat/Golongan Ruang	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Pembina Utama Muda (IV/C)	1	1%
2	Pembina Tk. I (IV/b)	1	1%
3	Pembina (IV/a)	2	2%
4	Penata Tk. I (III/d)	13	16%
5	Penata (III/c)	5	6%
6	Penata Muda Tk. I (III/b)	2	2%
7	Penata Muda (III/a)	4	5%
8	Non Golongan	54	66%
Jumlah		82	100%

Sumber Data: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, 2025

Tabel IV.4 menyajikan keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja (TKPK) berdasarkan pangkat atau golongan ruang. Total jumlah tenaga kerja yang tercatat adalah 82 orang. Dari tabel, terlihat bahwa hanya ada satu orang di masing-masing kategori Pembina Utama Muda (IV/C)

dan Pembina Tingkat I (IV/b), masing-masing menyumbang 1% dari total.

Pada golongan Pembina (IV/a), terdapat 2 orang, yang berkontribusi sebesar 2%. Kelompok Penata Tingkat I (III/d) menunjukkan jumlah yang lebih signifikan dengan 13 orang, menyumbang 16% dari total. Golongan Penata (III/c) memiliki 5 orang, atau 6%, sedangkan Penata Muda Tingkat I (III/b) dan Penata Muda (III/a) masing-masing memiliki 2 dan 4 orang, dengan kontribusi 2% dan 5%.

Dominasi jelas terlihat pada kategori Non Golongan, yang mencakup 54 orang atau 66% dari keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja di lingkungan ini tidak terikat dengan golongan atau pangkat formal, mencerminkan struktur organisasi yang cenderung lebih banyak mengandalkan tenaga kerja non-golongan.

5. Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) Berdasarkan Bidang Kerja

Dalam upaya mencapai tujuan organisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah perlu adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) Dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kontrak (TKPK) untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kontrak (TKPK) berdasarkan bidang kerja pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV. 5
Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja Dengan Perjanjian
Kerja (TKPK) Berdasarkan Bidang Kerja

No	Bagian/ Bidang	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Kepala Badan	1	1%
2	Sekretaris	1	1%
3	Bidang Sekretariat	25	30%
4	Bidang Rehabilitas Sosial	9	11%
5	Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial	11	13%
6	Bidang Pemberdayaan Sosial	15	18%
7	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	8	10%
8	UPT RPSSS	12	15%
Jumlah		82	100%

Sumber Data: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, 2025

Tabel IV.5 memberikan informasi mengenai keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja (TKPK) berdasarkan bidang kerja. Total jumlah tenaga kerja yang tercatat adalah 82 orang. Dari tabel, dapat dilihat bahwa bagian dengan jumlah terbanyak adalah Bidang Sekretariat, yang mencakup 25 orang atau 30% dari total. Selanjutnya, Bidang Pemberdayaan Sosial juga menunjukkan angka signifikan dengan 15 orang, berkontribusi 18%. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial memiliki 11 orang, menyumbang 13%, sedangkan Bidang Rehabilitas Sosial terdiri dari 9 orang atau 11%. Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencatat 8 orang, berkontribusi 10%,

Di bagian atas, terdapat Kepala Badan dan Sekretaris, masing-masing dengan 1

orang, yang menyumbang 1% dari total. Sementara itu, Unit Pelaksana Teknis (UPT) RPSSS memiliki 12 orang, yang berkontribusi 15%. Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja terfokus pada bidang sekretariat dan pemberdayaan sosial, mencerminkan prioritas dalam struktur organisasi yang berorientasi pada pelayanan dan rehabilitasi sosial.

6. Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) Berdasarkan Status Pangkat

Instansi pemerintah tentunya memiliki tujuan, tujuan inilah yang membuat instansi tersebut ada namun terkadang muncul kendala yang membuat tujuan tersebut tidak tercapai. Untuk mencapai kinerja dan prestasi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Status pangkat dalam suatu organisasi juga akan menentukan kelancaran serta pemahaman dalam menjalankan tugasnya pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, adapun status pangkat tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV. 6
Keadaan ASN dan TKPK Berdasarkan Status Pangkat

No	Status Kepegawaian	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	ASN	28	34%
2	TKPK	54	66%
Jumlah		82	100%

Sumber Data: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, 2025

Tabel IV.6 menyajikan keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja (TKPK) berdasarkan status pangkat. Total jumlah yang tercatat adalah 82 orang. Dari data tersebut, terlihat bahwa TKPK mendominasi dengan jumlah 54 orang, yang berkontribusi sebesar 66% dari total.

Sementara itu, ASN hanya berjumlah 28 orang, menyumbang 34% dari keseluruhan. Perbedaan yang signifikan antara jumlah ASN dan TKPK menunjukkan bahwa tenaga kerja dalam organisasi ini lebih banyak berasal dari kategori TKPK, mencerminkan struktur kepegawaian yang lebih mengandalkan tenaga kerja kontrak ketimbang pegawai tetap. Hal ini bisa mengindikasikan kebutuhan fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan tersebut.

E. Sarana dan Prasarana

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki atau yang dapat membantu operasional yang ada pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, adalah sebagai berikut:

Tabel IV. 7
Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah persediaan	Kondisi	
			Baik	Rusak
1.	Komputer	20	18	2
2.	Kipas Angin	1	1	-
3.	Kursi ruang tunggu	10	10	-
4.	Lemari	13	12	1
5.	Lemari Kabinet	1	1	-
6.	Meja Kerja	75	73	2
7.	Kursi Kerja	80	75	5
8.	Printer	25	22	3
9.	Air Conditioner	17	14	3
10.	Televisi	2	2	-
11.	Kulkas	1	1	-
12.	Mesin Tik	2	2	-
13.	Gedung Aula Pertemuan	1	1	-
14.	Rumah Singgah	1	1	-

Sumber data : Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, 2025

Tabel IV.7 menunjukkan data sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai beserta jumlah persediaan dan kondisi masing-masing barang. Berdasarkan data tersebut, kantor ini memiliki berbagai fasilitas penunjang kerja seperti komputer sebanyak 20 unit, dengan 18 unit dalam kondisi baik dan 2 unit rusak. Selain itu, terdapat 1 kipas angin, 10 kursi ruang tunggu, 1 lemari kabinet, 2 televisi, 1 kulkas, 2 mesin tik, 1 gedung aula pertemuan, dan 1 rumah singgah, yang seluruhnya masih dalam kondisi baik. Untuk perabotan kantor, tersedia 13 lemari (12 baik, 1 rusak), 75 meja kerja (73 baik, 2 rusak), serta 80 kursi kerja (75 baik, 5 rusak). Peralatan elektronik lainnya seperti printer berjumlah 25 unit (22 baik, 3 rusak) dan air conditioner sebanyak 17 unit (14 baik, 3 rusak). Secara umum, mayoritas sarana dan prasarana kantor masih dalam kondisi baik, meskipun terdapat beberapa barang yang mengalami kerusakan, terutama pada perangkat elektronik dan perabotan kerja. Data inventarisasi seperti ini penting untuk memastikan efektivitas operasional kantor serta sebagai dasar pengajuan perbaikan atau pengadaan barang baru jika diperlukan.

BAB V

ANALISIS PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS PADA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI

A. Identitas Informan

Informan adalah pihak-pihak yang dijadikan sampel penelitian atau pihak-pihak yang diberikan daftar pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Pejabat Fungsional Rehabilitasi Sosial dan Penyandang Disabilitas di Kota Dumai.

Untuk mendapatkan hasil penelitian penulis melakukan wawancara secara mendalam dengan informan berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, umur dan status informan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

1. Jenis Kelamin Informan

Informan terdiri dari berbagai pihak yang terlibat langsung dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Dumai, yaitu Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Pejabat Fungsional Rehabilitasi Sosial, serta para penyandang disabilitas itu sendiri. Untuk memperoleh gambaran yang komprehensif, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan para informan yang dipilih berdasarkan beberapa kategori, salah satunya adalah jenis kelamin.

Pembagian informan berdasarkan jenis kelamin bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh mencerminkan sudut pandang dan pengalaman dari laki-laki maupun perempuan yang terlibat dalam program pemberdayaan. Hal ini penting karena perbedaan jenis kelamin dapat mempengaruhi pengalaman, kebutuhan, serta tantangan yang dihadapi oleh para informan, khususnya dalam konteks sosial dan pemberdayaan penyandang disabilitas.

Untuk mendapatkan hasil penelitian penulis melakukan wawancara secara mendalam dengan informan berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, umur dan status informan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel V. 1
Jumlah Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Informan	Jumlah	Persentase
1.	Laki-Laki	3	37,5
2.	Perempuan	5	62,5
Jumlah		8	100

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan 2025

2. Tingkat Pendidikan Informan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi jawaban yang diberikan informan, semakin tinggi tingkat pendidikan informan maka jumlah jawaban dan penjelasan yang diberikan pada rangkaian pertanyaan yang diajukan oleh peneliti semakin banyak dan semakin baik. Dari hasil penelitian tentang Analisis Pemberdayaan Penyandang Disabilitas pada

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai maka dapat diketahui tingkat pendidikan informan pada tabel dibawah ini :

Tabel V. 2
Jumlah Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Informan	Persentase
1.	SD	1	12,5
2.	SMP	1	12,5
3.	SMA	2	25
4.	Sarjana (S1)	3	37,5
5.	Magister (S2)	1	12,5
Jumlah		8	100

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan 2025

3. Umur Informan

Umur merupakan salah satu variabel penting karena dapat mempengaruhi sudut pandang, pengalaman, serta respons yang diberikan oleh para informan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Dalam penelitian mengenai Analisis Pemberdayaan Penyandang Disabilitas pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, informan yang dipilih berasal dari berbagai rentang usia. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data yang lebih beragam dan komprehensif.

Informan dengan usia yang lebih muda cenderung memiliki pandangan yang lebih progresif dan terbuka terhadap inovasi dalam program pemberdayaan, sedangkan informan yang lebih tua biasanya memiliki pengalaman yang lebih panjang dan mendalam terkait pelaksanaan program serta tantangan yang dihadapi selama ini. Dengan demikian, perbedaan usia di antara para informan memberikan perspektif yang lebih luas dalam

menganalisis efektivitas dan hambatan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Dumai.

Adapun jumlah informan berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada Tabel V.3 berikut ini:

Tabel V. 3
Jumlah Informan Berdasarkan Tingkat Umur

No	Umur	Informan	Persentase
1.	19-30 Tahun	1	12,5
2.	31-40 Tahun	3	37,5
3.	41-50 Tahun	2	25
4.	51-60 Tahun	2	25
Jumlah		8	100

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2025

4. Status Informan

Pembedaan status informan antara pegawai dan penyandang disabilitas sangat penting untuk melihat perbedaan persepsi, pengalaman, serta kebutuhan antara pelaksana kebijakan dan penerima manfaat. Hal ini juga membantu peneliti dalam mengidentifikasi hambatan dan peluang dalam pelaksanaan program pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Dumai.

Status informan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua kelompok utama, yaitu pegawai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai serta penyandang disabilitas (difabel) di Kota Dumai. Pembagian ini penting untuk memperoleh sudut pandang yang komprehensif terkait proses pemberdayaan penyandang disabilitas.

Untuk melihat status informan dapat dilihat pada Tabel V.4 berikut ini:

Tabel V. 4
Status Informan

No	Informan	Status
1.	Drg. Hermiyati	Kepala Dinas DINSOSPM
2.	Novia Andriani, S. Kep., M. Si	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
3.	Nora Lisda, S.Sos	Pejabat Fungsional
4.	Eka Rizkia, S. IP	Pejabat Fungsional
5.	Muhammad Syukri Ramadhan	Difabel Tuna Netra
6.	Weris Meli	Difabel Tuna Rungu
7.	Yudi Ramadhan	Difabel Mental
8.	Syahrial	Difabel Tuna Netra

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2025

B. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai

Pemberdayaan merupakan upaya terencana dan kolektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi kelompok lemah dan kurang beruntung yang mengalami keterbatasan fisik dan intelektual, salah satunya adalah penyandang disabilitas. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari program yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan hidup individu dan membantu mereka menjadi lebih mandiri dan sejahtera.

Pemberdayaan juga merupakan upaya untuk mewujudkan kemandirian dengan potensi yang dimiliki. Pemberdayaan melibatkan dua kelompok yang diberdayakan dan pihak-pihak yang berperan sebagai pihak yang memberdayakan. Proses pemberdayaan juga bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia di perdesaan dan menciptakan peluang usaha yang sesuai dengan penyandang disabilitas dan juga upaya untuk membantu para

penyandang disabilitas merencanakan, mengambil keputusan, dan mengelola sumber daya lokal.

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis mengenai pemberdayaan penyandang disabilitas pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dengan menggunakan teori Mardikanto dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, maka penelitian ini berfungsi sebagai acuan untuk melihat bagaimana pemberdayaan penyandang disabilitas pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai.

1. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dalam aspek Bina Manusia

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu drg. Hermiyati selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai terkait Hak Hidup, Hak Pendidikan Dan Juga Hak Kesehatan Para Penyandang Disabilitas penulis mengajukan pertanyaan kepada beliau sebagai berikut :



“Bagaimana Dinas Sosial menjamin hak hidup, pendidikan, dan kesehatan bagi penyandang disabilitas di Kota Dumai?” Kepala Dinas Menjawab : “Kami pihak Dinas Sosial memastikan penyandang disabilitas hidup layak dan mendapat akses pendidikan serta

kesehatan dengan bertindak sebagai jembatan dan fasilitator. Kami tidak langsung menyediakan layanan, tapi membantu mereka mengakses layanan yang ada melalui pendampingan, sosialisasi hak, pengurusan administrasi, dan pemberian bantuan sosial seperti sembako atau uang tunai.”(Jumat,18 juli 2025 ; 11.19 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawawancara dengan Ibu Novia Andriani,

S.Kep.,M.Si selaku Kepala Bidang Rehabilitas Sosial sebagai berikut :

“Bagaimana Dinas Sosial menjamin hak hidup, pendidikan, dan kesehatan bagi penyandang disabilitas di Kota Dumai?” Ibu Novi menjawab: “Kalau soal pendidikan sama kesehatan sih, itu lebih ke dinas terkait ya, misalnya Dinas Pendidikan untuk urusan sekolah, dan Dinas Kesehatan untuk layanan kesehatan. Di Dinas Sosial, kita fokus ke bantuan sosial semacam bantuan uang tunai atau alat bantu buat kebutuhan dasar hidup penyandang disabilitas, supaya mereka tetap bisa survive walau dalam kondisi terbatas. Misalnya ada yang butuh kursi roda, alat bantu dengar, atau memang perlu dana buat kebutuhan harian, itu kita upayakan lewat program bantuan sosial.” (Jumat,18 Juli 2025 ; 11.51 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Nora Lisda, S.Sos

selaku Pejabat Fungsional Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota

Dumai sebagai berikut :

“Bagaimana Dinas Sosial menjamin hak hidup, pendidikan, dan kesehatan bagi penyandang disabilitas di Kota Dumai?” Ibu Nora Menjawab “Untuk hak hidup, pendidikan, dan kesehatan bagi penyandang disabilitas di Kota Dumai, kami di Dinas Sosial udah sebisa mungkin memperhatikan dan menjamin hak-hak dasar itu. Misalnya, untuk kesehatan, kami bantu fasilitasi akses ke layanan kesehatan, mulai dari pemberian BPJS sampai pendampingan kalau butuh pengobatan. Soal pendidikan, kami usahakan agar semua anak disabilitas dapet kesempatan sekolah, termasuk bantu urus dokumen atau rekomendasi ke sekolah inklusi. Kalau soal hak hidup, kami juga ikut monitoring, jangan sampai ada teman-teman disabilitas yang terlantar, kekurangan pangan, atau nggak punya tempat tinggal.” (Jumat,18 Juli 2025; 12.15 wib).

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Eka Rizkia,S.IP selaku Pejabat Fungsional Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai sebagai berikut :

“Bagaimana Dinas Sosial menjamin hak hidup, pendidikan, dan kesehatan bagi penyandang disabilitas di Kota Dumai?” Ibu Eka menjawab :“Untuk menjamin hak hidup, pendidikan, dan kesehatan bagi teman-teman disabilitas di Kota Dumai, kami dari Dinas Sosial berupaya mengusulkan bantuan-bantuan sosial, seperti bantuan alat bantu (kursi roda, tongkat, kacamata khusus), serta bekerjasama dengan dinas terkait untuk akses pendidikan dan layanan kesehatan. Kami, misalnya, membantu proses pembuatan Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau BPJS supaya mereka dapat berobat gratis atau ringan biayanya.”(Jumat, 18 Juli 2025 ; 12.35 wib)

Berdasarkan hasil wawancara yang di informasikan oleh Para Pegawai Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai menjamin hak hidup, pendidikan, dan kesehatan penyandang disabilitas dengan memberikan fasilitasi akses ke layanan dinas terkait seperti Pendidikan dan Kesehatan, serta bantuan sosial berupa uang tunai, sembako, dan alat bantu seperti kursi roda dan alat dengar.

Mereka juga melakukan pendampingan administrasi, sosialisasi hak, dan monitoring agar penyandang disabilitas tidak terlantar atau kekurangan kebutuhan dasar. Fokus utama Dinas Sosial adalah menjadi penghubung dan mediator untuk membantu penyandang disabilitas mendapatkan layanan dan bantuan agar bisa hidup layak dan mandiri. Program aktif berupa penyaluran bantuan alat bantu dan pendampingan mendukung keberlanjutan hidup dan aksesibilitas mereka.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Muhammad Syukri Ramadhan selaku Penyandang Disabilitas Tuna Netra yaitu terkait Hak Hidup, Hak Pendidikan Dan Juga Hak Kesehatan Para Penyandang Disabilitas penulis mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

“Apakah Anda merasa kebutuhan dasar seperti hak hidup, pendidikan, dan kesehatan sudah terpenuhi dengan baik di Kota Dumai ?” Beliau Menjawab : “Kalau soal kebutuhan dasar seperti hak hidup, pendidikan, dan kesehatan, menurut saya kalau pendidikan dan hak hidup sudah cukup terpenuhi, tapi untuk akses kesehatan saya pribadi belum pernah mendapat perhatian khusus dari Dinas Sosial di sini. Itu agak disayangkan sih, karena kan kesehatan itu penting banget terutama buat kami yang punya keterbatasan fisik. Tapi alhamdulillah saya masih bisa sekolah dan aktif di organisasi.” (Sabtu, 26 Juli 2025 ; 13.23 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Weris Meli selaku Penyandang Disabilitas Tuna Rungu sebagai berikut :



“Apakah Anda merasa kebutuhan dasar seperti hak hidup, pendidikan, dan kesehatan sudah terpenuhi dengan baik di Kota Dumai? Ibu Weris Meli menjawab : “Kalau saya ditanya soal kebutuhan dasar kayak hak hidup, pendidikan, sama kesehatan di Kota Dumai ini, untuk hak hidup sih Alhamdulillah sudah merasa cukup terpenuhi. Saya merasa ada jaminan hidup yang layak walaupun kondisi saya sebagai tuna rungu dan sudah lansia. Terutama soal kesehatan, saya banyak terbantu dengan adanya posyandu lansia di lingkungan saya. Di sana saya bisa cek kesehatan

rutin, dapat informasi kesehatan, bahkan kadang dapat pelayanan sederhana yang membantu saya menjaga kondisi tubuh. Memang pelayanan posyandu ini sangat membantu saya untuk tetap sehat dan merasa diperhatikan.” (Minggu, 6 Juli 2025 ; 10.19 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Yudi Ramadhan selaku penyandang disabilitas mental yang dimana dalam hal wawancara ini yang diterjemahkan oleh ibunya adalah sebagai berikut :

“Apakah Anda merasa kebutuhan dasar seperti hak hidup, pendidikan, dan kesehatan sudah terpenuhi dengan baik di Kota Dumai?” Ibu Difabel menjawab : “Kalau untuk hak hidup sama pendidikan sih, Alhamdulillah sudah cukup terpenuhi ya. Anak saya dulu sempat sekolah dan bisa nyampe SMP, tapi pernah berhenti sekolah karena dia mengalami trauma, jadi agak susah buat dia kalau disuruh sekolah lagi. Soalnya dia sempat ada masalah mental juga yang bikin dia nggak nyaman sekolah. Untuk kesehatan, belum sepenuhnya iya. Akses ke dokter atau terapi khusus masih susah, kadang harus berjuang sendiri cari dukungan. Kadang pelayanan di puskesmas juga terbatas, jadi nggak bisa maksimal buat kebutuhan kesehatan mental anak saya.” (Minggu, 20 Juli 2025 ; 15.56 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Syahrial selaku penyandang disabilitas tuna netra sebagai berikut :

“Apakah Anda merasa kebutuhan dasar seperti hak hidup, pendidikan, dan kesehatan sudah terpenuhi dengan baik di Kota Dumai? Bapak Syahrial menjawab: “Kalau soal hak hidup dan pendidikan, alhamdulillah saya rasa selama ini sudah ada dirasakan. Saya bisa tetap hidup dan belajar walaupun dengan keterbatasan saya ini. Tapi, kalau untuk urusan kesehatan, jujur saya belum pernah merasakan ada layanan khusus atau perhatian lebih dari pemerintah atau fasilitas kesehatan di sini. Jadi, untuk kesehatan rasanya masih kurang terpenuhi buat saya sebagai tuna netra di Kota Dumai.” (Minggu, 6 Juli 2025 ; 09.28 wib)

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyandang disabilitas di Kota Dumai, menurut mereka dalam segi kebutuhan dasar seperti hak hidup dan pendidikan umumnya sudah terpenuhi dan dirasakan dengan baik. Namun, pelayanan kesehatan menjadi tantangan utama, terutama bagi penyandang tuna

netra dan disabilitas mental yang merasa kurang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dan dinas terkait. Penyandang tuna rungu mendapat manfaat dari posyandu lansia, tetapi layanan kesehatan khusus masih terbatas. Kesimpulannya, meskipun hak hidup dan pendidikan telah diperhatikan, perlu peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih ramah dan responsif bagi penyandang disabilitas.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu drg. Hermiyati selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai terkait Program Pelatihan dan Pengembangan, penulis mengajukan pertanyaan kepada beliau sebagai berikut :

“Apa program pelatihan atau pengembangan diri yang diberikan untuk meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas?” Kepala Dinas menjawab : “Kami punya beberapa program pelatihan yang rutin kami adakan untuk para difabel, seperti pelatihan menjahit, salon, dan otomotif. Selain di Dumai, kami juga kirim mereka ke pelatihan di tingkat provinsi untuk pengembangan keterampilan lebih lanjut. Program ini bertujuan supaya mereka punya keahlian yang bisa digunakan untuk mandiri secara ekonomi dan tidak bergantung terus menerus pada bantuan. Tapi memang ada kendala seperti belum semua pelatihan dapat diikuti sampai mereka benar-benar bisa mandiri, misalnya alat yang diperlukan belum selalu diberikan secara lengkap” (Jumat, 18 Juli 2025 ; 11.19 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Novia Andriani, S.Kep.,M.Si selaku Kepala Bidang Rehabilitas Sosial sebagai berikut :

“Apa program pelatihan atau pengembangan diri yang diberikan untuk meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas?” Ibu Novi Andriani menjawab : “Ada kok program pelatihan, walau memang nggak banyak karena biasanya kerjasama sama UPT Daksa Provinsi Riau. Jadi, anak-anak disabilitas yang udah lulus SLB atau usianya 18 tahun ke atas, bisa kita fasilitasi untuk dikirim ke panti daksa di provinsi. Di sana mereka belajar keterampilan kerja, semacam pelatihan jahit-menjahit, komputer, atau usaha kuliner, sesuai minat dan kemampuannya.” (Jumat, 18 Juli 2025 ; 11.51 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Nora Lisda,S. Sos selaku Pejabat Fungsional pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai sebagai berikut :

“Apa program pelatihan atau pengembangan diri yang diberikan untuk meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas?” Ibu Nora Menjawab: “Untuk program pelatihan kemandirian, sudah kami jalankan pelatihan seperti menjahit, salon, bikin kerajinan tangan, komputer, dan beberapa pelatihan lainnya sesuai kebutuhan dan potensi masing-masing. Selain itu, kita juga kadang gandeng pihak swasta atau BLK (Balai Latihan Kerja) agar pelatihannya lebih bervariasi dan bermanfaat ke depannya. Tujuannya tentu supaya teman-teman disabilitas bisa lebih mandiri, nggak tergantung sama keluarga atau orang lain.” (Jumat, 18 Juli 2025 ; 12.15 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Eka Rizkia,S.IP selaku Pejabat Fungsional pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai sebagai berikut :

“Apa program pelatihan atau pengembangan diri yang diberikan untuk meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas?” Ibu Eka Menjawab: “Buat pelatihan, kami sudah pernah adakan beberapa pelatihan keterampilan dan pengembangan diri. Bentuk kegiatannya biasanya pelatihan menjahit, Salon, atau pelatihan komputer. Pesertanya dari komunitas atau organisasi penyandang disabilitas yang memang punya minat untuk belajar supaya lebih mandiri.” (Jumat,18 Juli 2025 ; 12.35 wib)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, dapat disimpulkan bahwa program pelatihan dan pengembangan diri untuk meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas terdiri dari pelatihan keterampilan praktis seperti menjahit, salon, otomotif, komputer, dan kerajinan tangan.

Selain pelatihan yang dilaksanakan di tingkat kota, ada juga fasilitasi pengiriman penyandang disabilitas ke pelatihan di tingkat provinsi, seperti

panti daksa, untuk pengembangan keterampilan lebih lanjut sesuai minat dan kemampuan mereka. Kerjasama dengan pihak swasta dan Balai Latihan Kerja (BLK) juga dilakukan untuk memperkaya variasi pelatihan. Tujuan utama program ini adalah agar penyandang disabilitas memiliki keahlian yang dapat digunakan untuk mandiri secara ekonomi dan tidak terus bergantung pada bantuan. Namun, ada kendala seperti tidak selalu tersedianya alat pelatihan yang lengkap sehingga kemandirian belum bisa dicapai sepenuhnya.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Muhammad Syukri Ramadhan selaku penyandang disabilitas tuna netra terkait Program Pelatihan dan Pengembangan sebagai berikut :

“Apakah Anda pernah mengikuti program pelatihan atau pengembangan diri yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai? Jika ya, bagaimana pengalaman Anda?” Beliau menjawab: *“Beberapa waktu lalu, saya ditawarkan ikut pelatihan atau pengembangan diri yang diadakan sama Dinas Sosial. Tapi waktu itu saya lagi semangatsemangatnya sekolah, dan pelatihannya harus jalan selama 6 bulan. Saya akhirnya pilih fokus sekolah dulu, mungkin nanti kalau ada kesempatan lain saya ikut deh. Soalnya buat saya pendidikan formal juga penting banget buat masa depan.”* (Sabtu, 26 Juli 2025 ; 13.23 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Weris Meli selaku penyandang disabilitas tuna rungu sebagai berikut :

“Apakah Anda pernah mengikuti program pelatihan atau pengembangan diri yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai? Jika ya, bagaimana pengalaman Anda?” Ibu Weris Meli menjawab: *“Kalau soal pendidikan dan pelatihan, kebetulan saya tidak pernah ikut.”* (Minggu, 6 Juli 2025 ; 10.19 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Yudi Ramadhan selaku penyandang disabilitas mental yang dimana dalam hal wawancara ini yang diterjemahkan oleh ibunya adalah sebagai berikut :

“Apakah Anda pernah mengikuti program pelatihan atau pengembangan diri yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai? Jika ya, bagaimana pengalaman Anda?” Beliau menjawab: “Kalau untuk sampai saat ini kami belum pernah ikut pelatihan apapun yang diadakan oleh Dinas Sosial. Jarang sih informasi sampai ke kami juga.” (Minggu, 20 Juli 2025 ; 15.56 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Syahrial selaku penyandang disabilitas tuna netra sebagai berikut :

“Apakah Anda pernah mengikuti program pelatihan atau pengembangan diri yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai? Jika ya, bagaimana pengalaman Anda?” Bapak Syahrial menjawab : “Saya nih, jujur aja, sampai sekarang saya belum pernah ikut program pelatihan atau pengembangan diri yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial. Kalau yang saya tau dan pernah saya terima selama ini cuma bantuan uang tunai saja, itu pun tidak terus-terusan, kadang ada, kadang tidak. Memang bantuan uang itu sedikit meringankan beban, tapi saya rasa kalau ada pelatihan atau program yang bisa ningkatkan kemampuan atau kemandirian kami para penyandang disabilitas seperti saya, itu jauh lebih bermanfaat. Sayang, sampai sekarang saya belum pernah merasakannya, jadi belum tau rasanya gimana ikut pelatihan atau program pengembangan diri dari pemerintah. Harapannya sih, kedepan ada perhatian lebih dalam bentuk pelatihan yang memang tepat buat kami supaya bisa lebih mandiri dan percaya diri menjalani hidup.” (Minggu, 6 Juli 2025 ; 09.28 wib)

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyandang disabilitas di Kota Dumai, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dari mereka belum pernah mengikuti program pelatihan atau pengembangan diri yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai. Faktor utama

yang menjadi kendala adalah kurangnya informasi yang sampai kepada mereka serta prioritas lain seperti fokus pada pendidikan formal.

Meskipun terdapat bantuan uang tunai, para penyandang disabilitas berharap adanya program pelatihan yang lebih intensif dan tepat sasaran untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan kepercayaan diri mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Secara umum, diperlukan perhatian lebih dari pemerintah dalam bentuk program pelatihan yang efektif dan inklusif bagi penyandang disabilitas di Kota Dumai.

Selanjutnya penulis mewawancarai Ibu drg. Hermiyati selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai terkait Akses Informasi dan Komunikasi termasuk pelatihan penggunaan teknologi alat bantu, maka penulis mengajukan pertanyaan kepada beliau sebagai berikut :

“Bagaimana upaya Dinas Sosial dalam memberikan akses informasi dan komunikasi kepada penyandang disabilitas, termasuk pelatihan penggunaan teknologi bantu?” Kepala Dinas menjawab: *“Dinas Sosial terus berusaha membuka akses informasi dan komunikasi untuk para difabel lewat sosialisasi dan pelatihan. Misalnya, kami memberikan alat bantu seperti kursi roda, alat bantu dengar, dan melakukan pendampingan supaya mereka bisa menggunakan teknologi bantu yang ada. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan instansi terkait agar mereka tak terputus informasi dan bisa mengakses layanan publik dengan lebih mudah.”* (Jumat, 18 Juli 2025; 11.19 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Novia Andriani, S.Kep.,M.Si selaku Kepala Bidang Rehabilitas Sosial sebagai berikut :

“Bagaimana upaya Dinas Sosial dalam memberikan akses informasi dan komunikasi kepada penyandang disabilitas, termasuk pelatihan penggunaan teknologi bantu?” Ibu Novia Andriani menjawab: *“Kalau akses informasi jujur saja masih terbatas, tapi kadang kita adakan sosialisasi dan pelatihan penggunaan alat bantu, kayak aplikasi pembaca layar buat tuna netra atau alat komunikasi buat tuna rungu. Tapi memang*

pelaksanaannya belum maksimal, karena SDM dan dana pun terbatas.” (Jumat, 18 Juli 2025 ; 11.51 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Nora Lisda, S. Sos selaku Pejabat Fungsional pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai sebagai berikut :

“Bagaimana upaya Dinas Sosial dalam memberikan akses informasi dan komunikasi kepada penyandang disabilitas, termasuk pelatihan penggunaan teknologi bantu?” Ibu Nora Lisda menjawab : “Masalah akses informasi dan komunikasi, kami juga sadar pentingnya teknologi sekarang. Makanya, kami pernah mengadakan pelatihan penggunaan HP, komputer, dan alat bantu khusus. Kami kerjasama juga sama komunitas atau yayasan yang punya alat bantu kayak screen reader biar info bisa diakses semua kalangan. Kalau ada informasi penting dari pemerintah, sebisa mungkin kita sampaikan lewat berbagai media biar nggak ada yang ketinggalan info.” (Jumat, 18 Juli 2025 ; 12.15 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Eka Rizkia, S.IP selaku Pejabat Fungsional pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai sebagai berikut :

“Bagaimana upaya Dinas Sosial dalam memberikan akses informasi dan komunikasi kepada penyandang disabilitas, termasuk pelatihan penggunaan teknologi bantu?” Ibu Eka menjawab: “Nah, untuk akses informasi dan penggunaan alat bantu, caranya biasanya saat pembagian alat bantu, kita sekalian kasih penjelasan cara pakai dan perawatan alatnya. Kadang juga ada sosialisasi khusus supaya mereka paham dan lebih nyaman pakai alat bantu tersebut.” (Jumat, 18 Juli 2025 ; 12.35 wib)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pegawai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, dapat disimpulkan bahwa upaya dinas dalam memberikan akses informasi dan komunikasi kepada penyandang disabilitas dilakukan melalui berbagai cara seperti sosialisasi, pelatihan penggunaan alat bantu teknologi (misalnya kursi roda, alat bantu dengar,

aplikasi pembaca layar untuk tuna netra), serta pendampingan langsung agar penyandang disabilitas dapat menggunakan teknologi tersebut secara optimal.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai juga menjalin kerja sama dengan instansi atau komunitas terkait untuk memperluas jangkauan informasi dan memastikan penyandang disabilitas bisa mengakses layanan publik. Meski demikian, pelaksanaan program ini masih menghadapi kendala keterbatasan sumber daya manusia dan dana sehingga akses informasi dan pelatihan belum sepenuhnya maksimal. Selain itu, dinas berupaya menyampaikan informasi penting pemerintah melalui berbagai media agar tidak ada yang ketinggalan informasi. Pada saat distribusi alat bantu, diberikan juga pendampingan penggunaan dan perawatan alat untuk meningkatkan kenyamanan penggunaannya.

Secara singkat, Dinas Sosial Kota Dumai sudah aktif melakukan upaya akses informasi dan komunikasi bagi penyandang disabilitas lewat sosialisasi, pelatihan, pemberian alat bantu, dan kerjasama lintas instansi, namun masih terdapat tantangan dalam optimalisasi pelaksanaannya karena keterbatasan anggaran dan SDM.

Selanjutnya penulis mewawancarai Muhammad Syukri Ramdhan selaku penyandang disabilitas tuna netra di Kota Dumai terkait Akses Informasi dan Komunikasi termasuk pelatihan penggunaan teknologi alat bantu, maka penulis mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

“Apakah Anda mendapatkan akses informasi dan komunikasi yang memadai, termasuk pelatihan penggunaan teknologi bantu dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai?” Beliau menjawab : “Kalau soal akses informasi dan komunikasi, saya belum

pernah dapat pelatihan khusus dari Dinas Sosial, terutama yang berhubungan sama teknologi bantu. Padahal itu sangat berguna buat kami penyandang tuna netra supaya bisa mandiri dan lebih mudah dalam aktivitas sehari-hari.” (Sabtu, 26 Juli 2025 ; 13.23 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Weris Meli selaku penyandang disabilitas tuna rungu sebagai berikut :

“Apakah Anda mendapatkan akses informasi dan komunikasi yang memadai, termasuk pelatihan penggunaan teknologi bantu dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai?” Ibu Weris Meli menjawab : “Saya merasa terbantu dari Dinas Sosial itu waktu mereka memberitahu saya dan mengajarkan gimana cara menggunakan alat bantu dengar yang saya dapatkan dari mereka. Itu sangat membantu saya dalam aktivitas sehari-hari supaya bisa lebih mudah berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain.” (Minggu, 6 Juli 2025 ; 10.19 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Yudi Ramadhan selaku penyandang disabilitas mental yang dimana dalam hal wawancara ini yang diterjemahkan oleh ibunya adalah sebagai berikut :

“Apakah Anda mendapatkan akses informasi dan komunikasi yang memadai, termasuk pelatihan penggunaan teknologi bantu dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai?” Beliau menjawab: “Jujur, sama sekali belum pernah dapat pelatihan atau informasi soal teknologi bantu dari Dinas Sosial. Kadang informasi untuk penyandang disabilitas itu susah didapat, bahkan kadang kita juga nggak tahu harus tanya ke mana.” (Minggu, 20 Juli 2025 ; 15.56 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Syahrial selaku penyandang disabilitas tuna netra sebagai berikut :

“Apakah Anda mendapatkan akses informasi dan komunikasi yang memadai, termasuk pelatihan penggunaan teknologi bantu dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai?” Bapak Syahrial menjawab : “Alhamdulillah, saya masih bisa melihat walaupun cuma samar-samar. Jadi, untuk akses informasi dan komunikasi, saya masih berusaha pakai apa yang saya bisa tangkap. Tapi kalau soal pelatihan penggunaan teknologi bantu dari Dinas Sosial, sampai sekarang saya belum pernah dapat pelatihan khusus seperti itu.” (Minggu, 6 Juli 2025 ; 09.28 wib)

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyandang disabilitas di Kota Dumai, dapat disimpulkan bahwa akses informasi dan komunikasi dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat masih belum merata dan memadai bagi semua jenis disabilitas. Beberapa penyandang disabilitas, seperti tuna rungu, merasa terbantu dengan pelatihan dan bantuan alat dari Dinas Sosial, sedangkan sebagian besar lainnya, terutama tuna netra dan disabilitas mental, belum mendapatkan pelatihan khusus maupun informasi yang memadai terkait teknologi alat bantu. Hal ini menunjukkan kebutuhan peningkatan layanan dan pelatihan teknologi bantu agar semua penyandang disabilitas di Dumai dapat lebih mandiri dan mudah beraktivitas sehari-hari.

Selanjutnya penulis mewawancarai Ibu drg. Hermiyati selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai terkait Stigma terhadap para penyandang disabilitas, maka penulis mengajukan pertanyaan kepada beliau sebagai berikut :

“Apakah ada program khusus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengurangi stigma terhadap penyandang disabilitas? Jika ada, bagaimana pelaksanaannya?” Kepala Dinas menjawab : *“Ya, kami rutin mengadakan sosialisasi ke masyarakat supaya mereka lebih paham dan menerima para penyandang disabilitas sebagai bagian dari kehidupan sosial. Sosialisasi tersebut bertujuan menghapus stigma negatif dan membangun empati, jadi orang tidak memandang sebelah mata atau menyingkirkan mereka. Pelaksanaannya biasanya dalam bentuk kegiatan komunitas, seminar, dan kerja sama dengan organisasi lokal.”* (Jumat, 18 Juli 2025 ; 11.19 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawawancara dengan Ibu Novia Andriani, S.Kep.,M.Si selaku Kepala Bidang Rehabilitas Sosial sebagai berikut :

“Apakah ada program khusus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengurangi stigma terhadap penyandang disabilitas? Jika ada, bagaimana pelaksanaannya?” Ibu Novia Andriani menjawab: “Kita kadang adakan sosialisasi ke masyarakat, temanya seputar pentingnya menghargai penyandang disabilitas, biar nggak dipandang sebelah mata. Kadang juga pas momen Hari Disabilitas, kita undang masyarakat biar lebih paham, tapi memang tantangannya masih banyak karena stigma itu sudah melekat sejak lama.” (Jumat, 18 Juli 2025 ; 11.51 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Nora Lisda, S. Sos selaku Pejabat Fungsional pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai sebagai berikut :

“Apakah ada program khusus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengurangi stigma terhadap penyandang disabilitas? Jika ada, bagaimana pelaksanaannya?” Ibu Nora Lisda menjawab : “Menegenai peningkatan kesadaran masyarakat, kami pernah adakan sosialisasi ke sekolah-sekolah, kantor kelurahan, sampai komunitas masyarakat. Harapannya, biar nggak ada lagi stigma negatif dan masyarakat makin open sama teman-teman disabilitas. Kadang juga kita libatkan teman teman disabilitas langsung biar masyarakat lihat mereka punya kemampuan dan semangat yang luar biasa.” (Jumat, 18 Juli 2025 ; 12.15 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Eka Rizkia, S.IP selaku Pejabat Fungsional pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai sebagai berikut :

“Apakah ada program khusus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengurangi stigma terhadap penyandang disabilitas? Jika ada, bagaimana pelaksanaannya?” Ibu Eka menjawab : “Untuk program khusus sosialisasi, kita sering juga bikin kegiatan kampanye, seperti di sekolah atau di masyarakat. Tujuannya supaya masyarakat lebih paham dan sadar pentingnya menerima serta mendukung teman-teman disabilitas, jadi stigma dan diskriminasi bisa berkurang.” (Jumat, 18 Juli 2025 ; 12.35 wib)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pegawai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, dapat disimpulkan bahwa terdapat

program-program khusus yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengurangi stigma terhadap penyandang disabilitas. Pelaksanaan program tersebut meliputi sosialisasi secara rutin ke berbagai lapisan masyarakat, seperti komunitas, sekolah, kantor kelurahan, dan melalui seminar atau kampanye. Kegiatan ini bertujuan menghapus stigma negatif, membangun empati, dan mendorong masyarakat untuk lebih menerima serta menghargai penyandang disabilitas sebagai bagian dari kehidupan sosial. Meskipun program sudah berjalan, tantangan terkait stigma yang sudah melekat lama masih perlu mendapat perhatian lebih.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Muhammad Syukri Ramadhan selaku penyandang disabilitas tuna netra terkait stigma terhadap penyandang disabilitas sebagai berikut :

“Apakah Anda pernah mengikuti atau mengetahui adanya program yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengurangi stigma terhadap penyandang disabilitas? Bagaimana menurut Anda pelaksanaannya?” Beliau menjawab :“Untuk program yang meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengurangi stigma terhadap penyandang disabilitas, saya belum pernah dengar atau ikut secara langsung. Sejujurnya saya berharap ada program kayak gitu, karena kadang masih ada orang yang kurang ngerti atau bahkan sinis sama kami.” (Sabtu, 26 Juli 2025 ; 13.23 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Weris Meli selaku penyandang disabilitas tuna rungu sebagai berikut :

“Apakah Anda pernah mengikuti atau mengetahui adanya program yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengurangi stigma terhadap penyandang disabilitas? Bagaimana menurut Anda pelaksanaannya?” Ibu Weris Meli menjawab: “Kalau soal ini saya tak paham.” (Minggu, 6 Juli 2025 ; 10.19 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Yudi Ramadhan selaku penyandang disabilitas mental yang dimana dalam hal wawancara ini yang diterjemahkan oleh ibunya adalah sebagai berikut :

“Apakah Anda pernah mengikuti atau mengetahui adanya program yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengurangi stigma terhadap penyandang disabilitas? Bagaimana menurut Anda pelaksanaannya?” Beliau menjawab: “Kalau program yang seperti itu, saya juga tidak pernah tahu atau ikut. Jadi saya nggak bisa bilang bagaimana pelaksanaannya karena kami tidak mendapat info apapun. Apa lagi anak saya itu kan tipe yang agak tertutup, jadi kadang stigma dari masyarakat masih terasa. Tapi saya pribadi belum lihat program nyata yang turun ke masyarakat untuk mengurangi stigma itu.” (Minggu, 20 Juli 2025 ; 15.56 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Syahrial selaku penyandang disabilitas tuna netra sebagai berikut :

“Apakah Anda pernah mengikuti atau mengetahui adanya program yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengurangi stigma terhadap penyandang disabilitas? Bagaimana menurut Anda pelaksanaannya?” Bapak Syahrial menjawab: “Sejujurnya, selama ini saya tak pernah tahu langsung ada program yang khusus nak tingkatan kesadaran masyarakat dan kurangkan stigma pada kami. Tapi alhamdulillah, kat kota Dumai ni dah mulai terang-terang sikit la.” (Minggu, 6 Juli 2025 ; 09.28 wib)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa penyandang disabilitas di Kota Dumai, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dari mereka belum pernah mengikuti atau mengetahui secara langsung adanya program yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengurangi stigma terhadap penyandang disabilitas. Mereka berharap adanya program semacam itu karena masih banyak masyarakat yang kurang memahami atau bersikap sinis terhadap penyandang disabilitas. Namun, ada indikasi perlahan kesadaran

masyarakat mulai tumbuh, meskipun program nyata dan informasi terkait masih sangat minim dan belum menyentuh secara luas.

Pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Dumai dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat melalui berbagai upaya yang mencakup pemenuhan hak hidup, pendidikan, dan kesehatan, serta peningkatan kemandirian dan akses informasi komunikasi. Dinas sosial berperan sebagai fasilitator yang membantu penyandang disabilitas mengakses layanan terkait seperti pendidikan dan kesehatan melalui pendampingan administrasi, sosialisasi hak, serta pemberian bantuan sosial berupa uang tunai, sembako, dan alat bantu seperti kursi roda dan alat dengar. Program pelatihan keterampilan praktis seperti menjahit, salon, otomotif, komputer, dan kerajinan tangan rutin diadakan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi, dengan kerjasama pihak swasta dan Balai Latihan Kerja (BLK). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Dumai berfokus pada memberikan akses layanan, pelatihan keterampilan, dan dukungan sosial agar penyandang disabilitas dapat mandiri dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Secara teoritis, pemberdayaan penyandang disabilitas sering dijelaskan oleh para ahli seperti Robert Chambers yang menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai proses meningkatkan kemampuan individu atau kelompok untuk mengendalikan kehidupannya dan mencapai potensi penuh (Chambers, 1997).

Namun, masih terdapat keterbatasan seperti kurangnya alat pelatihan lengkap dan informasi yang sampai kepada penyandang disabilitas, sehingga tidak semua dapat mengikuti program pengembangan diri. Akses informasi dan komunikasi juga diberikan melalui pelatihan penggunaan teknologi bantu, namun pelaksanaannya belum maksimal karena kendala dana dan sumber daya manusia. Selain itu, ada program sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengurangi stigma negatif terhadap penyandang disabilitas, meski tantangan stigma lama masih ada dan informasi program ini belum merata diterima oleh penyandang disabilitas. Dari sisi penyandang disabilitas sendiri, hak hidup dan pendidikan umumnya sudah dirasakan cukup terpenuhi, tetapi pelayanan kesehatan dan pelatihan pengembangan diri masih menjadi kendala yang perlu perhatian lebih.

Dengan demikian, pelaksanaan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Dumai mencerminkan prinsip-prinsip pemberdayaan menurut teori dan kebijakan internasional, namun masih memerlukan peningkatan khususnya dalam menyentuh aspek kesehatan, pelatihan yang intensif, serta pengentasan stigma untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik dan kemandirian yang lebih optimal.

2. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dalam aspek Bina Usaha

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu drg.Hermiyati selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai terkait Hak Pekerjaan, Hak Kewirausahaan, atau Koperasi, maka penulis mengajukan pertanyaan kepada beliau sebagai berikut :

“Apa bentuk dukungan Dinas Sosial terhadap hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi bagi penyandang disabilitas?” Kepala Dinas menjawab: “Kalau masalah pekerjaan di Dumai untuk para penyandang disabilitas, memang belum sepenuhnya berjalan maksimal. Padahal, Peraturan Daerah kota Dumai sudah mengatur agar instansi pemerintah dan swasta memberi kesempatan kerja kepada para difabel. Namun dalam praktiknya, pelaksanaannya masih harus diperbaiki, termasuk membangun lebih banyak peluang dan kesadaran bagi perusahaan serta pemerintah untuk mengakomodir mereka.” (Jumat, 18 Juli 2025 ; 11.19 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Novia Andriani,

S.Kep.,M.Si selaku Kepala Bidang Rehabilitas Sosial sebagai berikut :

“Apa bentuk dukungan Dinas Sosial terhadap hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi bagi penyandang disabilitas?” Ibu Novia Andriani menjawab : “Bentuk dukungan dari Dinas Sosial itu lewat bantuan atensi, asistensi, sama rehabilitasi sosial. Ya, bentuknya bisa macam-macam: asesmen dulu mereka butuh apa, misalnya mau mulai usaha kue, kita bantu dari modal bahan-bahan kayak gula, tepung yang mereka butuhkan buat mulai usaha kecil. Nanti mereka didampingi lewat program rehabilitasi juga.” (Jumat, 18 Juli 2025 ; 11.51 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Nora Lisda,S. Sos

selaku Pejabat Fungsional pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Kota Dumai sebagai berikut :

“Apa bentuk dukungan Dinas Sosial terhadap hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi bagi penyandang disabilitas?” Ibu Nora Lisda menjawab: “Dukungan yang kami berikan untuk bidang pekerjaan dan usaha, biasanya berupa bantuan pelatihan wirausaha, sampai permodalan kecil-kecilan. Contohnya, pelatihan menjahit atau salon.” (Jumat, 18 Juli 2025 ; 12.15 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Eka Rizkia,S.IP

selaku Pejabat Fungsional pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Kota Dumai sebagai berikut :

“Apa bentuk dukungan Dinas Sosial terhadap hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi bagi penyandang disabilitas?” Ibu Eka menjawab: “Bentuk dukungan kami untuk hak bekerja dan

berwirausaha, misalnya memberikan modal usaha kecil, mengusulkan program usaha ekonomi produktif, serta pendampingan saat mereka mulai usaha sendiri. Kadang juga dibantu pemasaran hasil produknya lewat pameran UMKM atau kerjasama dengan koperasi yang ramah disabilitas.” (Jumat, 18 Juli 2025 ; 12.35 wib)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pegawai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, dukungan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terkait hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi dijalankan dalam berbagai bentuk. Secara umum, keberlangsungan pemberdayaan ini masih belum maksimal karena penerapan kebijakan kerja bagi difabel di instansi pemerintah dan swasta membutuhkan perbaikan dan kesadaran lebih dari semua pihak. Dinas Sosial memberikan dukungan melalui bantuan modal usaha kecil, pelatihan keterampilan seperti menjahit atau salon, serta pendampingan dalam usaha wirausaha, termasuk penyediaan bahan usaha seperti gula dan tepung untuk usaha kecil.

Selain itu, ada program rehabilitasi sosial dan asistensi yang membantu penyandang disabilitas mulai berwirausaha. Dinas Sosial juga memfasilitasi pemasaran produk usaha para difabel, misalnya lewat pameran UMKM dan kerjasama dengan koperasi yang ramah disabilitas. Dukungan ini bertujuan mendorong kemandirian ekonomi penyandang disabilitas dan membangun peluang kerja serta kewirausahaan yang inklusif di Kota Dumai. Namun, tantangan tetap ada terutama dalam pemanfaatan kesempatan kerja yang ideal dan kebijakan yang menyeluruh

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Muhammad Syukri Ramadhan selaku penyandang disabilitas tuna netra terkait Hak Pekerjaan, Kewirausahaan, atau Koperasi sebagai berikut :

“Apakah Anda pernah mendapatkan dukungan dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai terkait hak pekerjaan, kewirausahaan, atau koperasi ?” Beliau menjawab : “saya tu belum pernah dapat dukungan langsung dari Dinas Sosial yang berkaitan sama hak pekerjaan, kewirausahaan, atau koperasi. Yang saya dapatkan cuman bantuan uang tunai yang bias membantu untuk membeli perlengkapan sekolah saya. Mungkin karena saya masih sekolah, jadi belum ke arah situ. Waktu itu saya masih fokus sama belajar di bangku SMA, jadi kayaknya belum sempat dapetin program-program kayak gitu.” (Sabtu, 26 Juli 2025 ; 13.23 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Weris Meli selaku penyandang disabilitas tuna rungu sebagai berikut :

“Apakah Anda pernah mendapatkan dukungan dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai terkait hak pekerjaan, kewirausahaan, atau koperasi ?” Ibu Weris Meli menjawab: “ Saya jujur belum pernah sama sekali dapet dukungan langsung dari Dinas Sosial soal hak pekerjaan, atau bantuan buat usaha.” (Minggu, 6 Juli 2025 ; 10.19 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Yudi Ramadhan selaku penyandang disabilitas mental yang dimana dalam hal wawancara ini yang diterjemahkan oleh ibunya adalah sebagai berikut :

“Apakah Anda pernah mendapatkan dukungan dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai terkait hak pekerjaan, kewirausahaan, atau koperasi ?” Beliau menjawab: “Soal dukungan gitu, sampai sekarang belum pernah sama sekali. Walaupun anak saya punya keterbatasan, tapi kami belum pernah dapat tempat atau program dari Dinas Sosial untuk bantu dia kerja atau buka usaha. Kadang saya pikir mereka kurang paham atau memang belum siap support anak-anak dengan kondisi seperti dia.” (Minggu, 20 Juli 2025 ; 15.56 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Syarial selaku penyandang disabilitas tuna netra sebagai berikut :

“Apakah Anda pernah mendapatkan dukungan dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai terkait hak pekerjaan, kewirausahaan, atau koperasi ?” Bapak Syahrial menjawab: “Sepanjang saya ni, saya belum sekali pun mendapatkan dukungan langsung dari Dinas Sosial dalam hal pekerjaan, wirausaha, atau koperasi. Memang ada dengar cerita macam-macam program, tapi sampai ke saya, belum ada satu pun bantuan atau program yang menyentuh untuk saya.” (Minggu, 6 Juli 2025 ; 09.28 wib)

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyandang disabilitas di Kota Dumai, dapat disimpulkan bahwa dukungan langsung dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai terkait hak pekerjaan, kewirausahaan, atau koperasi masih sangat minim atau belum dirasakan oleh para penyandang disabilitas. Sebagian besar responden mengaku belum pernah mendapatkan program atau bantuan yang khusus memfasilitasi kesempatan kerja atau pengembangan usaha bagi mereka.

Bantuan yang diterima lebih banyak berupa dukungan umum seperti bantuan pendidikan, sementara program yang menysasar pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas masih kurang terlihat atau belum tersosialisasi dengan baik. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk peningkatan perhatian dan implementasi program yang nyata dan inklusif terhadap pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas di Kota Dumai.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu drg. Hermiyati selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai terkait Bantuan Modal Usaha, maka penulis mengajukan pertanyaan kepada beliau sebagai berikut :

“Bagaimana proses pemberian modal usaha atau pelatihan keterampilan kerja bagi penyandang disabilitas?” Kepala Dinas menjawab : “Untuk modal usaha, Dinas Sosial membantu dengan bentuk bantuan non tunai, seperti bahan baku tepung, gula, atau barang yang diperlukan untuk usaha kecil mereka. Contohnya, ada pelatihan menjahit yang pernah diadakan oleh Pertamina, tapi sayangnya alat mesin jahit tidak diberikan kepada peserta, jadi setelah pelatihan mereka kesulitan mengembangkan kemampuan. Kami berharap ada tindak lanjut supaya pelatihan ini benar-benar berdampak pada pemberdayaan ekonomi” (Jumat, 18 Juli 2025 ; 11.19 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Novia Andriani,

S.Kep.,M.Si selaku Kepala Bidang Rehabilitas Sosial sebagai berikut :

“Bagaimana proses pemberian modal usaha atau pelatihan keterampilan kerja bagi penyandang disabilitas?” Ibu Novia Andriani menjawab: “Sistemnya asesmen dulu, baru dikasih bantuan sesuai kebutuhan. Kadang juga pelatihan keterampilan kerja lewat kerjasama sama UPT Daksa Provinsi. Tapi pelatihan di Kota Dumai sendiri masih terbatas, karena fasilitas dan SDM nya belum memadai.” (Jumat, 18 Juli 2025 ; 11.51 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Nora Lisda,S. Sos

selaku Pejabat Fungsional pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Kota Dumai sebagai berikut :

“Bagaimana proses pemberian modal usaha atau pelatihan keterampilan kerja bagi penyandang disabilitas?” Ibu Nora Lisda menjawab: “Untuk proses pemberian modal, biasanya kami data dulu peserta pelatihan atau yang aktif di komunitas. Nanti dari situ kita verifikasi siapa yang benar benar niat usaha, baru kita kasih bantuan modal dan bekal pelatihan keterampilan. Kita juga pantau perkembangan usahanya dan kasih pendampingan.” (Jumat, 18 Juli 2025 ; 12.15 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Eka Rizkia,S.IP

selaku Pejabat Fungsional pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Kota Dumai sebagai berikut :

“Bagaimana proses pemberian modal usaha atau pelatihan keterampilan kerja bagi penyandang disabilitas?” Ibu Eka menjawab: “Proses pemberian modal usaha biasanya disertai pelatihan dulu. Jadi, mereka ikut pelatihan keterampilan kerja, baru setelah dirasa siap, kami usulkan bantuan modal usaha sesuai kemampuan anggaran dan kebutuhan teman-teman disabilitas tersebut.” (Jumat, 18 Juli 2025 ; 12.35)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, dapat disimpulkan bahwa proses pemberian modal usaha dan pelatihan keterampilan kerja bagi penyandang disabilitas dilakukan secara bertahap dan selektif. Awalnya dilakukan asesmen atau pendataan untuk menentukan kebutuhan dan potensi penerima bantuan. Bantuan modal usaha diberikan dalam bentuk non tunai, seperti bahan baku usaha untuk mendukung usaha kecil mereka, dan disertai pelatihan keterampilan kerja, meskipun fasilitas pelatihan masih terbatas dan perlu tindak lanjut agar pelatihan berdampak nyata.

Selain itu, penerima bantuan dipantau dan dibekali pendampingan agar usaha mereka dapat berkembang dengan baik. Bantuan modal diberikan sesuai kesiapan peserta setelah mengikuti pelatihan dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.

Secara umum, pemberian modal usaha dan pelatihan bagi penyandang disabilitas di Dumai diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi melalui pendekatan yang terstruktur mulai dari asesmen, pelatihan keterampilan, pemberian bantuan non tunai, serta pembinaan dan pendampingan lanjutan agar manfaatnya optimal dan berkelanjutan. Namun, keterbatasan sarana dan

sumber daya manusia menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian untuk meningkatkan efektivitas program tersebut.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Muhammad Syukri Ramadhan selaku penyandang disabilitas tuna netra terkait Bantuan Modal Usaha sebagai berikut :

“Apakah Anda pernah menerima bantuan modal usaha atau pelatihan keterampilan kerja dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai ? Bagaimana prosesnya?” Beliau menjawab: “Soal bantuan modal usaha atau pelatihan keterampilan kerja juga belum pernah saya terima. Tapi pernah ada tawaran buat ikut pelatihan di Bandung, cuma saya tolak karena saya mau fokus sama sekolah saya dulu. Saya ini juga penyandang disabilitas tuna netra, dan walaupun saya punya keterbatasan, saya aktif banget di berbagai organisasi, ikut lomba MTQ, dan juga olahraga. Jadi, saya benar-benar ingin konsentrasi ke sekolah dan perkembangan diri dulu sebelum ikutan kegiatan lain yang mungkin menyita waktu” (Sabtu, 26 Juli 2025 ; 13.23 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Weris Meli selaku penyandang disabilitas tuna rungu sebagai berikut :

“Apakah Anda pernah menerima bantuan modal usaha atau pelatihan keterampilan kerja dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai ? Bagaimana prosesnya?” Ibu Weris Meli menjawab : “kalau ditanya apakah pernah dapat bantuan modal usaha atau pelatihan keterampilan kerja dari Dinas Sosial, ya belum pernah juga.” (Minggu, 6 Juli 2025 ; 10.19 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Yudi Ramadhan selaku penyandang disabilitas mental yang dimana dalam hal wawancara ini yang diterjemahkan oleh ibunya adalah sebagai berikut :

“Apakah Anda pernah menerima bantuan modal usaha atau pelatihan keterampilan kerja dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai ? Bagaimana prosesnya?” Beliau menjawab: “Tidak pernah dapat bantuan modal atau pelatihan apapun. Yang pernah kami dapat cuma bantuan sosial berupa uang tunai. Lumayan, tapi itu

nggak membantu untuk pemberdayaan atau kerja, cuma buat kebutuhan sehari-hari saja.” (Minggu, 20 Juli 2025 ; 15.56 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Syarial selaku penyandang disabilitas tuna netra sebagai berikut :

“Apakah Anda pernah menerima bantuan modal usaha atau pelatihan keterampilan kerja dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai ? Bagaimana prosesnya?” Bapak Syahrial menjawab: “saya dari dulu sampai sekarang, rasanya dak pernah dapat bantuan modal usaha atau pelatihan kerja dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai. Yang saya dapat cuma bantuan uang tunai saja, itu pun kadang kadang. Soal modal usaha atau pelatihan, hingga kini memang belum pernah ada saya ikut atau terima. Kalau bantuan uang tunai itu seringkali langsung diberikan, tapi modal usaha apalagi pelatihan belum saya rasai.” (Minggu, 6 Juli 2025 ; 09.28 wib)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa penyandang disabilitas di Kota Dumai, dapat disimpulkan bahwa selama ini program bantuan modal usaha dan pelatihan keterampilan kerja dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai belum menjangkau secara optimal kelompok penyandang disabilitas. Mayoritas responden menyatakan belum pernah menerima bantuan modal usaha atau pelatihan kerja, meskipun beberapa dari mereka pernah mendapat bantuan sosial berupa uang tunai yang bersifat konsumtif dan tidak berfokus pada pemberdayaan ekonomi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pelaksanaan program pemberdayaan bagi penyandang disabilitas, sehingga perlu adanya upaya lebih serius dari Dinas Sosial untuk meningkatkan akses dan partisipasi penyandang disabilitas dalam program tersebut agar dapat mendukung kemandirian dan pengembangan potensi mereka.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu drg. Hermiyati selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai terkait Pemantauan dan Pendataan, maka penulis mengajukan pertanyaan kepada beliau sebagai berikut :

“Apakah Dinas Sosial melakukan pendataan dan pemantauan terhadap penyandang disabilitas yang telah diberdayakan secara ekonomi?” Kepala Dinas menjawab : *“Tentu saja, kami rutin melakukan pendataan dan pemantauan agar mengetahui siapa saja yang sudah diberdayakan dan bagaimana perkembangan usaha mereka. Data ini penting untuk evaluasi dan merencanakan program berikutnya supaya manfaatnya berkelanjutan”* (Jumat, 18 Juli 2025 ; 11.19 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Novia Andriani, S.Kep.,M.Si selaku Kepala Bidang Rehabilitas Sosial sebagai berikut :

“Apakah Dinas Sosial melakukan pendataan dan pemantauan terhadap penyandang disabilitas yang telah diberdayakan secara ekonomi?” Ibu Noviani Andriani menjawab : *“Selalu ada pendataan, dilihat siapa saja yang sudah dapat akses ekonomi dan siapa yang belum. Tapi buat pemantauan berkala, jujur memang nggak optimal ya, karena tenaga di lapangan terbatas dan jumlah penerima bantuan juga banyak.”*(Jumat, 18 Juli 2025 ; 11.51 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Nora Lisda,S. Sos selaku Pejabat Fungsional pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai sebagai berikut :

“Apakah Dinas Sosial melakukan pendataan dan pemantauan terhadap penyandang disabilitas yang telah diberdayakan secara ekonomi?” Ibu Nora Lisda menjawab : *“Tentu kami lakukan pendataan rutin. Setiap ada progress atau masalah, kami kunjungi lagi, supaya program ini berkelanjutan dan tepat sasaran”* (Jumat, 18 Juli 2025 ; 12.15 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Eka Rizkia,S.IP selaku Pejabat Fungsional pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai sebagai berikut :

“Apakah Dinas Sosial melakukan pendataan dan pemantauan terhadap penyandang disabilitas yang telah diberdayakan secara ekonomi?” Ibu Eka menjawab : “Untuk pendataan dan pemantauan, kami lakukan update data rutin supaya tahu siapa saja yang sudah dapat pemberdayaan, terus dipantau juga perkembangan usahanya, walaupun memang masih banyak kendala keterbatasan SDM dan anggaran.” (Jumat, 18 Juli 2025 ; 12.35 wib)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pegawai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, dapat disimpulkan bahwa dinas tersebut secara rutin melakukan pendataan terhadap penyandang disabilitas yang telah diberdayakan secara ekonomi. Pendataan ini penting untuk mengetahui siapa saja yang mendapatkan akses pemberdayaan serta untuk evaluasi dan perencanaan program selanjutnya. Namun, pemantauan berkala terhadap perkembangan usaha penyandang disabilitas masih menghadapi kendala terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, sehingga pelaksanaannya belum optimal. Meski demikian, pegawai dinas berupaya secara aktif melakukan kunjungan dan pembaruan data agar program pemberdayaan dapat berjalan berkelanjutan dan tepat sasaran.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Muhammad Syukri Ramadhan selaku penyandang disabilitas tuna netra terkait Pendataan dan Pemantauan sebagai berikut :

“Apakah pihak Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai melakukan pendataan dan pemantauan terhadap aktivitas ekonomi Anda setelah menerima bantuan atau pelatihan?” Beliau menjawab : “Kalau soal pendataan atau pemantauan aktivitas ekonomi setelah dapat bantuan, saya rasa pernah ada pendataan sih, tapi saya juga agak lupa detailnya. Mungkin informasi saya juga dikumpulkan dari sekolah ke Dinas Sosial, soalnya biasanya mereka ada pendataan buat program-program tertentu.”(Sabtu, 26 Juli 2025; 13.23)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Weris Meli selaku penyandang disabilitas tuna rungu sebagai berikut :

“Apakah pihak Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai melakukan pendataan dan pemantauan terhadap aktivitas ekonomi Anda setelah menerima bantuan atau pelatihan?” Ibu Weris Meli menjawab : *“waktu itu mereka pernah datang untuk melakukan pendataan dan pemantauan terhadap kegiatan saya, khususnya terkait dengan alat bantu dengar yang saya terima. Mereka datang waktu saya belum punya alat bantu dengar, dan setelah saya dapat alat itu juga mereka masih memantau, buat memastikan apakah alatnya benar-benar dipakai dan membantu saya dalam komunikasi sehari-hari.”* (Minggu, 6 Juli 2025 ; 10.19 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Yudi Ramadhan selaku penyandang disabilitas mental yang dimana dalam hal wawancara ini yang diterjemahkan oleh ibunya adalah sebagai berikut :

“Apakah pihak Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai melakukan pendataan dan pemantauan terhadap aktivitas ekonomi Anda setelah menerima bantuan atau pelatihan ?” Beliau menjawab: *“Kalau pendataan, mereka memang datang cek kondisi kami setahun sekali, cuma itu saja. Tidak ada monitoring atau pendampingan khusus untuk aktivitas anak saya.”* (Minggu, 20 Juli 2025 ; 15.56)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Syarial selaku penyandang disabilitas tuna netra sebagai berikut :

“Apakah pihak Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai melakukan pendataan dan pemantauan terhadap aktivitas ekonomi Anda setelah menerima bantuan atau pelatihan?” Bapak Syahrial menjawab: *“pihak Dinas Sosial cuma pernah datang sekali sahaja untuk membuat pendataan ulang tentang kepribadian saya. Selepas itu, saya tidak pernah lagi didata atau dipantau berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Saya pun tak pernah mendapat pelatihan atau bantuan usaha ekonomi apa-apa. Yang saya terima cuma bantuan berupa uang tunai saja.”* (Minggu, 6 Juli 2025 ; 09.28 wib)

Berdasarkan hasil wawancara dengan para penyandang disabilitas di Kota Dumai, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Kota Dumai melakukan pendataan dan pemantauan aktivitas ekonomi penyandang disabilitas secara terbatas dan tidak konsisten. Beberapa responden mengaku pernah didata, terutama untuk program-program tertentu atau terkait bantuan alat khusus, namun monitoring lanjutan dan pendampingan aktivitas ekonomi setelah pemberian bantuan jarang dilakukan. Selain itu, adanya bantuan yang diterima pun lebih banyak berupa bantuan tunai tanpa pelatihan atau pendampingan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam mekanisme pemantauan dan pendampingan agar bantuan yang diberikan dapat lebih optimal mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi penyandang disabilitas.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu drg. Hermiyati selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai terkait Manfaat dan Tantangan dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi, maka penulis mengajukan pertanyaan kepada beliau sebagai berikut :

“Bagaimana hasil dan tantangan dalam pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas di Kota Dumai?” Kepala Dinas Menjawab : *“Hasilnya sudah mulai terlihat ada peningkatan keterampilan dan usaha kecil dari mereka yang mengikuti pelatihan. Namun tantangannya masih banyak, seperti belum lengkapnya fasilitas pendukung, kurangnya modal usaha yang nyata, serta masih minimnya akses pasar untuk produk mereka. Juga, stigma dan kurangnya dukungan orang tua sering jadi kendala dalam penguatan ekonomi mereka.”* (Jumat, 18 Juli 2025 ; 11.19 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Novia Andriani, S.Kep.,M.Si selaku Kepala Bidang Rehabilitas Sosial sebagai berikut :

“Bagaimana hasil dan tantangan dalam pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas di Kota Dumai?” Ibu Novia Andriani menjawab: *“Ada yang berhasil mandiri, usaha kecil-kecilan, tapi banyak juga yang akhirnya jalan di tempat karena keterbatasan*

modal, lingkungan yang kurang mendukung, dan kadang keluarganya sendiri kurang percaya bahwa mereka bisa mandiri. Tantangan besarnya memang dari lingkungan sama keterbatasan dana.” (Jumat, 18 Juli 2025 ; 11.51)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Nora Lisda, S. Sos selaku Pejabat Fungsional pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai sebagai berikut :

“Bagaimana hasil dan tantangan dalam pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas di Kota Dumai?” Ibu Nora Lisda menjawab : “Hasilnya memang ada yang berhasil mandiri—misalnya buka jasa jahit di rumah namun juga tantangannya juga nggak sedikit. Ada yang mentalnya masih minder, kurang permodalan, atau lingkungan belum mendukung. Tapi kami tetap semangat dan berusaha cari solusi bareng-bareng.” (Jumat, 18 Juli 2025 ; 12.15 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Eka Rizkia, S.IP selaku Pejabat Fungsional pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai sebagai berikut :

“Bagaimana hasil dan tantangan dalam pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas di Kota Dumai?” Ibu Eka Rizkia menjawab: “Hasilnya memang sudah ada yang berhasil mandiri, tapi tantangannya selama ini lebih banyak di keterbatasan dana dan kadang kurangnya minat atau kepercayaan diri dari teman-teman disabilitas sendiri.” (Jumat, 18 Juli 2025 ; 12.35)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pegawai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas di Kota Dumai telah menunjukkan hasil yang positif dengan adanya peningkatan keterampilan dan beberapa usaha kecil yang mulai mandiri. Namun, pemberdayaan ini masih menghadapi berbagai tantangan utama, antara lain keterbatasan modal usaha, minimnya fasilitas dan akses pasar, kurangnya dukungan lingkungan serta

stigma sosial, serta rendahnya kepercayaan diri dan dukungan dari keluarga penyandang disabilitas. Meskipun demikian, pihak dinas tetap berupaya memberikan motivasi dan mencari solusi bersama untuk mengatasi hambatan tersebut demi memperkuat kemandirian ekonomi para penyandang disabilitas.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Muhammad Syukri Ramadhan selaku penyandang disabilitas tuna netra terkait manfaat dan tantangan dalam upaya pemberdayaan ekonomi sebagai berikut :

“Menurut Anda, apa saja manfaat dan tantangan yang Anda alami dalam upaya pemberdayaan ekonomi sebagai penyandang disabilitas di Kota Dumai?” Beliau menjawab : “Menurut saya, manfaat dari upaya pemberdayaan ekonomi sebagai penyandang disabilitas di Kota Dumai itu sangat berharga, apalagi buat saya yang tuna netra dan aktif banget di kegiatan organisasi maupun lomba lomba. Pemberdayaan ini bikin saya punya kesempatan buat mandiri secara ekonomi, nggak bergantung sama orang lain terus.” (Sabtu, 26 Juli 2025 ; 13.23 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Weris Meli selaku penyandang disabilitas tuna rungu sebagai berikut :

“Menurut Anda, apa saja manfaat dan tantangan yang Anda alami dalam upaya pemberdayaan ekonomi sebagai penyandang disabilitas di Kota Dumai?” Ibu Weris Meli menjawab : “Kalau ditanya soal manfaat dari upaya pemberdayaan ekonomi buat saya sebagai penyandang disabilitas tuna rungu di Kota Dumai, yang paling utama adalah saya jadi lebih mudah berkomunikasi dengan orang lain.” (Minggu, 6 Juli 2025 ; 10.19 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Yudi Ramadhan selaku penyandang disabilitas mental yang dimana dalam hal wawancara ini yang diterjemahkan oleh ibunya adalah sebagai berikut :

“Menurut Anda, apa saja manfaat dan tantangan yang Anda alami dalam upaya pemberdayaan ekonomi sebagai penyandang disabilitas di Kota Dumai?” Beliau menjawab : “Manfaat kalau dapat bantuan

tentu besar karena bias untuk menutupi sebagian kebutuhan anak saya.” (Minggu, 20 Juli 2025 ; 15.56 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Syarial selaku penyandang disabilitas tuna netra sebagai berikut :

“Menurut Anda, apa saja manfaat dan tantangan yang Anda alami dalam upaya pemberdayaan ekonomi sebagai penyandang disabilitas di Kota Dumai?” Bapak Syahrial menjawab "Saya merasa sangat bersyukur karena menerima bantuan uang tunai dari pada pihak pemerintah dan organisasi berkaitan di Kota Dumai. Bantuan ini sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari saya, terutama untuk menampung keperluan saya. Dengan adanya bantuan uang tunai ini, saya dapat merasa lebih percaya diri dalam memperbaiki ekonomi keluarga saya. Namun begitu, ada juga tantangan besar yang saya hadapi sebagai penyandang tuna netra, terutama keterbatasan lapangan pekerjaan yang tersedia untuk kami. Peluang pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan kami sangat terbatas, dan sering kali saya menghadapi kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan tetap. Keadaan ini membuat saya harus mencari alternatif usaha sendiri dengan sumber daya yang ada.” (Minggu, 6 juli 2025 ; 09.28 wib)

Berdasarkan hasil wawancara dengan para penyandang disabilitas di Kota Dumai, dapat disimpulkan bahwa upaya pemberdayaan ekonomi memberikan manfaat signifikan, seperti kesempatan mandiri secara ekonomi, kemudahan berkomunikasi, serta dukungan finansial yang membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan disabilitas, sehingga banyak yang harus mencari alternatif usaha sendiri. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan dukungan dan akses terhadap peluang kerja yang lebih inklusif dari pemerintah dan lembaga terkait guna memberdayakan ekonomi penyandang disabilitas secara lebih optimal di Kota Dumai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai serta penyandang disabilitas, pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Dumai pada aspek Bina Usaha Secara keseluruhan pelaksanaan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Dumai menunjukkan upaya positif namun belum sepenuhnya inklusif dan efektif, membutuhkan peningkatan akses, penguatan modal usaha, fasilitasi pasar, serta penguatan pemantauan dan pendampingan agar pemberdayaan ekonomi benar-benar berkelanjutan dan berdampak signifikan bagi penyandang disabilitas Kota Dumai.

Sejalan dengan yang dikatakan oleh Robert Chambers (1997) dalam pemberdayaan penyandang disabilitas pentingnya untuk menekankan aspek partisipasi aktif dan pengembangan potensi individu dalam konteks sosial-ekonomi, yang memperkuat pentingnya pendekatan holistik seperti yang diupayakan Dinas Sosial Kota Dumai melalui pelatihan, asistensi, dan pendampingan. Hal ini dapat dilihat pada bentuk dukungan yang beragam seperti pelatihan keterampilan (menjahit, salon), pemberian modal usaha dalam bentuk non tunai (bahan baku usaha), asistensi dan rehabilitasi sosial, serta pendampingan usaha dan pemasaran produk melalui pameran UMKM dan koperasi ramah disabilitas.

Meskipun ada peningkatan keterampilan dan beberapa usaha kecil yang mandiri, implementasi kebijakan kerja bagi penyandang disabilitas masih belum maksimal dengan tantangan seperti minimnya akses pasar, kurangnya modal, stigma sosial, dan kurangnya dukungan keluarga. Hal ini sejalan

dengan teori pemberdayaan ekonomi dari Narayan (2005) yang menggarisbawahi pentingnya akses terhadap sumber daya dan pasar, yang masih menjadi tantangan di Dumai. Pendapat ini diperkuat dengan laporan bahwa dukungan modal dan akses pasar masih terbatas, sehingga walaupun ada upaya pelatihan, hasil pemberdayaan belum optimal.

3. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dalam aspek Bina Kelembagaan

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu drg. Hermiyati selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai terkait Organisasi Disabilitas, maka penulis mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

“Bagaimana Dinas Sosial melibatkan lembaga atau organisasi disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan?” Kepala Dinas menjawab: *“Kami melibatkan organisasi-organisasi disabilitas yang ada di Dumai dalam mengembangkan program. Misalnya, ada PPDI (Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia), komunitas tuna netra seperti ITMI, dan perkumpulan tuna rungu. Mereka dilibatkan sejak awal agar program yang dibuat sesuai dengan kebutuhan nyata anggota mereka.”* (Jumat, 18 Juli 2025 ; 11.19 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Novia Andriani

S.Kep., M. Si selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial sebagai berikut :

“Bagaimana Dinas Sosial melibatkan lembaga atau organisasi disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan?” Ibu Novia Andriani menjawab: *“Biasanya kita libatkan organisasi disabilitas kayak PPDI, walau sekarang lebih banyak yang aktif itu komunitas masing-masing jenis disabilitas, misalnya Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia. Kalau ada rencana program, kita usahakan koordinasi bareng mereka biar tepat sasaran.”* (Jumat, 18 Juli 2025 ; 11.51 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Nora Lisda, S.Sos selaku Pejabat Fungsional pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai sebagai berikut :

“Bagaimana Dinas Sosial melibatkan lembaga atau organisasi disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan?” Ibu Nora Lisda menjawab : “Dalam perencanaan dan pelaksanaan program, kami undang organisasi disabilitas ikut rapat, diskusi, atau forum musyawarah. Mereka ikut menentukan kebutuhan dan solusi, jadi bukan sekadar penerima manfaat, tapi juga pengambil keputusan.” (Jumat, 18 Juli 2025 ; 12.15 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Eka Rizkia, S.IP selaku Pejabat Fungsional pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai sebagai berikut :

“Bagaimana Dinas Sosial melibatkan lembaga atau organisasi disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan?” Ibu Eka menjawab: “Kami selalu ajak organisasi disabilitas waktu rapat perencanaan program, minta masukan mereka, dan libatkan mereka waktu pelaksanaan biar program sesuai kebutuhan di lapangan.” (Jumat, 18 Juli 2025 ; 12.35 wib)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial secara aktif melibatkan berbagai organisasi disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan. Mereka mengajak organisasi seperti PPDI, komunitas tuna netra (ITMI), dan perkumpulan tuna rungu untuk berpartisipasi sejak tahap awal perencanaan agar program yang dikembangkan dapat sesuai dengan kebutuhan nyata para penyandang disabilitas.

Selain itu, organisasi disabilitas juga dilibatkan dalam rapat, diskusi, dan forum musyawarah sebagai mitra pengambil keputusan, bukan hanya sebagai

penerima manfaat. Hal ini menunjukkan adanya upaya koordinasi dan kolaborasi yang erat antara Dinas Sosial dengan organisasi disabilitas untuk memastikan program pemberdayaan tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan di lapangan. Pendekatan partisipatif ini menjadi kunci dalam mewujudkan program yang efektif dan inklusif bagi penyandang disabilitas di Kota Dumai.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Muhammad Syukri Ramadhan selaku penyandang disabilitas tuna netra terkait Organisasi Disabilitas sebagai berikut :

“Apakah Anda atau organisasi disabilitas yang Anda ikuti pernah dilibatkan dalam perencanaan atau pelaksanaan program pemberdayaan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai?” Beliau menjawab : “Soal keterlibatan saya dan organisasi disabilitas di program pemberdayaan yang dibuat oleh Dinas Sosial, saya bersyukur banget bisa dilibatkan. Bahkan, saya sekarang sudah masuk kepengurusan ITMI, jadi bukan cuma ikut-ikutan aja, tapi saya juga bisa berkontribusi dalam mengambil keputusan dan mengusulkan program-program yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman tuna netra. Rasanya seneng banget bisa didengar aspirasi saya, walaupun saya punya keterbatasan penglihatan, tapi saya yakin kalau saya punya suara yang penting dan bermanfaat.” (Sabtu, 26 Juli 2025 ; 13.23)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Weris Meli selaku penyandang disabilitas tuna rungu sebagai berikut :

“Apakah Anda atau organisasi disabilitas yang Anda ikuti pernah dilibatkan dalam perencanaan atau pelaksanaan program pemberdayaan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai?” Ibu Weris Meli menjawab : “Kalau saya pribadi ini masalah macam ini saya tak paham. Saya sendiri sebagai ibu-ibu yang sudah tua dan tuna rungu ini jarang dengar ada undangan atau ajakan buat ikut dalam acara atau kegiatan yang dibuat Dinas Sosial.” (Minggu, 6 Juli 2025 ; 10.19 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Yudi Ramadhan selaku penyandang disabilitas mental yang mana dalam wawancara ini yang diterjemahkan oleh ibunya sebagai berikut :

“Apakah Anda atau organisasi disabilitas yang Anda ikuti pernah dilibatkan dalam perencanaan atau pelaksanaan program pemberdayaan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai?” Beliau menjawab : “Tidak pernah, kami tidak pernah dilibatkan. Kalau ada program, biasanya tanpa melibatkan kami atau organisasi penyandang disabilitas yang kami ikuti. Jadi kami sering nggak tahu apa yang direncanakan.” (Minggu, 20 Juli 2025 ; 15.56)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Syahrial selaku penyandang disabilitas tuna netra sebagai berikut :

“Apakah Anda atau organisasi disabilitas yang Anda ikuti pernah dilibatkan dalam perencanaan atau pelaksanaan program pemberdayaan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai?” Bapak Syahrial menjawab : “Saya belum pernah dilibatkan dalam perencanaan atau pelaksanaan program pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial. Sampai sekarang, saya rasa belum ada kesempatan atau undangan khusus bagi saya atau organisasi disabilitas tempat saya bergabung untuk ikut serta dalam program tersebut.” (Minggu, 6 Juli 2025 ; 09.28)

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyandang disabilitas dari berbagai jenis serta keterlibatan mereka dalam program pemberdayaan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan pengalaman terkait keterlibatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Beberapa individu, seperti Muhammad Syukri Ramadhan, merasa dilibatkan dan dapat berkontribusi aktif dalam organisasi disabilitas yang bekerja sama dengan Dinas Sosial, sedangkan sebagian lainnya, seperti Ibu Weris Meli, Yudi Ramadhan, dan Bapak Syahrial, mengaku tidak mendapatkan kesempatan atau undangan untuk terlibat dalam program tersebut. Hal ini

menunjukkan bahwa meskipun ada upaya dari Dinas Sosial untuk mengakomodasi penyandang disabilitas, masih terdapat ketidakseimbangan dalam akses dan partisipasi yang perlu diperbaiki agar seluruh penyandang disabilitas dapat merasakan manfaat dan keterlibatan yang lebih merata.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu drg. Hermiyati selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai terkait Kerja Sama dengan Instansi, maka penulis mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

“Apakah ada kerjasama dengan instansi lain (pemerintah, swasta, LSM) untuk mendukung hak-hak penyandang disabilitas, seperti akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik ?” Kepala Dinas menjawab : *“Ya, kami kerja sama dengan berbagai pihak mulai dari instansi pemerintah kota dan provinsi Riau, hingga perusahaan seperti Pertamina dan LSM. Kerjasama ini untuk mendukung akses pendidikan, kesehatan, dan layanan publik bagi penyandang disabilitas, termasuk pemberian bantuan dan pelatihan.”* (Jumat, 18 Juli 2025 ;11.19 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawawancara dengan Ibu Novia Andriani S.Kep., M. Si selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial sebagai berikut :

“Apakah ada kerjasama dengan instansi lain (pemerintah, swasta, LSM) untuk mendukung hak-hak penyandang disabilitas, seperti akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik ?” Ibu Novia Andriani menjawab : *“Ada kerjasama dengan instansi pemerintah baik itu pemerintah kota dumai ataupun pemerintah provinsi selain itu juga ada CSR dari Pertamina yang pernah support pelatihan keterampilan buat penyandang disabilitas. Tapi memang belum ada MOU khusus, jadi sifatnya insidental, bukan kerjasama tetap.”* (Jumat, 18 Juli 2025; 11.51 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawawancara dengan Ibu Nora Lisda,S.Sos selaku Pejabat Fungsional pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai sebagai berikut :

“Apakah ada kerjasama dengan instansi lain (pemerintah, swasta, LSM) untuk mendukung hak-hak penyandang disabilitas, seperti akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik ?” Ibu Nora Lisda menjawab: “Kita juga kerja bareng sama Dinas Pendidikan, Kesehatan, dan kadang instansi swasta seperti Pertamina serta LSM yang punya perhatian sama isu disabilitas. Lewat kerja sama ini, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan kebutuhan pokok jadi lebih gampang diterima penyandang disabilitas.” (Jumat, 18 Juli 2025 ; 12.15 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Eka Rizkia, S.IP selaku Pejabat Fungsional pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai sebagai berikut :

“Apakah ada kerjasama dengan instansi lain (pemerintah, swasta, LSM) untuk mendukung hak-hak penyandang disabilitas, seperti akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik?” Ibu Eka menjawab: “Ada, kami juga kerjasama sama beberapa instansi, seperti Pertamina, rumah sakit, lembaga pendidikan, sama LSM atau yayasan seperti Abiseka. Jadi akses pendidikan, kesehatan, atau pelatihan lebih terbuka untuk teman-teman disabilitas.” (Jumat, 18 Juli 2025 ; 12.35)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pegawai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, dapat disimpulkan bahwa dinas tersebut aktif menjalin kerja sama dengan berbagai instansi, baik pemerintah daerah, swasta seperti Pertamina, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam rangka mendukung hak-hak penyandang disabilitas. Kerja sama ini difokuskan pada peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan, pelatihan keterampilan, dan pelayanan publik yang lebih mudah dijangkau oleh penyandang disabilitas. Meskipun beberapa kerja sama bersifat insidental dan belum berlandaskan MoU resmi, kolaborasi tersebut tetap berjalan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas di Kota Dumai.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Muhammad Syukri Ramdhan selaku penyandang disabilitas tuna netra terkait adanya kerja sama yang dibangun oleh pihak Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai sebagai berikut :

“Apakah Anda mengetahui adanya kerjasama antara Dinas Sosial dengan instansi lain (pemerintah, swasta, LSM) untuk mendukung hak-hak Anda seperti pendidikan, kesehatan, atau pelayanan publik?”
 Beliau menjawab: *“Saya tahu kalau Dinas Sosial punya kerja sama dengan berbagai instansi lain, mulai dari pemerintah lain, swasta sampai LSM untuk mendukung hak-hak kami. Tentunya saya juga mendapatkan informasi dari teman-teman disabilitas saya . Misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik, mereka saling membantu supaya kami bisa akses dengan lebih mudah dan lancar.”* (Minggu, 26 Juli 2025 ; 13.23 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Weris Meli selaku penyandang disabilitas tuna rungu sebagai berikut :

“Apakah Anda mengetahui adanya kerjasama antara Dinas Sosial dengan instansi lain (pemerintah, swasta, LSM) untuk mendukung hak-hak Anda seperti pendidikan, kesehatan, atau pelayanan publik?”
 Ibu Weris Meli menjawab : *“Kalau soal kerjasama Dinas Sosial dengan instansi lain, saya sih kurang paham ya. Saya nggak tahu pasti ada atau nggak. Mungkin juga karena saya sudah tua, akses informasi saya terbatas, jadi belum bisa banyak tahu soal kerjasama tadi.”* (Minggu, 6 Juli 2025 ; 10.19 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Yudi Ramadhan selaku penyandang disabilitas mental yang mana dalam wawancara ini yang diterjemahkan oleh ibunya sebagai berikut :

“Apakah Anda mengetahui adanya kerjasama antara Dinas Sosial dengan instansi lain (pemerintah, swasta, LSM) untuk mendukung hak-hak Anda seperti pendidikan, kesehatan, atau pelayanan publik?”
 Beliau menjawab: *“Saya sebagai ibu tahu kalau ada beberapa kerjasama antara Dinas Sosial dengan instansi lain, walau detailnya saya kurang tahu. Seperti kerjasama dengan puskesmas atau LSM, tapi dampaknya belum terasa langsung buat anak saya.”* (Minggu, 20 Juli 2025 ; 15.56)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Syahrial selaku penyandang disabilitas tuna netra sebagai berikut :

“Apakah Anda mengetahui adanya kerjasama antara Dinas Sosial dengan instansi lain (pemerintah, swasta, LSM) untuk mendukung hak-hak Anda seperti pendidikan, kesehatan, atau pelayanan publik?”
Bapak Syahrial menjawab: *“Saya tak mengetahui secara pasti apa Dinas Sosial ada kerjasama dengan instansi lain macam pemerintah, swasta, atau LSM.”* (Minggu, 6 Juli 2025 ; 09.28 wib)

Berdasarkan hasil wawancara dengan para penyandang disabilitas di Kota Dumai, dapat disimpulkan bahwa keberadaan kerja sama antara Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dengan instansi lain, baik pemerintah, swasta, maupun LSM, sudah ada sebagai bentuk dukungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Namun, tingkat pemahaman dan akses informasi mengenai kerja sama tersebut bervariasi di antara para penyandang disabilitas; sebagian menyadari dan merasakan manfaatnya, sebagian lain kurang mengetahui atau merasakan dampak langsung. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi dan transparansi agar dukungan yang diberikan benar-benar dirasakan oleh seluruh kelompok disabilitas secara merata.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu drg. Hermiyati selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai terkait Keterlibatan dalam proses Pengambilan Keputusan, maka penulis mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

“Bagaimana Dinas Sosial memastikan partisipasi penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan di tingkat kelembagaan?”
Kepala Dinas menjawab: *“Partisipasi mereka kami dorong lewat penguatan organisasi dan komunitas penyandang disabilitas, supaya*

mereka punya suara dan bisa menyampaikan aspirasi kepada pemerintah maupun instansi terkait. Kami juga melibatkan mereka dalam musyawarah dan forum konsultasi khusus.” (Jumat, 18 Juli 2025 ; 11.19 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Novia Andriani

S.Kep., M. Si selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial sebagai berikut :

“Bagaimana Dinas Sosial memastikan partisipasi penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan di tingkat kelembagaan?”
Ibu Novia Andriani menjawab : *“Kita usahakan mereka terlibat lewat undangan forum musyawarah atau diskusi program, walau seringkali yang aktif datang itu dari komunitas tertentu aja. Keterwakilan langsung masih terbatas karena banyak faktor, apalagi kalau harus hadir fisik.” (Jumat, 18 Juli 2025 ; 11.51 wib)*

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Nora Lisda, S.Sos

selaku Pejabat Fungsional pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Kota Dumai sebagai berikut :

“Bagaimana Dinas Sosial memastikan partisipasi penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan di tingkat kelembagaan?”
Ibu Nora Lisda menjawab: *“Penyandang disabilitas sering kami libatkan dalam musyawarah rencana program, bahkan kadang ada yang jadi pengurus atau anggota forum, biar suaranya didengar dan diambil keputusan bareng-bareng.” (Jumat, 18 Juli 2025 ; 12.15)*

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Eka Rizkia, S.IP

selaku Pejabat Fungsional pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Kota Dumai sebagai berikut :

“Bagaimana Dinas Sosial memastikan partisipasi penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan di tingkat kelembagaan?”
Ibu Eka menjawab : *“Kami usahakan, misal dalam forum atau musrenbang, perwakilan penyandang disabilitas diundang dan mendengarkan pendapatnya, supaya kebutuhan mereka ikut masuk dalam pengambilan keputusan.” (Jumat, 18 Juli 2025 ; 12.35 wib)*

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pegawai Dinas Sosial dan

Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, dapat disimpulkan bahwa partisipasi

penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan di tingkat kelembagaan terus diupayakan melalui berbagai cara. Dinas Sosial mendorong penguatan organisasi dan komunitas penyandang disabilitas agar mereka memiliki suara yang didengar dalam musyawarah, forum konsultasi, dan perencanaan program. Meskipun keterwakilan penyandang disabilitas secara langsung masih terbatas karena berbagai kendala, instansi tersebut tetap berusaha melibatkan mereka melalui undangan resmi dalam forum musyawarah dan musrenbang sehingga kebutuhan dan aspirasi penyandang disabilitas dapat terakomodasi dalam pengambilan keputusan bersama.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Muhammad Syukri Ramdhan selaku penyandang disabilitas tuna netra terkait Keterlibatan para penyandang disabilitas pada proses Pengambilan Keputusan sebagai berikut :

“Apakah Anda merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan di tingkat organisasi atau kelembagaan?” Beliau menjawab: “Kalau soal pengambilan keputusan, saya merasa benar-benar dilibatkan, bukan cuma jadi penonton. Saya sudah beberapa kali ikut rapat organisasi dan juga forum masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terutama tentang bagaimana Pemko Dumai perlu mengembangkan program dan fasilitas yang ramah disabilitas. Walaupun masih banyak yang harus diperbaiki, saya bersyukur karena suara saya didengar dan dihargai. Saya benar-benar ingin semua penyandang disabilitas, khususnya tuna netra, bisa mendapat kesempatan yang sama untuk berkembang dan mandiri.” (Sabtu, 26 Juli 2025 ; 13.23 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Weris Meli selaku penyandang disabilitas tuna rungu sebagai berikut :

“Apakah Anda merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan di tingkat organisasi atau kelembagaan?” Ibu Weris Meli menjawab : “Kalau yang soal ikut pengambilan keputusan itu, saya bisa bilang iya, tapi cuma kalau yang sifatnya musyawarah biasa atau mungkin

seperti pemilu di sekitaran masyarakat sini saja.” (Minggu, 6 Juli 2025 ; 10.19 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Yudi Ramadhan selaku penyandang disabilitas mental yang mana dalam wawancara ini yang diterjemahkan oleh ibunya sebagai berikut :

“Apakah Anda merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan di tingkat organisasi atau kelembagaan?” Beliau menjawab : “Kalau keputusan yang berhubungan dengan anak saya, dia dilibatkan dalam hal-hal yang dia bisa ikut punya suara, misalnya dalam organisasi komunitas penyandang disabilitas yang dia ikuti. Tapi kami orang tua agak jarang dilibatkan dalam keputusan yang lebih besar.” (Minggu, 20 Juli 2025 ; 15.56 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Syarial selaku penyandang disabilitas tuna netra sebagai berikut :

“Apakah Anda merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan di tingkat organisasi atau kelembagaan?” Bapak Syahrial menjawab : “Ya, saya merasa dilibatkan. Walaupun saya seorang penyandang disabilitas tuna netra, para masayrakat disini baik melalui ketua RT saya sentiasa memastikan suara saya didengar dan pendapat saya diambil kira dalam setiap mesyuarat dan perbincangan penting.” (Minggu, 6 Juli 2025 ; 09.28 wib)

Berdasarkan hasil wawancara dengan para penyandang disabilitas di Kota Dumai, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses pengambilan keputusan di tingkat organisasi atau kelembagaan masih bervariasi. Beberapa penyandang disabilitas, seperti tuna netra, merasa cukup dilibatkan dan mendapatkan kesempatan menyampaikan aspirasi dalam rapat dan forum masyarakat, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan.

Namun, keterlibatan yang dirasakan oleh penyandang disabilitas tuna rungu atau mental cenderung lebih terbatas, terutama pada skala musyawarah setempat atau keputusan yang berkaitan langsung dengan individu. Secara

umum, upaya pemberdayaan melalui partisipasi pengambilan keputusan sudah ada, tetapi perlu terus ditingkatkan agar semua kelompok disabilitas bisa merasakan inklusi dan pengakuan yang setara dalam proses pengambilan keputusan di masyarakat maupun organisasi.

Secara keseluruhan terkait pemberdayaan penyandang disabilitas dalam aspek bina kelembagaan di Kota Dumai, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai telah melakukan upaya aktif untuk melibatkan organisasi dan komunitas disabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengambilan keputusan program pemberdayaan. Organisasi seperti PPDI, komunitas tuna netra (ITMI), serta perkumpulan tuna rungu secara sengaja diajak berpartisipasi sejak tahap perencanaan agar program yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan nyata anggota mereka. Tidak hanya sebagai penerima manfaat, penyandang disabilitas juga diberi ruang dalam forum musyawarah dan konsultasi sebagai mitra pengambil keputusan.

Hal ini sejalan dengan Rappaport (1987) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah proses dimana individu, kelompok, dan komunitas memperoleh kontrol lebih besar atas sumber daya dan keputusan yang memengaruhi hidup mereka. Dalam konteks bina kelembagaan, melibatkan organisasi disabilitas dalam perencanaan dan pengambilan keputusan merupakan bentuk pemberdayaan yang memungkinkan mereka mengontrol program sesuai kebutuhan riil.

Namun, keterlibatan penyandang disabilitas di tingkat kelembagaan masih menunjukkan variasi. Beberapa individu seperti penyandang tuna netra merasa aktif dilibatkan dan dianggap memiliki suara penting dalam pengambilan keputusan, sementara penyandang disabilitas tuna rungu dan mental menunjukkan pengalaman keterlibatan yang lebih terbatas. Selain itu, kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta, dan LSM juga menjadi upaya strategis untuk mendukung akses pendidikan, kesehatan, serta layanan publik bagi penyandang disabilitas, meskipun komunikasi dan sosialisasi terkait kerja sama ini masih perlu ditingkatkan agar manfaatnya dapat dirasakan merata.

4. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dalam aspek Bina Lingkungan

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu drg. Hermiyati selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai terkait Aksesibilitas, maka penulis mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

“Bagaimana Dinas Sosial memastikan lingkungan fisik dan sosial yang ramah disabilitas, termasuk aksesibilitas fasilitas umum, pelayanan publik, dan perlindungan ?” Kepala Dinas menjawab : *“Kami mendorong agar fasilitas umum dan pelayanan publik di Dumai dibuat ramah disabilitas, misalnya akses tempat parkir khusus, jalur khusus untuk difabel, dan pelayanan publik yang mudah dijangkau. Selain itu, kami juga bekerja untuk melindungi mereka dari risiko bencana dan perlakuan diskriminatif.”* (Jumat, 18 Juli 2025 ; 11.19 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Novia Andriani S.Kep., M. Si selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial sebagai berikut :

“Bagaimana Dinas Sosial memastikan lingkungan fisik dan sosial yang ramah disabilitas, termasuk aksesibilitas fasilitas umum, pelayanan publik, dan perlindungan ?” Ibu Novia Andriani menjawab: *“Kami di Dinas Sosial selalu mendorong fasilitas umum*

supaya ramah disabilitas, tapi implementasinya masih kurang. Biasanya, kalau ada usulan pembangunan, kita ikut mengawal kebutuhan aksesibilitas, tapi realisasinya tergantung dinas teknis dan dana yang ada.” (Jumat, 18 Juli 2025 ; 11.51 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Nora Lisda, S.Sos selaku Pejabat Fungsional pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai sebagai berikut :

“Bagaimana Dinas Sosial memastikan lingkungan fisik dan sosial yang ramah disabilitas, termasuk aksesibilitas fasilitas umum, pelayanan publik, dan perlindungan ?” Ibu Nora Lisda menjawab: “Kami terus mendorong agar fasilitas umum, seperti kantor pemerintahan, puskesmas, dan taman, punya akses ramah disabilitas. Misalnya, buat jalur kursi roda, ramp, toilet khusus, dan sebagainya. Kalau ada pembangunan baru, kami juga kasih masukan biar aksesibilitas diprioritaskan.” (Jumat, 18 Juli 2025 ; 12.15 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Eka Rizkia, S.IP selaku Pejabat Fungsional pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai sebagai berikut :

“Bagaimana Dinas Sosial memastikan lingkungan fisik dan sosial yang ramah disabilitas, termasuk aksesibilitas fasilitas umum, pelayanan publik, dan perlindungan ?” Ibu Eka menjawab : “Untuk lingkungan ramah disabilitas, kami kerjasama sama dinas lain agar fasilitas umum (seperti trotoar, kantor pelayanan, sekolah) lebih mudah diakses, misal disediakan jalur landai, toilet khusus, dan sebagainya. Pelayanan publik juga didorong agar ramah disabilitas. Kalau soal bencana, penyandang disabilitas diprioritaskan waktu penanganan.” (Jumat, 18 Juli 2025 ; 12.35 wib)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, dapat disimpulkan bahwa dinas tersebut aktif mendorong terciptanya lingkungan fisik dan sosial yang ramah disabilitas. Upaya yang dilakukan meliputi penyediaan fasilitas umum yang

aksesibel seperti jalur parkir khusus, jalur kursi roda, ramp, dan toilet khusus, serta pelayanan publik yang mudah dijangkau oleh penyandang disabilitas.

Meskipun implementasi aksesibilitas masih terkendala oleh keterbatasan dana dan peran dinas teknis lain, Dinas Sosial terus berperan dalam pengawalan dan memberikan masukan agar kebutuhan disabilitas diprioritaskan dalam pembangunan fasilitas baru. Selain itu, perlindungan terhadap penyandang disabilitas, terutama dalam penanganan bencana dan pencegahan diskriminasi, juga menjadi perhatian penting dalam kebijakan dan program dinas. Secara keseluruhan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Muhammad Syukri Ramdhan selaku penyandang disabilitas tuna netra terkait Aksesibilitas sebagai berikut :

“Apakah Anda merasa lingkungan fisik dan sosial di Kota Dumai sudah ramah disabilitas, terutama terkait aksesibilitas fasilitas umum, pelayanan publik, dan perlindungan ?” Beliau menjawab : “Mengenai lingkungan di Kota Dumai, saya merasa sudah lumayan ramah buat kami. Aksesibilitas di fasilitas umum. Ini penting kali supaya kami bisa bergerak dan beraktivitas tanpa hambatan yang berarti.” (Sabtu, 26 Juli 2025 ; 13.23 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Weris Meli selaku penyandang disabilitas tuna rungu sebagai berikut :

“Apakah Anda merasa lingkungan fisik dan sosial di Kota Dumai sudah ramah disabilitas, terutama terkait aksesibilitas fasilitas umum, pelayanan publik, dan perlindungan ?” Ibu Weris Meli menjawab : “Iya, kalau di Kota Dumai ini, saya rasa sekarang udah cukup ramah sama kami yang penyandang disabilitas.” (Minggu, 6 Juli 2025 ; 10.19 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Yudi Ramadhan selaku penyandang disabilitas mental yang mana dalam wawancara ini yang diterjemahkan oleh ibunya sebagai berikut :

“Apakah Anda merasa lingkungan fisik dan sosial di Kota Dumai sudah ramah disabilitas, terutama terkait aksesibilitas fasilitas umum, pelayanan publik, dan perlindungan ? Beliau menjawab: “Kalau untuk fasilitas umum sudah mulai ada akses ramah disabilitas, misalnya ramp buat kursi roda dan layanan prioritas. Lingkungan sosial juga sudah lumayan baik, ada kesadaran kalau penyandang disabilitas perlu dihormati dan dilindungi.” (Minggu, 20 Juli 2025 ; 15.56 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Syahrial selaku penyandang disabilitas tuna netra sebagai berikut :

“Apakah Anda merasa lingkungan fisik dan sosial di Kota Dumai sudah ramah disabilitas, terutama terkait aksesibilitas fasilitas umum, pelayanan publik, dan perlindungan ?” Bapak Syahrial menjawab: "Alhamdulillah, saya rasa lingkungan di Kota Dumai ini sudah mulai ramah bagi kami orang-orang kurang macam kami ni." (Minggu, 6 Juli 2025 ; 09.28 wib)

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyandang disabilitas di Kota Dumai, dapat disimpulkan bahwa lingkungan fisik dan sosial di Kota Dumai mulai menunjukkan peningkatan dalam hal aksesibilitas dan keramahan terhadap penyandang disabilitas. Fasilitas umum sudah dilengkapi dengan akses ramah disabilitas seperti ramp kursi roda dan layanan prioritas, sementara kesadaran sosial terhadap penghormatan dan perlindungan bagi penyandang disabilitas juga semakin baik. Secara keseluruhan, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan, Kota Dumai sudah cukup memberikan perhatian dan dukungan dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu drg. Hermiyati selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai terkait Diskriminasi, maka penulis mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

“Apa saja upaya yang dilakukan untuk menghilangkan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi terhadap penyandang disabilitas?” Kepala Dinas menjawab: *“Upaya kami termasuk sosialisasi ke masyarakat terkait hak difabel, pendampingan hukum jika terjadi pelanggaran, serta kerjasama dengan aparat penegak hukum untuk melindungi mereka. Kami juga aktif melakukan edukasi dan pengawasan secara berkala.”* (Jumat, 18 Juli 2025 ; 11.19 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawawancara dengan Ibu Novia Andriani S.Kep., M. Si selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial sebagai berikut :

“Apa saja upaya yang dilakukan untuk menghilangkan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi terhadap penyandang disabilitas?” Ibu Novia Andriani menjawab: *“Upayanya lewat sosialisasi dan pendampingan kasus, kalau ada laporan penelantaran atau kekerasan terhadap penyandang disabilitas kita langsung turun bantu lapor dan advokasi. Walau belum bisa maksimal, setidaknya kita cepat tanggap kalau ada kasus.”* (Jumat, 18 Juli 2025 ; 11.51 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawawancara dengan Ibu Nora Lisda,S.Sos selaku Pejabat Fungsional pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai sebagai berikut :

“Apa saja upaya yang dilakukan untuk menghilangkan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi terhadap penyandang disabilitas?” Ibu Nora Lisda menjawab: *“Untuk menghilangkan diskriminasi, kami lakukan edukasi ke masyarakat, aparat, hingga dunia usaha. Kalau ada laporan penelantaran atau kekerasan, kami langsung tindak lanjut bareng pihak terkait supaya ada perlindungan maksimal.”* (Jumat, 18 Juli 2025 ; 12.15 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawawancara dengan Ibu Eka Rizkia,S.IP selaku Pejabat Fungsional pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai sebagai berikut :

“Apa saja upaya yang dilakukan untuk menghilangkan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi terhadap penyandang disabilitas?” Ibu Eka menjawab: “Upaya menghilangkan diskriminasi atau kekerasan biasanya lewat sosialisasi dan edukasi di masyarakat, juga penguatan keluarga supaya tidak menelantarkan anggota keluarga yang disabilitas. Kalau ada kasus kekerasan atau penelantaran, kami turun tangan langsung bersama pihak berwajib.” (Jumat, 18 Juli 2025 ; 12.35 wib)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, dapat disimpulkan bahwa upaya menghilangkan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi terhadap penyandang disabilitas dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif. Langkah-langkah utama meliputi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, aparat penegak hukum, dunia usaha, serta penguatan peran keluarga.

Selain itu, pihak dinas aktif memberikan pendampingan hukum dan advokasi bila terjadi pelanggaran, serta melakukan pengawasan dan tindak lanjut cepat terhadap laporan kasus. Kerjasama erat dengan aparat penegak hukum juga menjadi kunci untuk memberikan perlindungan optimal bagi penyandang disabilitas. Upaya ini menunjukkan komitmen dinas dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan aman bagi penyandang disabilitas di Kota Dumai.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Muhammad Syukri Ramdhan selaku penyandang disabilitas tuna netra terkait Diskriminasi sebagai berikut :

“Apakah Anda pernah mengalami diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, atau eksploitasi? Jika ya, bagaimana penanganannya?” Beliau menjawab: “Saya pribadi belum pernah mengalami

diskriminasi, penelantaran, atau hal-hal buruk lainnya, alhamdulillah. Kalau teman-teman atau saya mengalami masalah, biasanya langsung ada penanganan dari Dinas Sosial atau organisasi kami.” (Sabtu, 26 Juli 2025 ; 13.23 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Weris Meli selaku penyandang disabilitas tuna rungu sebagai berikut :

“Apakah Anda pernah mengalami diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, atau eksploitasi? Jika ya, bagaimana penanganannya?”
Ibu Weris Meli menjawab : *“Alhamdulillah saya nggak pernah ngalamin hal-hal kayak diskriminasi atau penyiksaan. Di lingkungan sekitar saya juga baik-baik aja, mereka ngerti dan mau bantu kalau saya butuh sesuatu.” (Minggu, 6 Juli 2025 ; 10.19 wib)*

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Yudi Ramadhan selaku penyandang disabilitas mental yang mana dalam wawancara ini yang diterjemahkan oleh ibunya sebagai berikut :

“Apakah Anda pernah mengalami diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, atau eksploitasi? Jika ya, bagaimana penanganannya?”
Beliau menjawab: *“Alhamdulillah tidak pernah mengalami hal-hal buruk seperti itu. Kami berusaha menjaga anak saya dan lingkungan supaya aman dan nyaman.” (Minggu, 20 Juli 2025 ; 15.56 wib)*

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Syarial selaku penyandang disabilitas tuna netra sebagai berikut :

“Apakah Anda pernah mengalami diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, atau eksploitasi? Jika ya, bagaimana penanganannya?”
Bapak Syahrial menjawab : *“Syukur, saya tidak pernah alami diskriminasi, penelantaran, penyiksaan atau apapun yang menyakitkan saya sebagai orang kurang upaya. Kalau ada masalah, saya percaya pihak terkait akan bantu dengan adil dan bijaksana.” (Minggu, 6 Juli 2025 ; 09.28 wib)*

Berdasarkan hasil wawancara dengan para penyandang yang ada di Kota Dumai, secara umum mereka menyatakan belum pernah mengalami diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, atau eksploitasi. Responden merasa

lingkungan sekitar cukup mendukung dan responsif terhadap kebutuhan mereka. Selain itu, apabila menghadapi masalah, mereka mendapatkan penanganan dan bantuan yang memadai dari Dinas Sosial, organisasi sosial, maupun pihak-pihak terkait secara adil dan bijaksana. Hal ini menunjukkan adanya upaya perlindungan dan dukungan sosial yang berjalan dengan baik untuk para penyandang disabilitas di lingkungan tersebut.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu drg. Hermiyati selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai terkait Hidup Mandiri dan Berpartisipasi, maka penulis mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

“Bagaimana Dinas Sosial memfasilitasi hak penyandang disabilitas untuk hidup mandiri dan berpartisipasi dalam masyarakat?” Kepala Dinas menjawab : *“Kami berikan pelatihan keterampilan dan dukungan sosial agar mereka bisa mandiri. Juga, kami fasilitasi mereka ikut dalam kegiatan sosial, budaya, dan olahraga supaya bisa berpartisipasi penuh dalam masyarakat tanpa hambatan”* (Jumat, 18 Juli 2025; 11.19 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Novia Andriani S.Kep., M. Si selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial sebagai berikut :

“Bagaimana Dinas Sosial memfasilitasi hak penyandang disabilitas untuk hidup mandiri dan berpartisipasi dalam masyarakat?” Ibu Novia Andriani menjawab: *“Kita dukung penyandang disabilitas yang mau hidup mandiri lewat program pelatihan dan bantuan alat bantu. Ada juga program belajar keterampilan, walau skalanya masih kecil.”* (Jumat, 18 Juli 2025 ; 11.51 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Nora Lisda,S.Sos selaku Pejabat Fungsional pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai sebagai berikut :

“Bagaimana Dinas Sosial memfasilitasi hak penyandang disabilitas untuk hidup mandiri dan berpartisipasi dalam masyarakat?” Ibu Nora Lisda menjawab : “Supaya teman-teman disabilitas bisa hidup mandiri dan berpartisipasi aktif, kami fasilitasi kegiatan ekonomi, sosial, sampai olahraga dan seni budaya. Pokoknya, kami ingin mereka merasa diterima dan ikut jadi bagian dari masyarakat luas, bukan terpinggirkan.” (Jumat, 18 Juli 2025 ; 12.15 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Eka Rizkia,S.IP selaku Pejabat Fungsional pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai sebagai berikut :

“Bagaimana Dinas Sosial memfasilitasi hak penyandang disabilitas untuk hidup mandiri dan berpartisipasi dalam masyarakat?” Ibu Eka menjawab: “Hak hidup mandiri difasilitasi lewat pelatihan, pemberian alat bantu, pelatihan vokasi, serta didorong supaya aktif di masyarakat. Kami juga dukung mereka gabung kegiatan budaya, olahraga, bahkan wisata, misal lewat event khusus Hari Disabilitas.” (Jumat, 18 Juli 2025 ; 12.35 wib)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pejabat Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, dapat disimpulkan bahwa dinas tersebut berkomitmen memfasilitasi hak penyandang disabilitas untuk hidup mandiri dan berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat. Fasilitasi yang dilakukan meliputi pelatihan keterampilan dan vokasi, pemberian alat bantu, serta dukungan dalam berbagai kegiatan sosial, budaya, olahraga, dan ekonomi. Program-program ini bertujuan agar penyandang disabilitas tidak hanya mandiri secara ekonomi dan sosial, tetapi juga merasa diterima serta memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat tanpa adanya hambatan atau diskriminasi.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Muhammad Syukri Ramdhan selaku penyandang disabilitas tuna netra terkait Hidup Mandiri dan Berpartisipasi sebagai berikut :

“Apakah Anda merasa difasilitasi untuk hidup mandiri dan berpartisipasi dalam masyarakat oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai?” Beliau menjawab : “Saya juga senang karena Dinas Sosial sudah memfasilitasi saya dengan bantuan pendidikan dan bantuan sosial lain yang sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari. Bantuan itu berdampak besar, terutama dalam hal kemandirian. Misalnya, dengan adanya bantuan pendidikan, saya bisa terus sekolah dan mengembangkan diri tanpa harus terlalu memikirkan biaya. Ini membuat saya lebih percaya diri dan siap menghadapi masa depan.” (Sabtu, 26 Juli 2025 ; 13.23 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Weris Meli selaku penyandang disabilitas tuna rungu sebagai berikut :

“Apakah Anda merasa difasilitasi untuk hidup mandiri dan berpartisipasi dalam masyarakat oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai?” Ibu Weris Meli menjawab : “Ya cukup merasa difasilitasi lah dengan adanya pemberian bantuan alat pendengar ni.” (Minggu, 6 Juli 2025 ; 10.19 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Yudi Ramadhan selaku penyandang disabilitas mental yang mana dalam wawancara ini yang diterjemahkan oleh ibunya sebagai berikut :

“Apakah Anda merasa difasilitasi untuk hidup mandiri dan berpartisipasi dalam masyarakat oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai?” Beliau menjawab : “Kalau soal difasilitasi, kami merasa belum sepenuhnya mendapat dukungan dari Dinas Sosial. Kadang kami harus berinisiatif sendiri agar anak saya bisa mandiri dan ikut kegiatan sosial.” (Minggu, 20 Juli 2025 ; 15.56 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Syarial selaku penyandang disabilitas tuna netra sebagai berikut :

“Apakah Anda merasa difasilitasi untuk hidup mandiri dan berpartisipasi dalam masyarakat oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai?” Bapak Syahrial menjawab : *"Dinas Sosial selalu memfasilitasi saya untuk hidup mandiri dan beribadat atau bergaul dengan masyarakat. Mereka beri pelatihan dan bantuan supaya saya bisa berdikari dan ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat."* (Minggu, 6 Juli 2025 ; 09.28 wib)

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyandang disabilitas di Kota Dumai, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat memberikan dukungan yang bervariasi dalam memfasilitasi hidup mandiri dan partisipasi mereka dalam masyarakat. Penyandang tuna netra dan tuna rungu merasa mendapat bantuan yang signifikan, seperti pendidikan, pelatihan, dan alat bantu, sehingga meningkatkan kemandirian dan kepercayaan diri mereka.

Namun, bagi penyandang disabilitas mental, dukungan yang diterima masih dirasa kurang optimal, sehingga mereka perlu lebih banyak berinisiatif sendiri untuk mencapai kemandirian dan keterlibatan sosial. Secara umum, bantuan dari dinas tersebut sangat membantu, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan terutama dalam mendukung kelompok dengan kebutuhan khusus yang berbeda.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu drg. Hermiyati selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai terkait Hak Berekspresi, Berpindah tempat, serta berpartisipasi dalam Kegiatan Budaya, Olahraga dan Pariwisata, maka penulis mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

“Apakah ada program atau kegiatan yang mendukung hak berekspresi, berpindah tempat, dan berpartisipasi dalam kegiatan budaya, olahraga, dan pariwisata?” Kepala Dinas menjawab: *“Ada, kami berupaya mendorong keterlibatan penyandang disabilitas dalam*

berbagai kegiatan tersebut lewat komunitas dan event yang inklusif. Hal ini penting agar mereka bisa bebas berekspresi dan ikut menikmati kesempatan yang sama seperti warga lainnya” (Jumat, 18 Juli 2025 ; 11.19 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Novia Andriani

S.Kep., M. Si selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial sebagai berikut :

“Apakah ada program atau kegiatan yang mendukung hak berekspresi, berpindah tempat, dan berpartisipasi dalam kegiatan budaya, olahraga, dan pariwisata?” Ibu Novia Andriani menjawab : “Penyandang disabilitas juga sering ikut kegiatan budaya, pariwisata, bahkan olahraga kayak paralympic. Kita dukung kalau memang ada event, apalagi kalau mereka punya potensi.” (Jumat, 18 Juli 2025 ; 11.51 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Nora Lisda,S.Sos

selaku Pejabat Fungsional pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Kota Dumai sebagai berikut :

“Apakah ada program atau kegiatan yang mendukung hak berekspresi, berpindah tempat, dan berpartisipasi dalam kegiatan budaya, olahraga, dan pariwisata?” Ibu Nora Lisda menjawab: “Program kegiatan berekspresi juga ada, kayak pentas seni, lomba olahraga, dan semacamnya. Kami juga coba libatkan mereka ikut festival budaya atau even pariwisata lokal biar makin percaya diri.” (Jumat, 18 Juli 2025 ; 12.15 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Eka Rizkia,S.IP

selaku Pejabat Fungsional pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Kota Dumai sebagai berikut :

“Apakah ada program atau kegiatan yang mendukung hak berekspresi, berpindah tempat, dan berpartisipasi dalam kegiatan budaya, olahraga, dan pariwisata?” Ibu Eka menjawab : “Ya, tentunya ada. Kita dari Dinas Sosial Dumai rutin ngadain berbagai program, mulai dari penyaluran bantuan alat bantu seperti kursi roda, tongkat, alat dengar, sampai pelatihan keterampilan buat teman-teman disabilitas biar mereka bisa aktif dan berkegiatan. Untuk kegiatan budaya, olahraga, dan pariwisata memang kita dorong supaya mereka juga bisa ikut berpartisipasi dan berekspresi,

meskipun itu masih perlu dukungan lebih banyak dari masyarakat dan pemerintah. Intinya mereka kami usahakan dapat akses yang layak supaya nggak terhambat dalam melakukan kegiatan sehari-hari dan ikut dalam kegiatan sosial yang ada." (Jumat, 18 Juli 2025 ; 12.35 wib)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pejabat di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah secara aktif mendorong dan mendukung hak penyandang disabilitas dalam berekspresi, berpindah tempat, serta berpartisipasi dalam kegiatan budaya, olahraga, dan pariwisata.

Berbagai program dan kegiatan inklusif telah diselenggarakan, seperti pelatihan keterampilan, penyediaan alat bantu, lomba olahraga, pentas seni, serta keterlibatan dalam festival budaya dan event pariwisata lokal. Upaya ini bertujuan agar penyandang disabilitas memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk beraktivitas dan berpartisipasi secara penuh di masyarakat, meskipun masih diperlukan dukungan lebih lanjut dari berbagai pihak guna mengoptimalkan kebermanfaatannya.

Selanjutnya penulis melakukan wawawancara dengan Muhammad Syukri Ramdhan selaku penyandang disabilitas tuna netra terkait Hak Berekspresi, Berpindah tempat, serta berpartisipasi dalam Kegiatan Budaya, Olahraga dan Pariwisata, sebagai berikut :

"Apakah Anda pernah mengikuti atau mengetahui adanya program yang mendukung hak berekspresi, berpindah tempat, serta berpartisipasi dalam kegiatan budaya, olahraga, atau pariwisata?" Beliau menjawab: "Saya juga sering ikut kegiatan budaya, olahraga, bahkan pariwisata yang disupport oleh Dinas Sosial dan lingkungan sekitar. Ini membuat saya bisa berekspresi lebih luas, bertemu banyak orang, dan tetap aktif sebagai remaja yang punya semangat tinggi. Saya merasa sangat difasilitasi untuk berpartisipasi secara penuh di

masyarakat, bukan hanya jadi pribadi yang tergantung tapi bisa mandiri dan bermanfaat untuk orang lain.” (Sabtu, 26 Juli 2025 ; 13.23 wib)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Weris Meli selaku penyandang disabilitas tuna rungu sebagai berikut :

“Apakah Anda pernah mengikuti atau mengetahui adanya program yang mendukung hak berekspresi, berpindah tempat, serta berpartisipasi dalam kegiatan budaya, olahraga, atau pariwisata?”
Ibu Weris Meli menjawab: *"Kalau soal ini saya tak tau dan tak paham” (Minggu, 6 Juli 2025 ; 10.19 wib)*

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Yudi Ramadhan selaku penyandang disabilitas mental yang mana dalam wawancara ini yang diterjemahkan oleh ibunya sebagai berikut :

“Apakah Anda pernah mengikuti atau mengetahui adanya program yang mendukung hak berekspresi, berpindah tempat, serta berpartisipasi dalam kegiatan budaya, olahraga, atau pariwisata?”
Beliau menjawab : *“Belum pernah ikut dan saya juga kurang tahu program seperti itu. Kalau pun ada, informasinya sangat minim” (Minggu, 20 Juli 2025 ; 15.56 wib)*

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Syahrial selaku penyandang disabilitas tuna netra sebagai berikut :

“Apakah Anda pernah mengikuti atau mengetahui adanya program yang mendukung hak berekspresi, berpindah tempat, serta berpartisipasi dalam kegiatan budaya, olahraga, atau pariwisata?”
Bapak Syahrial menjawab : *"Saya belum pernah ikut atau mendengar tentang program yang mendukung hak kami untuk bebas berekspresi, berpindah tempat, atau ikut serta dalam acara budaya, olahraga maupun wisata.” (Minggu, 6 Juli 2025 ; 09.28 wib)*

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyandang disabilitas yang beragam jenis disabilitasnya, dapat disimpulkan bahwa penerimaan dan akses terhadap program yang mendukung hak berekspresi, berpindah tempat, serta berpartisipasi dalam kegiatan budaya, olahraga, dan pariwisata sangat

bervariasi. Penyandang disabilitas tuna netra seperti Muhammad Syukri Ramdhan memperoleh dukungan dari dinas terkait dan lingkungan sekitar sehingga mampu berpartisipasi aktif dan merasakan manfaatnya.

Namun, respon dari penyandang disabilitas tuna rungu dan mental menunjukkan kurangnya pengetahuan dan akses terhadap program tersebut, bahkan informasi yang ada sangat minim. Hal ini mengindikasikan masih adanya ketimpangan dalam pemahaman dan penyebaran informasi serta fasilitasi program bagi penyandang disabilitas yang berbeda kebutuhan. Oleh karena itu, perlu upaya lebih sistematis untuk meningkatkan sosialisasi dan aksesibilitas agar semua penyandang disabilitas dapat menikmati hak-hak tersebut secara merata.

Pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Dumai menunjukkan kemajuan yang signifikan dan komitmen yang kuat dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai telah aktif menciptakan lingkungan fisik dan sosial yang ramah disabilitas dengan menyediakan fasilitas aksesibel seperti jalur parkir khusus, ramp, toilet khusus, serta pelayanan publik yang mudah dijangkau. Meski implementasi terkendala dana dan koordinasi dengan dinas teknis lain, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai tetap mengawal dan memberi masukan agar hak-hak penyandang disabilitas diprioritaskan dalam pembangunan fasilitas baru. Selain itu, perlindungan terhadap penyandang disabilitas dari risiko bencana dan diskriminasi menjadi fokus melalui

sosialisasi, pendampingan hukum, edukasi masyarakat, dan kerja sama dengan aparat penegak hukum.

Dalam hal hidup mandiri dan partisipasi sosial, penyandang disabilitas difasilitasi melalui pelatihan keterampilan, pemberian alat bantu, dan dukungan agar mereka dapat aktif di berbagai bidang seperti sosial, budaya, olahraga, dan ekonomi. Penyandang disabilitas tuna netra dan tuna rungu umumnya merasakan dukungan cukup baik, sementara kelompok disabilitas mental masih memerlukan perhatian lebih. Dukungan bagi berekspresi dan partisipasi dalam kegiatan budaya, olahraga, dan pariwisata juga sudah ada, namun akses dan pengetahuan tentang program ini bervariasi antar jenis disabilitas.

Dukungan program pelatihan keterampilan seperti pelatihan menjahit yang dijalankan bersama swasta juga memperkuat pemberdayaan ekonomi mereka di Dumai. Bantuan sosial berupa alat bantu dan dana bantuan rutin juga disalurkan oleh pemerintah kota untuk menunjang kehidupan sehari-hari penyandang disabilitas.

Secara teoritis, pemberdayaan penyandang disabilitas menurut beberapa ahli seperti Ibrahim (2005) adalah proses yang memungkinkan individu dengan disabilitas untuk meningkatkan kontrol atas sumber daya dan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, sehingga mampu hidup mandiri dan berpartisipasi penuh di masyarakat. Pendekatan komprehensif yang melibatkan aksesibilitas fisik, perlindungan hukum, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan partisipasi sosial yang diterapkan Dinas Sosial Dumai sejalan dengan konsep pemberdayaan ini, yang juga ditekankan oleh WHO dalam Konvensi

Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) untuk memastikan hak dan akses yang sama bagi penyandang disabilitas.

Dapat diketahui dalam hal ini bahwa bentuk pemberdayaan penyandang disabilitas yang diterapkan di Kota Dumai mencakup pendekatan yang komprehensif dan partisipatif, meliputi pemenuhan hak hidup, pendidikan, kesehatan, pelatihan keterampilan, pemberian bantuan sosial, serta peningkatan akses informasi dan komunikasi. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai berperan sebagai fasilitator yang membantu penyandang disabilitas mengakses layanan pendidikan dan kesehatan melalui pendampingan, sosialisasi hak, dan pemberian bantuan sosial berupa uang tunai, sembako, dan alat bantu seperti kursi roda dan alat dengar.

Selain itu, program pelatihan praktis seperti menjahit, salon, dan komputer juga diadakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dengan dukungan kerjasama dari pihak swasta dan Balai Latihan Kerja. Dalam hal ini dapat dilihat bahwasannya pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Dumai ini sejalan dengan konsep pemberdayaan sosial menurut Robert Chambers (1997) yang menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai proses peningkatan kemampuan individu dan kelompok untuk mengendalikan kehidupannya dan mencapai potensi penuh. Pendekatan partisipatif yang melibatkan para penyandang disabilitas sebagai subjek aktif dalam pengambilan keputusan sesuai dengan prinsip inklusivitas yang menguatkan kontrol sosial mereka dalam pembangunan.

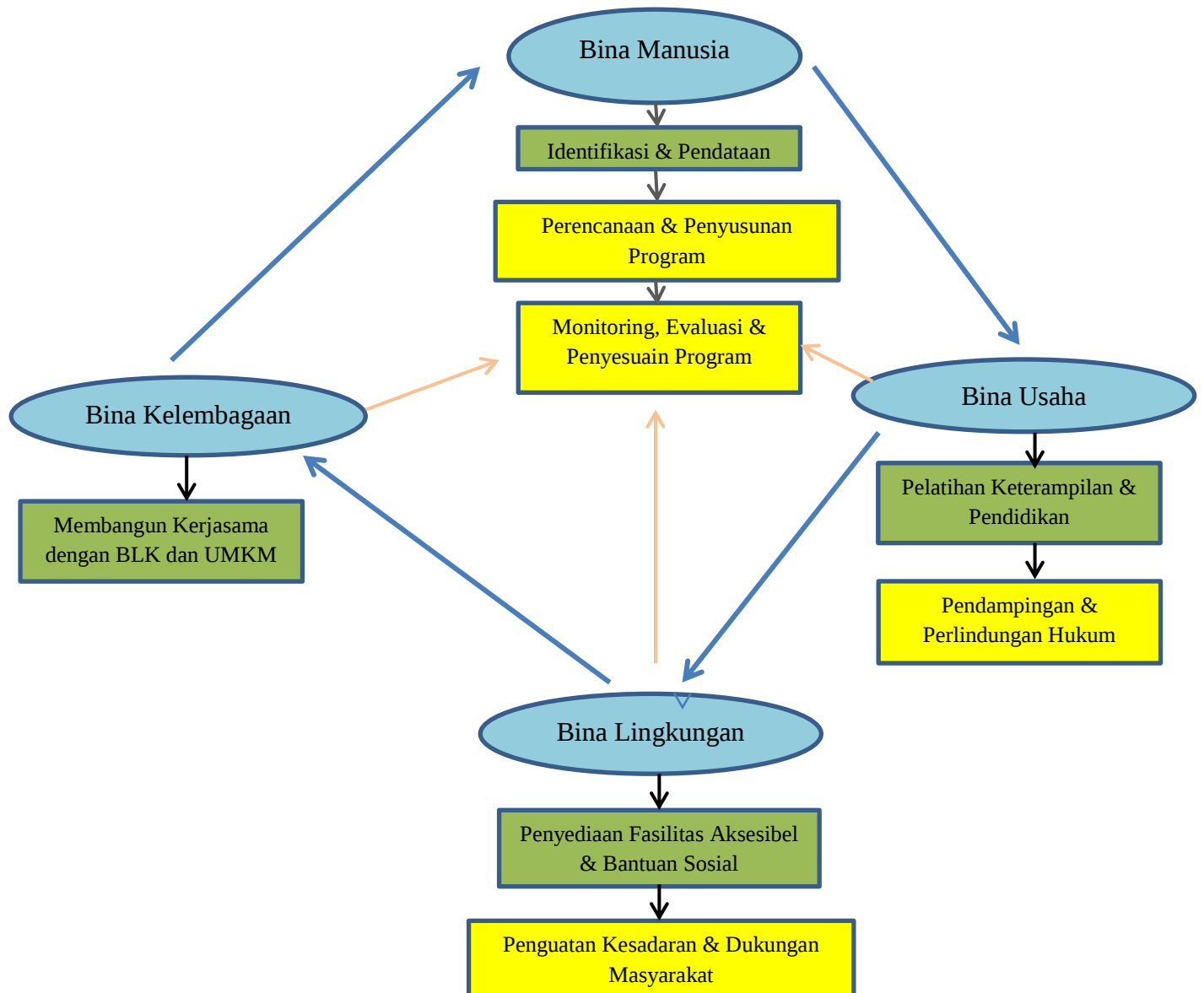
Upaya menciptakan lingkungan fisik dan sosial yang ramah disabilitas, termasuk aksesibilitas fasilitas umum, perlindungan hukum dari diskriminasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat juga menjadi bagian penting dalam pemberdayaan ini. Kendala yang masih ditemui seperti keterbatasan dana, SDM, fasilitas pelatihan yang lengkap, akses pasar bagi produk usaha disabilitas, serta kurang meratanya akses dan informasi bagi semua jenis disabilitas menunjukkan perlunya peningkatan program secara menyeluruh agar pemberdayaan dapat berjalan optimal dan inklusif.

Berikut adalah bentuk pemberdayaan penyandang disabilitas yang dapat diterapkan di Kota Dumai berdasarkan teori pemberdayaan Robert Chambers (1997) dengan pendekatan partisipatif dan komprehensif seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya :

Bagan V. 1

Bentuk Pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang sesuai untuk diterapkan

di Kota Dumai



Berdasarkan Bagan V.1 tersebut menggambarkan mekanisme bentuk pemberdayaan penyandang disabilitas yang sesuai untuk diterapkan di Kota Dumai melalui empat aspek utama, yaitu bina manusia, bina usaha, bina

lingkungan, dan bina kelembagaan, yang saling berhubungan dan mendukung satu sama lain. Proses dimulai dari Bina Manusia sebagai langkah awal, yang mencakup kegiatan identifikasi dan pendataan penyandang disabilitas untuk memperoleh informasi akurat mengenai kondisi, kebutuhan, serta potensi yang dimiliki. Berdasarkan data tersebut, dilakukan perencanaan dan penyusunan program pemberdayaan yang tepat sasaran. Tahap ini juga meliputi monitoring, evaluasi, dan penyesuaian program secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa tujuan pemberdayaan dapat tercapai secara efektif.

Selanjutnya, alur berlanjut ke Bina Usaha yang fokus pada peningkatan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas melalui pelatihan keterampilan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, serta pemberian pendampingan dan perlindungan hukum agar mereka dapat berusaha secara aman dan berkelanjutan.

Kemudian, proses dilanjutkan ke Bina Lingkungan yang menitikberatkan pada penyediaan fasilitas aksesibel dan bantuan sosial, sehingga lingkungan fisik maupun sosial menjadi lebih ramah dan mendukung aktivitas penyandang disabilitas. Selain itu, penguatan kesadaran dan dukungan masyarakat juga menjadi bagian penting agar tercipta penerimaan, kepedulian, dan partisipasi aktif dalam pemberdayaan.

Terakhir, Bina Kelembagaan berperan membangun kerja sama dengan berbagai pihak, seperti Balai Latihan Kerja (BLK) dan pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM), untuk membuka akses yang lebih luas terhadap pelatihan, lapangan kerja, dan peluang usaha bagi penyandang disabilitas. Keempat aspek

ini saling terhubung dan membentuk sebuah sistem pemberdayaan yang terintegrasi, sehingga setiap langkah yang dilakukan saling memperkuat dan menciptakan ekosistem yang kondusif bagi peningkatan kualitas hidup penyandang disabilitas di Kota Dumai.

C. Dampak Pemberdayaan bagi Penyandang Disabilitas Kota Dumai yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai

Pemberdayaan penyandang disabilitas memiliki dampak yang sangat berarti terutama dalam aspek ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan. Melalui program pemberdayaan, penyandang disabilitas dapat memperoleh akses pelatihan keterampilan yang meningkatkan kemampuan mereka untuk mandiri secara ekonomi. Hal ini membuka peluang kerja yang layak dan penghasilan yang berkelanjutan sehingga mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial. Misalnya, program pelatihan keterampilan dan usaha bersama membantu penyandang disabilitas dalam mengelola usaha kecil yang dapat menopang kebutuhan hidup pribadi maupun keluarga mereka.

Selain itu, pemberdayaan juga berdampak positif dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti akses sekolah bagi penyandang disabilitas. Program yang dirancang membantu mereka untuk dapat melanjutkan pendidikan dengan menyediakan fasilitas inklusif dan dukungan pendampingan sehingga mereka tidak tertinggal dalam proses pembelajaran. Hal ini memberikan harapan untuk meningkatkan kualitas hidup dan membuka kesempatan yang lebih besar di masa depan. Dengan pendidikan yang lebih baik, penyandang disabilitas dapat berperan aktif dan berkontribusi dalam sosial dan ekonomi masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, terdapat kendala yang signifikan dalam proses pemberdayaan tersebut. Salah satunya yaitu keterlibatan penyandang disabilitas sendiri dalam perencanaan dan pelaksanaan program juga masih kurang optimal, sehingga kadang program yang dijalankan tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan mereka. Keterbatasan keterlibatan ini juga mempengaruhi pemberdayaan secara menyeluruh karena tanpa partisipasi aktif penyandang disabilitas, program cenderung bersifat top-down dan tidak memberdayakan secara maksimal. Mereka perlu dilibatkan sebagai subjek dan aktor utama dalam proses pemberdayaan agar potensi dan aspirasi mereka dapat terwujud secara optimal dan program menjadi lebih tepat sasaran.

Tantangan lain yang dihadapi oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dalam menjalankan pemberdayaan ini adalah dukungan keluarga penyandang disabilitas yang belum maksimal. Dukungan keluarga sangat penting sebagai fondasi emosional dan praktis agar penyandang disabilitas dapat menjalani program pemberdayaan dengan baik. Namun, dalam beberapa kasus, keluarga belum memberikan dorongan dan perhatian yang cukup, sehingga penyandang disabilitas sulit untuk berkembang secara optimal.

Selain itu, ketersediaan anggaran juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Dana yang terbatas mempengaruhi cakupan dan kualitas dukungan yang bisa diberikan, mulai dari pelatihan, fasilitas pendidikan, hingga bantuan pemasaran hasil usaha penyandang disabilitas. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan

peningkatan dana menjadi kunci keberhasilan pemberdayaan yang berkelanjutan.

Dinas Sosial harus mampu mengelola anggaran secara transparan dan tepat guna serta melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk menambah sumber daya, seperti melibatkan swasta atau LSM yang memiliki perhatian pada penyandang disabilitas. Sinergi ini penting untuk mengatasi keterbatasan dana serta meningkatkan kualitas program pemberdayaan.

Dukungan masyarakat juga menjadi aspek yang tidak kalah penting. Kampanye sosial dan edukasi kepada masyarakat luas membantu menghilangkan stigma negatif terhadap penyandang disabilitas sehingga mereka lebih diterima dan dilibatkan dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Pemberdayaan tidak hanya soal ekonomi tetapi juga soal penerimaan dan penghargaan terhadap keberagaman dan potensi penyandang disabilitas sebagai bagian dari masyarakat.

Secara keseluruhan, pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Dumai membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan keluarga, pemerintah, dan masyarakat serta pengelolaan sumber daya yang efektif. Meski terdapat berbagai tantangan seperti keterlambatan pencairan dana dan keterbatasan dukungan, program pemberdayaan tetap penting untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas, khususnya dalam sisi ekonomi dan pendidikan.

Penguatan peran penyandang disabilitas sebagai pelaku utama pemberdayaan, bersama dengan dukungan sinergis dari keluarga dan pemangku kepentingan lainnya, dapat memberikan dampak yang lebih besar

bagi kesejahteraan mereka. Oleh karenanya, peningkatan koordinasi, edukasi, dan alokasi anggaran menjadi langkah strategis yang perlu terus dikembangkan di masa mendatang.

BAB VI

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Dumai merupakan upaya penting agar setiap individu, tanpa memandang keterbatasan, dapat berkontribusi penuh dalam masyarakat. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai telah menjalankan berbagai program seperti pelatihan keterampilan dan bantuan sosial untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas. Namun, masih ada tantangan, terutama dalam distribusi bantuan yang belum merata, khususnya di kecamatan Dumai Timur dan Dumai Barat, sehingga perlu evaluasi dan peningkatan aksesibilitas program agar manfaatnya lebih luas.

Selain bantuan finansial, pemberdayaan harus mencakup pengembangan kapasitas individu melalui pelatihan kewirausahaan agar penyandang disabilitas lebih mandiri secara ekonomi dan memperoleh peluang kerja lebih baik. Aspek sosial juga berperan penting dengan menciptakan lingkungan yang inklusif dan bebas stigma melalui sosialisasi dan pendidikan tentang hak-hak penyandang disabilitas. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan dukungan masyarakat dan mengurangi diskriminasi.

Penguatan kelembagaan yang mewakili kepentingan penyandang disabilitas sangat penting agar mereka dapat berperan aktif dalam advokasi dan pengambilan keputusan, sehingga kebutuhan mereka dapat terakomodasi dengan baik. Kerjasama antara Dinas Sosial, pemerintah daerah, LSM, dan

sektor swasta harus diperkuat untuk menciptakan sinergi dalam pelaksanaan program serta mengoptimalkan sumber daya yang ada. Kendala anggaran menjadi hambatan utama, sehingga pengelolaan dana yang transparan dan pencarian sumber pendanaan tambahan sangat dibutuhkan.

Monitoring dan evaluasi program secara berkala juga penting dilakukan untuk mengetahui efektivitas dan melakukan perbaikan yang diperlukan, sekaligus sebagai dasar perencanaan program yang lebih baik ke depan. Pendekatan holistik dalam pemberdayaan disabilitas yang meliputi aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik diperlukan agar penyandang disabilitas dapat berperan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka.

Dukungan keluarga menjadi faktor penting karena memberikan motivasi dan dukungan emosional bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu, penguatan program yang juga ditujukan bagi keluarga penyandang disabilitas perlu dilakukan agar mereka dapat memberikan dukungan optimal dalam proses pemberdayaan.

Secara keseluruhan, pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Dumai memerlukan komitmen bersama dari pemerintah, masyarakat, dan penyandang disabilitas sendiri untuk memenuhi hak-hak mereka dan berkontribusi aktif dalam masyarakat. Tujuannya adalah menciptakan kehidupan yang inklusif dan sejahtera bagi semua pihak.

B. Saran

1. Optimalisasi Program Rehabilitasi Sosial :

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai perlu melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap program rehabilitasi sosial yang belum berjalan optimal. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi antara berbagai bidang di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, serta melibatkan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program. Dengan melibatkan mereka, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dapat memastikan bahwa program yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan nyata dan aspirasi penyandang disabilitas.

2. Peningkatan Pelatihan dan Keterampilan :

Program pelatihan keterampilan yang ada harus diperluas dan diperkaya dengan berbagai jenis keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar. Penyandang disabilitas perlu diberikan akses ke pelatihan yang mendukung kemandirian ekonomi mereka, seperti pelatihan kewirausahaan, keterampilan teknis, dan soft skills. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan swasta untuk menyediakan pelatihan yang berkualitas.

3. Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai lebih dapat meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak penyandang disabilitas. Ini termasuk mengurangi stigma dan

meningkatkan kesadaran akan pentingnya inklusi sosial. Program-program kampanye yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai pembicara atau narasumber dapat memberikan dampak positif dalam mengubah pandangan masyarakat.

4. Peningkatan Anggaran dan Sumber Daya

Mengingat banyaknya program yang membutuhkan dana, sangat penting bagi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai untuk mengusulkan peningkatan anggaran setiap tahunnya. Selain itu, Dinas juga dapat menjajaki kerjasama dengan sektor swasta dan LSM untuk mendapatkan dukungan tambahan dalam bentuk dana atau sumber daya lainnya.

5. Monitoring dan Evaluasi yang Berkelanjutan

Proses monitoring dan evaluasi program pemberdayaan penyandang disabilitas sebaiknya dilakukan secara rutin dan sistematis. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai perlu mengembangkan indikator keberhasilan yang jelas dan melakukan evaluasi dampak dari program-program yang telah dilaksanakan. Hasil evaluasi ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk penyempurnaan program di masa mendatang.

6. Penguatan Kelembagaan Penyandang Disabilitas

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai disarankan untuk memperkuat organisasi-organisasi penyandang disabilitas di Kota Dumai. Dengan memberikan dukungan kepada kelembagaan ini, penyandang disabilitas akan memiliki wadah untuk bersuara dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

7. Penyusunan Kebijakan yang Inklusif

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai harus berperan aktif dalam menyusun kebijakan yang inklusif dan berpihak kepada penyandang disabilitas. Ini termasuk mengadvokasi perlunya regulasi yang lebih baik untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas di Kota Dumai, serta memastikan bahwa kebijakan yang ada diimplementasikan dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

- Abkim, I. I. (2022). *PEMBERDAYAAN*. 16–42.
- Afriansyah. (2023). Pengertian dan Konsep Pemberdayaan Masyarakat. In *Pemberdayaan Masyarakat*.
- Ana, S. D. (2020). *Dampak Perkawinan Usia Dini*. 12–33.
- Arifin, M. B. U. B. (2018). Buku Ajar Metodologi Penelitian Pendidikan. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Pendidikan*. <https://doi.org/10.21070/2018/978-602-5914-19-5>
- Az-Zahra, A., & Hamid, A. (2022). Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Fisik Melalui Program Keterampilan Di Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti Jakarta Barat. *Journal of Social Work and Social Services*, 3(2), 86–95.
- Britania, D. A., & Widiyarta, A. (2023). Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dalam Mewujudkan Hak Pekerjaan yang Layak oleh UKM Tiara Handicraft Surabaya. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 5(3), 248–257. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v5i3.590>
- Choi, S. L., Goh, C. F., Adam, M. B. H., & Tan, O. K. (2016). Transformational leadership, empowerment, and job satisfaction: The mediating role of employee empowerment. *Human Resources for Health*, 14(1), 1–14. <https://doi.org/10.1186/s12960-016-0171-2>
- Corrêa, A. F., & Barbosa, M. G. (2019). Female empowerment: A case study in the state of Maranhão, Brazil. *Per Musi*, 39(39), 1–16. <https://doi.org/10.35699/2317-6377.2019.5300>
- Dawis, A. M., Meylani, Y., Heryana, N., Alfathoni, M. A. M., Sriwahyuni, E., Ristiyana, R., Januarsi, Y., Wiratmo, P. A., Dasman, S., Mulyani, S., Agit, A., Shoffa, S., & Baali, Y. (2023). *Pengantar Metodologi Penelitian*.
- Farrisqi, K. A., & Pribadi, F. (2021). Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Protection of Persons With Disabilities’ Rights To Get a Decent Work and Livelihood. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial E*, 4(2), 149–155.
- Habib, M. A. F. (2021). *Kajian teoritis pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif 1*. 1(2), 82–110.

- Julika, S. R., & P, I. I. (2016). Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Dalam Mendorong Pembangunan Desa. *Public Corner*, 11(2), 1–16.
- Kurniawati, D. P., Supriyono, B., & Hanafi, I. (2013). Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Usaha Ekonomi (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(4), 9–14.
- Otto. (2020). *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. 1–34.
- Pinontoan, M. (2020). Konsep Dasar Kemiskinan dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat. In *PT Nasya Expanding*.
- Qodim, N. (2020). Landasan Teori Definisi Dampak. *Repo.Uinsatu.Ac.Id*, 17–53.
- Rachman, R. B. A. A. (2020). PERAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DIFABEL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN (Studi Kasus Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Cabang Kota Kediri). *Undergraduate (S1) Thesis, IAIN Kediri.*, 45–47.
- Rafli, M. (2018). *Dampak ChatGpt Terhadap Prilaku Belajar*. 14–22.
- Rayhan, M. (2017). *DISABILITAS*. 13–50.
- Retnoningsih. (2019). *DAMPAK KOMUNIKASI TERHADAP PRILAKU*. 25–48.
- Rifqi Febrianto. (2006). *PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS*. 105(3), 129–133.
- Safyuddin, Yunus, Suadi, & Fadli. (2017). *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu* (Vol. 31, Issue 2).
- Sianturi, N., & Mathematics, A. (2016). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas pada Ayanan Trabsportasi Publik. *Tumou Tou*, 20(2), 1–23.
- Sriati. (2020). BUKU : Sriati (2022) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. Palembang : Unsri Press. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 12–26.
- Suaib. (2023). Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. In *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*.
- Uтары Telung, Michael Mantiri, J. K. (2019). *Issn : 2337 - 5736*. 3(3), 1–8.
- Wahyuni, D. (2018). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 9(1),

85–102. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v9i1.994>

Waridah, E. (2017). *Dampak Media Sosial terhadap perkembangan moral anak*. 12–33.

Peraturan Perundang-Undangan

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 1 TAHUN 2020

PERATURAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 13 TAHUN 2022

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999.